

**PERKEMBANGAN EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Triwulan I - 2007

**Kantor Bank Indonesia
Batam**

RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TRIWULAN I-2007

GAMBARAN UMUM

...Perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan I-2007 tumbuh lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. Inflasi menunjukkan kecenderungan menurun. Perbankan menunjukkan kinerja yang cukup baik...

Perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan I-2007 tumbuh lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah inventasi, baik asing maupun dalam negeri, pada triwulan laporan diperkirakan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Meningkatnya jumlah penanam modal tersebut diikuti dengan meningkatnya kegiatan ekonomi.

Inflasi menunjukkan kecenderungan menurun, meski masih terdapat tekanan khususnya dari kelompok bahan makanan terkait masalah produksi dan distribusi. Di sisi lain, angka pengangguran diperkirakan mengalami penurunan pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja perbankan (bank umum) secara umum mengalami perkembangan cukup baik dibanding periode yang sama tahun lalu. Penyelesaian transaksi tunai dan non tunai di Batam pada triwulan ini cukup baik. Sementara itu, jumlah temuan uang rupiah palsu (UPAL) diperkirakan lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya.

Perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan II-2007 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding triwulan laporan. Dari sisi penawaran pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Sedangkan dari sisi permintaan, pertumbuhan utamanya didorong oleh konsumsi pemerintah dan konsumsi swasta. Inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan cenderung menurun, meski masih terdapat potensi tekanan. Kinerja perbankan diperkirakan semakin membaik.

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

... Perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan I-2007 diperkirakan tumbuh 6,20% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya...

Perekonomian Kepulauan Riau diperkirakan tumbuh 6,20% (qtq), lebih tinggi dibanding triwulan IV-2006. Dari sisi penawaran, pertumbuhan terbesar dicapai oleh sektor jasa-jasa sebesar 2,83%, dan diikuti oleh sektor keuangan (2,25%), sektor perdagangan (2,22%), sektor bangunan (2,20%), sektor industri (1,99%).

Sektor jasa-jasa mencapai pertumbuhan tertinggi, antara lain didorong oleh pertumbuhan pada subsektor pemerintah dan subsektor swasta, serta berasal dari subsektor jasa hiburan.

Sementara itu, pertumbuhan sektor keuangan utamanya didorong oleh subsektor bank. Hal itu dapat dikonfirmasi dengan meningkatnya penyaluran

kredit perbankan pada triwulan I-2007 sebesar 0,70% dibanding triwulan IV-2006.

Pertumbuhan sektor Listrik dan Air bersih yang berasal dari subsektor Listrik sebesar Rp. 16,09 milyar lebih tinggi dibanding triwulan IV-2006 sebesar 1,12%. Peningkatan tersebut diperkirakan karena kebutuhan akan listrik yang makin meningkat.

Sektor perdagangan tumbuh 2,22%, dimana pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh sub-subsektor hotel yang tumbuh 3,73%. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari terciptanya rasa aman di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin kondusif serta makin dipercayanya kota Batam sebagai tempat penyelenggaraan meeting, eksibisi dan konferensi.

Sektor bangunan pada triwulan I-2007 tumbuh 2,20%, lebih tinggi dibanding triwulan IV-2006. Pertumbuhan tersebut diperkirakan karena telah direalisasikannya beberapa proyek infrastruktur oleh pemerintah, maupun meningkatnya pembangunan properti residensial oleh perusahaan pengembang dan masyarakat umum maupun pembangunan properti komersial lainnya.

Pertumbuhan sektor jasa-jasa utamanya didorong oleh pertumbuhan subsektor pemerintah yang tumbuh sebesar 4,38%. Hal itu diperkirakan karena mulai terrealisasinya proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD. Sedangkan, pertumbuhan sektor LGA diperkirakan karena meningkatnya konsumsi air bersih dan listrik untuk industri dan rumah tangga.

Sektor industri mengalami pertumbuhan sebesar 1,99% pada triwulan I-2007. Pertumbuhan tersebut utamanya berasal dari sub-sektor Listrik sebesar 1,12%. Melambatnya pertumbuhan sektor tersebut diperkirakan karena tidak adanya kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi untuk meningkatkan produksi dan daya saing.

PERKEMBANGAN INFLASI

...Pada triwulan laporan, Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 5,35% (yoy). Tekanan inflasi mulai mengalami penurunan...

Perkembangan inflasi Kepulauan Riau pada triwulan I-2007 ditandai oleh penurunan tekanan laju inflasi, yaitu sebesar 5,35% (yoy) dibanding triwulan IV-2006 sebesar 12,57% (yoy). Rendahnya inflasi pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh masih lemahnya permintaan masyarakat serta ekspektasi masyarakat terhadap inflasi yang membaik yang tercermin dari hasil survei konsumen serta menurunnya harga-harga komoditi di tahun 2007.

Dilihat secara triwulanan, inflasi q-t-q tercatat sebesar 1,42%, sedikit menurun dibanding triwulan IV-2006. Penurunan tersebut diperkirakan karena stabilnya harga-harga barang dan jasa.

Sementara itu, secara kumulatif, inflasi y-t-d sampai triwulan I-2007 tercatat sebesar 1,40%. Melihat pencapaian inflasi tersebut, diperkirakan target inflasi sebesar 6%-7% pada tahun 2007 dapat dicapai.

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

...Kinerja perbankan relatif cukup baik. Total aset dan penghimpunan DPK meningkat dari tahun lalu...

Kinerja bank umum di Kepulauan Riau pada triwulan I-2007 mengalami perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan triwulan IV-2006. Total aset pada triwulan laporan meningkat 0,17% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp 14,62 triliun, dari posisi triwulan IV-2006 yang tercatat sebesar Rp 14,59 triliun.

Sementara itu, dilihat dari sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum mengalami peningkatan sebesar 0,34% dari triwulan sebelumnya Rp 12,42 triliun dan posisi triwulan I-2007 yang tercatat sebesar Rp 12,46 triliun.

Jumlah kredit yang disalurkan mengalami peningkatan Rp 46,71 miliar atau 0,70 sehingga menjadi Rp 6,71 triliun dibanding triwulan IV-2006. Peningkatan penyaluran kredit tersebut mengindikasikan peningkatan fungsi intermediasi bank umum, yang tercermin pula dari peningkatan *loan to deposit ratio* (LDR) dari 53,67% posisi triwulan IV-2006 menjadi 53,87 % pada triwulan laporan.

Seiring dengan pertumbuhan LDR, kredit *non performing loans* (NPLs) bank umum juga mengalami peningkatan yaitu dari 4,34% posisi triwulan IV-2006 menjadi 4,46% pada triwulan I-2007. Meskipun masih dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%, meningkatnya jumlah kredit non lancar ini perlu mendapat perhatian manajemen bank.

Sementara itu, pada triwulan I-2007, aset BPR tercatat mencapai sebesar Rp 458,78 miliar, meningkat Rp 31,14 miliar atau 18,65% dibanding triwulan IV-2006, dan meningkat Rp 56,36 miliar atau 15,18% dibanding triwulan III-2006. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan DPK yang berhasil dihimpun yang pada posisi triwulan I 2007 mencapai Rp 371,22 miliar atau meningkat Rp 14,24 miliar atau 3,99% dibanding triwulan IV 2006.

Di sisi lain, fungsi intermediasi BPR sampai triwulan I-2007 masih berjalan dengan cukup baik, terbukti dari jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 266,33 miliar atau meningkat Rp 34,33 miliar atau 14,80% dibanding triwulan IV-2007, dan meningkat sebesar Rp 35,46 miliar atau 18,04% dibanding triwulan III-2007.

Peningkatan kredit tersebut diikuti oleh peningkatan rasio LDR pada triwulan I-2007 yang mencapai 71,75%. Hal tersebut juga diikuti dengan membaiknya kualitas kredit yang disalurkan yaitu sebesar 0,75% atau turun dari 1,12% dibandingkan triwulan IV-2006.

Perkembangan *inflow* atau aliran uang masuk ke kas Bank Indonesia yang berasal dari setoran bank-bank umum pada triwulan I-2007 tercatat sebesar Rp 120,71 miliar, sementara aliran uang keluar dari kas Bank Indonesia karena adanya penarikan oleh bank umum tercatat sebesar Rp 365,75 miliar. Dengan demikian terjadi *net outflow* sebesar Rp 245,04 miliar.

...Pada triwulan ini terjadi net outflow sebesar Rp 245 miliar...

Jumlah warkat kliring yang di kliringkan pada triwulan I-2007 sebanyak 104.613 lembar dengan nilai transaksi sebesar Rp 2,30 triliun. Rata-rata perputaran kliring per hari tercatat sebanyak 4.891 lembar dengan rata-rata nominal sebesar Rp 107,35 miliar. Penolakan cek/bilyet giro kosong tercatat sebanyak 1.449 lembar dengan nominal sebesar Rp 33,89 miliar.

Jumlah temuan uang palsu (UPAL) yang berasal dari laporan bank maupun laporan dari masyarakat, dalam triwulan I-2007 sebanyak 4 lembar. Adapun jenis pecahan yang paling banyak dipalsukan adalah pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 2 lembar.

PROSPEK PEREKONOMIAN

...Perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan II-2007 diperkirakan tumbuh lebih baik...

Perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan II-2007 diperkirakan tumbuh positif. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan terkait dengan peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan, sedangkan sektor bangunan didorong oleh peningkatan realisasi proyek infrastruktur pemerintah sebagai langkah akselerasi realisasi belanja APBD.

Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terutama didorong oleh konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Pertumbuhan konsumsi swasta disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terkait musim liburan sekolah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh realisasi proyek-proyek dari APBN/APBD.

Pertumbuhan investasi diperkirakan juga akan tumbuh positif, namun masih sangat terbatas. Sementara itu, pertumbuhan ekspor netto diperkirakan tumbuh positif khususnya untuk beberapa produk seperti produk kayu, pakaian jadi, dan ikan. Dengan asumsi tersebut, target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 6% diperkirakan dapat dicapai.

Inflasi pada triwulan II-2007 diperkirakan sedikit meningkat, karena masih terdapat potensi tekanan karena faktor musiman berupa musim liburan sekolah. Selain itu, akselerasi realisasi belanja APBD juga dapat memberikan tekanan inflasi. Sementara itu, tekanan dari faktor fundamental yang berasal dari ekspektasi masyarakat terhadap inflasi mulai mereda yang tercermin dari hasil survei konsumen.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tendensi yang mengarah kepada *optimisme* ekspektasi konsumen dalam beberapa bulan ke depan, menyusul perbaikan dan terkoreksinya beberapa indikator makro ekonomi yang terlihat semakin membaik. Dengan asumsi tersebut diperkirakan inflasi pada akhir triwulan IV-2007 berkisar antara 2%-2,5% (qtq).

Kinerja perbankan pada triwulan II-2007 secara umum diproyeksikan masih akan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Fungsi intermediasi

...Inflasi pada triwulan II-2007 diperkirakan sedikit meningkat, karena masih terdapat tekanan karena faktor musiman...

perbankan diperkirakan terus menunjukkan perbaikan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian secara makro.

REKOMENDASI

Berdasarkan perkembangan perekonomian makro dan perbankan pada triwulan I-2007 dan mempertimbangkan prospek di triwulan II-2006 di tingkat regional Provinsi Kepulauan Riau, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan departemen terkait (c.q. Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri) untuk mendorong stimulus fiskal di daerah sehingga dapat lebih meningkatkan efektivitas kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.
2. Memperluas cakupan wilayah bantuan teknis (bantek) yang dilakukan Bank Indonesia dengan menyasar langsung kepada praktisi UMKM di daerah. Harapannya dengan memperluas cakupan bantek tersebut dapat mempercepat pertumbuhan sektor riil sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
3. Mempercepat realisasi skema pembiayaan UMKM yang memberikan keringanan bunga dan mengatasi hambatan akses UMKM terhadap perbankan

Bab 1

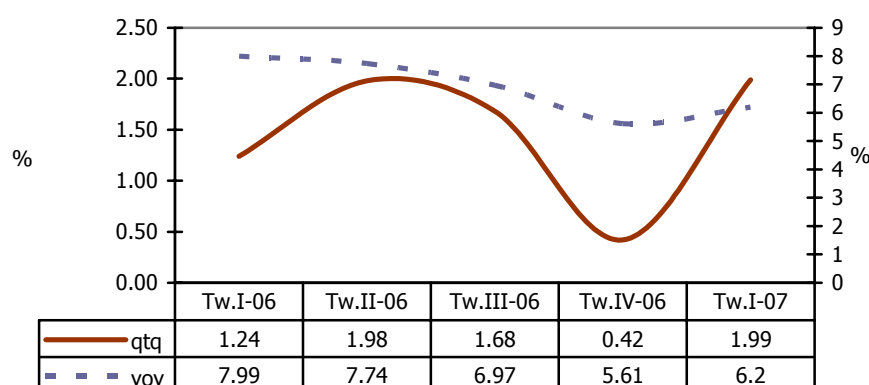
Perkembangan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan kinerja yang semakin membaik setelah sempat melambat pada akhir tahun 2006. Memasuki triwulan I-2007, perkembangan ekonomi makro Provinsi Kepulauan Riau mengalami perbaikan dan perkembangan yang positif yaitu sebesar 6,20% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV-2006 yang tercatat sebesar 5,61%. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi tahunan di daerah Kepulauan Riau didorong oleh sektor industri (67,35%), sektor perdagangan (8,08%), sektor pertambangan (6,58%), sektor pertanian (4,58%). Sektor industri yang memberikan sumbangan terbesar pada perekonomian regional Kepri dengan tingkat pertumbuhan mencapai 5,98% (yoy).

Sementara itu, secara triwulanan pertumbuhan ekonomi regional sebesar 1,99% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2006 yang tercatat 0,42%. Perekonomian tumbuh dengan baik, dimana hampir seluruh sektor tumbuh secara moderat pada awal triwulan 2007. Sektor pertanian yang mengalami kontraksi pada akhir tahun 2006 mulai mengalami perbaikan pada awal tahun 2007 dimana tumbuh sebesar 0,94% (qtq) meskipun sub-sektor kehutanan dan sub-sektor perikanan masih tumbuh negatif, masing-masing sebesar -3,37% dan -1,49%.

GRAFIK 1.1 – PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



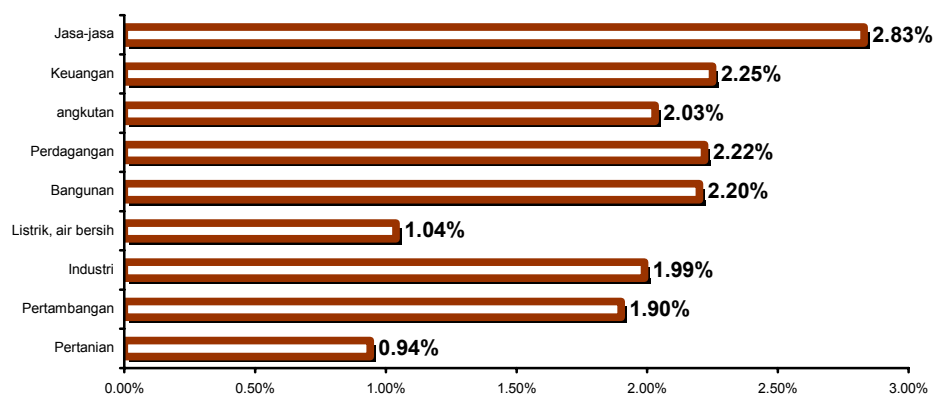
Dari sisi penawaran, pertumbuhan triwulanan terbesar terdapat pada sektor jasa-jasa yang mencapai 2,83% (qtq) dan sektor keuangan sebesar 2,25% (qtq). Sementara itu, sektor industri

yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 1,99% yaitu untuk industri tanpa migas.

Disamping pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau, indikator perekonomian lainnya juga menunjukkan kondisi yang terus membaik, diantaranya adalah: pergerakan IHK yang stabil, perkembangan penduduk, angkatan kerja dan pengangguran, tingkat kemiskinan, serta jumlah PMA dan PMDN. Sementara itu, perekonomian nasional terus berlanjut yang disertai dengan stabilitas makroekonomi. Kinerja ekspor dan perbaikan permintaan domestik menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan pertumbuhan investasi. Disamping itu, penguatan nilai tukar rupiah yang disertai dengan penurunan volatilitas serta inflasi IHK yang tetap terkendali dipengaruhi oleh membaiknya kinerja Neraca Pembayaran Indonesia, terjaganya faktor risiko dan menariknya imbal hasil rupiah. Berdasarkan hal tersebut, melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada tanggal 6 Maret 2007 kembali menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) dari 9,25% menjadi 9,00%.

Dengan mengutip pidato awal tahun oleh Gubernur Bank Indonesia pada acara pertemuan tahunan perbankan dengan tema Memanfaatkan Stabilitas Menuju Kebangkitan Ekonomi Negeri disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2007 diperkirakan berada dalam kisaran 5,7% - 6,3% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di 2005 dan 2006.

GRAFIK 1.2 – LAJU PERTUMBUHAN TRIWULANAN PDRB TRIWULAN I-2007

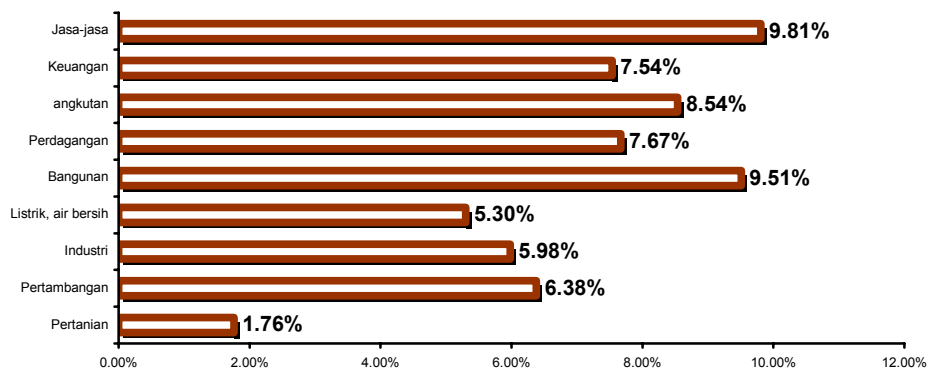


Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Kembali ke sisi regional, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau hingga tw.I-2007 tumbuh cukup stabil setelah adanya tekanan pada tahun lalu yang tercermin pada masih relatif tingginya harga barang dan jasa sebagai dampak kenaikan harga BBM akhir tahun. Meskipun demikian, lambat laun tekanan tersebut mulai menghilang sebagaimana yang tampak pada tingkat pertumbuhan sektor ekonomi. Pada Provinsi Kepulauan Riau, sektor jasa mengalami pertumbuhan terbesar secara triwulanan yang terutama disumbangkan oleh sub-sektor

pemerintahan yang dipengaruhi oleh penciptaan nilai tambah khususnya berupa upah dan gaji yang relatif membaik.

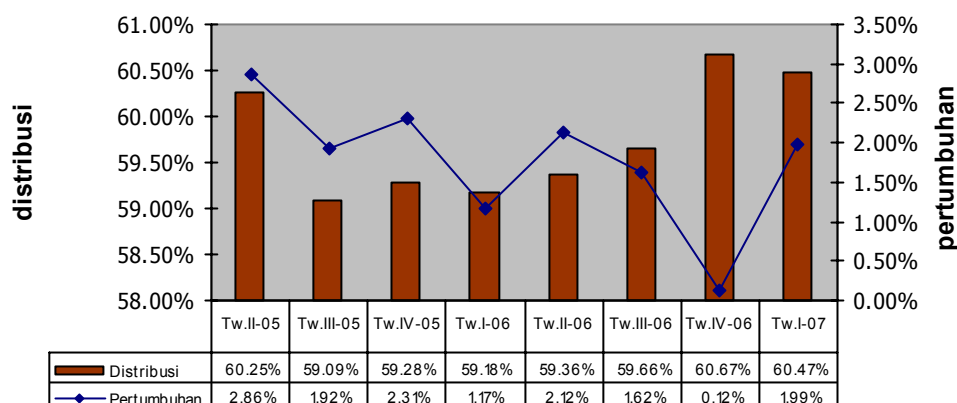
GRAFIK 1.3 – LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB TRIWULAN I-2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan grafik 1.3 diatas, secara tahunan sektor jasa memiliki tingkat pertumbuhan terbesar diikuti oleh sektor bangunan. Meskipun demikian, sektor industri masih menjadi sektor dominan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini menunjukkan bahwa industri masih menjadi sektor unggulan di Provinsi Kepri sebagaimana rencana awal pengembangan pulau Batam di awal tahun 1980-an. Mulanya pulau Batam seluas 415 km², dimana seiring dengan perkembangan investasi maka kebutuhan terhadap lahan juga semakin meningkat. Untuk itu maka pada tahun 1992 wilayah industri di Batam diperluas hingga ke pulau Rempang dan Galang, sehingga luas keseluruhan menjadi 715 km². Selain ditetapkan sebagai daerah industri, Batam juga dikembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya seperti: perdagangan, pariwisata, dan bongkar muat (*transshipment area*).

GRAFIK 1.4 – PERKEMBANGAN TINGKAT PERTUMBUHAN & DISTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA TW.I-2007



Sektor industri memberikan distribusi sebesar 60,47% terhadap PDRB Provinsi Kepri pada triwulan I-2007. Letak Batam yang strategis menjadikan wilayah ini unggul secara komparatif dibandingkan wilayah lainnya di Pulau Sumatera karena berada dekat dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga sektor industri dan perdagangan menjadi sektor utama daerah ini. Sejak ditetapkan sebagai pusat industri dan perdagangan oleh Presiden Soeharto serta dengan diresmikannya berbagai fasilitas dasar pada tahun 1983 menjadikan Batam sebagai suatu tempat yang berkembang pesat hingga saat ini. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan untuk mendukung perkembangan wilayah tersebut agar dapat menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan yang diperhitungkan oleh investor, dengan ditetapkannya Batam sebagai pusat promosi produk unggulan dari berbagai daerah di wilayah Pulau Sumatera. Berdasarkan grafik 1.4 terlihat bahwa tingkat distribusi sektor industri terhadap PDRB cukup stabil dengan laju pertumbuhan yang meningkat.

Wilayah Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan perairan, menjadikan sektor perikanan sebagai penyumbang terbesar perekonomian. Salah satu jenis komoditi yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan kerapu, yang saat ini dicanangkan Pemerintah Daerah sebagai komoditas perikanan unggulan disamping udang, ikan nila dan rumput laut. Pengembangan perikanan kerapu diarahkan pada pembudidayaannya terutama untuk memenuhi pasar ekspor di samping pasar domestik.

Sejak dikuasainya teknologi produksi benih (*hatchery*) kerapu, perkembangan budidaya kerapu di perairan laut berkembang di berbagai daerah. Benih hasil *hatchery* yang diproduksi di berbagai lokasi telah banyak digunakan menggantikan benih alam yang sudah semakin sulit diperoleh. Terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, pada tahun 2007 Pemerintah Provinsi memiliki program-program yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana di bidang dimaksud, antara lain adalah dengan memperkuat permodalan nelayan sebanyak 1.100 nelayan dan 100 koperasi nelayan. Disamping itu, revitalisasi pelabuhan perikanan direncanakan sebanyak 2 unit, dan revitalisasi tempat pelelangan ikan sebanyak 3 unit, serta pembangunan pabrik es sebanyak 2 unit.

Adapun sektor bangunan turut memberikan distribusi terhadap tingkat PDRB Provinsi Kepri meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor properti menjadi satu hal yang menarik untuk diperhatikan dan dikembangkan mengingat pertumbuhan sektor ini cukup besar. Maraknya pembangunan sektor properti dapat dilihat dari alokasi lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), dimana dari luas Pulau Batam seluas 41.500 hektar, sampai akhir tahun 2005 pihak Otorita Batam telah mengalokasikan lahan untuk sektor perumahan sebesar 9.646 hektar atau 39,85%. Berdasarkan hasil survey Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di Kota Batam yang merupakan kerjasama antara BI Batam dengan Politeknik Batam, diketahui bahwa pada tw.I-2007 tingkat IHPR sebesar 108,56 atau

meningkat cukup signifikan sebesar 8,56% terhadap triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi pada tipe rumah kecil (5,82%) dan rumah besar (8,87%).

BOKS - I

Survey Indeks Harga Properti Residensial di Kota Batam Tw.I – 2007

Survey Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) merupakan survei rutin triwulanan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan harga properti residensial, baik pada triwulan bersangkutan maupun perkiraan triwulan berikutnya. Survei dilakukan terhadap pengembang di wilayah Jabotabek dan 13 Kantor Bank Indonesia, dimana jumlah responden mencakup 40 pengembang utama di Jabotabek dan sekitar 215 pengembang di KBI. Hasil survey ini diolah menjadi Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) gabungan/komposit. Survey Harga Properti Residensial dilakukan sejak triwulan I-1999 untuk Jabotabek dan 12 KBI, dan Pontianak sejak triwulan I-2004. Sementara itu, KBI Batam melakukan survei IHPR sejak tw.I-2005.

Ruang lingkup Survey Indeks Harga Properti Residensial (SIHPR) meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual oleh perusahaan pengembang perumahan (*primary market*) yang melakukan transaksi penjualan. Informasi yang diperoleh dari hasil survey digunakan untuk melihat perkembangan harga dan kuantitas properti residensial, baik yang terjadi pada triwulan berjalan maupun perkiraan harganya untuk triwulan mendatang. Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan membandingkan harga dan kuantitas properti triwulan berjalan dengan periode sebelumnya yang disajikan dalam bentuk indeks harga properti residensial. Perkembangan indeks harga properti residensial ini juga digunakan sebagai salah satu komponen penghitung dalam penelitian inflasi harga aset.

Lokasi responden untuk SHPR berdasarkan pada Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Otorita Batam yang meliputi : Batam Centre, Batu Ampar, Sekupang, Muka Kuning, Tanjung Uncang, Nongsa, Kabil dan Duriangkang dimana jumlah sampel sebanyak 54 proyek dari 24 perusahaan/developer. Sementara itu, harga rata-rata properti residensial berdasarkan klasifikasi rumah pada tw.I-2007 adalah:

NO	Klasifikasi Rumah	Harga Rata-Rata Rumah	
		Tw.IV-2006	Tw.I-2007
1.	Kecil	Rp. 68.371.646,93	Rp. 72.350.173,61
2.	Sedang	Rp. 205.266.432,79	Rp. 193.102.320,95
3.	Besar	Rp. 595.205.344,79	Rp. 647.992.745,45
	Total	Rp. 238.059.865,67	Rp. 258.441.316,63

Sumber : Laporan SHPR – Data Diolah, 2007

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa tipe rumah yang dijual oleh pengembang masih didominasi oleh kelas sedang (44,59%), kelas kecil (32,43%), dan kelas besar (22,97%), sedangkan untuk rata-rata harga rumah berdasarkan klasifikasinya terlihat bahwa terdapat peningkatan harga rata-rata terhadap tw.IV-2006 pada rumah besar (naik dari Rp.595.205.344,79 menjadi Rp.647.992.745,45), rumah kecil (naik dari Rp.68.371.646,93 menjadi Rp.72.350.173,61), namun pada rumah sedang terdapat penurunan yaitu dari Rp.205.266.432,79 menjadi Rp.193.102.320,95. Hasil survei IHPR tw.I-2007 diketahui bahwa indeks triwulan laporan sebesar 8.56 yang relatif lebih tinggi dibandingkan tw.IV-2006 yaitu 0,53.

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan properti di Batam, antara lain: penyediaan air bersih terkait dengan aturan yang diterapkan ATB bagi developer yang mengajukan sambungan baru, pembatasan izin kepemilikan rumah bagi WNA di Batam, serta penetapan tarif dasar listrik.

Terkait dengan perkembangan sektor properti di Kota Batam, Bank Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait antara lain REI, developer serta perbankan, terutama mengingat kecenderungan developer di Kota Batam umumnya belum memanfaatkan peran perbankan dalam pembiayaan usahanya.

1.2 PERKEMBANGAN PENDUDUK¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan 2007 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.394.177 jiwa, dimana sebagian besar penduduk terdapat di Kota Batam (51,21%), Kabupaten Karimun (14,95%), dan Kota Tanjung Pinang (12,38%).

TABEL 1.1 – JUMLAH PENDUDUK MENURUT KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Batam	713.960	51,21
2. Karimun	208.400	14,95
3. Tanjung Pinang	172.616	12,38
4. Bintan	121.303	8,70
5. Natuna	93.644	6,72
6. Lingga	84.254	6,04
Total	1.394.177	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kota Batam yang menempati urutan teratas berdasarkan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian yang berkembang di daerah tersebut, dimana sektor industri dan perdagangan memegang peranan yang cukup besar dalam perekonomian. Kedua sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi yang dominan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan proporsi penduduk Batam menjadi lebih heterogen dari Kabupaten/Kota lainnya baik dari sisi agama maupun dari sisi suku bangsa.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2000, dapat dilihat bahwa persentase terbesar suku bangsa yang menghuni Kota Batam adalah suku Jawa (26,69%) diikuti oleh suku Melayu (20,90%) dan suku Batak (14,92%). Sebaran dan kepadatan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh luas wilayah dan skala pembangunan saja, akan tetapi skala kegiatan pemerintahan juga berpengaruh. Perkiraan ini terkait dengan ketersediaan fasilitas bagi penduduk seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan dan sebagainya. Dari hasil sensus tersebut juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Batam sebagian besar berada pada usia produktif (antara 15-64 tahun) yaitu sebesar 76,76% sedangkan untuk usia 15 tahun ke bawah sebesar 22,58% dan untuk usia 65 tahun keatas sebesar 0,66%.

Sementara itu, jumlah penduduk di Kota Tanjung Pinang berada di urutan ketiga setelah Tanjung Balai Karimun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sektor ekonomi yang berkembang di daerah tersebut, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Karimun bekerja di sektor pertanian yang dikelompokkan dalam 5 sub sektor yaitu: tanaman pangan, peternakan,

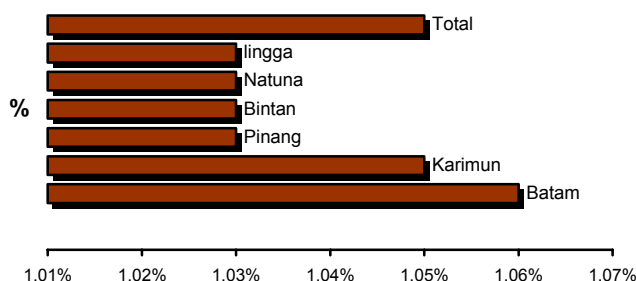
¹ berdasarkan definisi BPS yang dimaksud penduduk adalah *all residents in the entire geographical territory of the RI who have stayed for 6 months or longer and those who intend to stay even though their length of stay were less then 6 months*

perikanan, kehutanan dan perkebunan. Namun demikian sub sektor perikanan merupakan sektor yang paling signifikan dibanding sub sektor lainnya. Sementara sektor pertambangan di daerah Karimun menghasilkan 3 (tiga) bahan tambang/galian utama, yaitu pertambangan timah, granit dan penggalian pasir.

Sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Riau yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004, Kota Tanjung Pinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi dimana pusat pemerintahan untuk 2 (dua) tahun pertama bertempat di Kota Batam. Sejak Februari tahun 2006 pusat pemerintahan berada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini diperkirakan akan mempengaruhi jumlah penduduk di kota yang mendapat sebutan “Kota Gurindam” mengingat pusat pemerintahan berada di daerah tersebut. Disamping itu, penerapan sistem *Special Economic Zone* (SEZ)² yang meliputi wilayah Batam, Bintan dan Karimun akan turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan struktur penduduk di wilayah ini.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi yang tergolong muda ini terus meningkat setiap tahunnya, dimana tingkat pertumbuhan pada tahun 2006 terhadap tahun 2005 mencapai 1,05% dengan pertumbuhan terbesar terdapat di Kota Batam.

GRAFIK 1.5 – LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005-2007



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau yang terus meningkat juga diiringi dengan jumlah angkatan kerja serta tingkat tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan bahwa sampai dengan Agustus 2006 terdapat 587.474 orang angkatan kerja dimana sebanyak 515.560 orang yang bekerja dan sisanya (71.914 orang) merupakan pengangguran.

Adapun definisi angkatan kerja berdasarkan BPS adalah penduduk yang berusia diatas 15 tahun. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah angkatan kerja Provinsi Kepulauan Riau

² Uraian lebih lengkap lihat di Boks – II “Penerapan SEZ di Wilayah BBK”

meningkat sebesar 2,18% dimana jumlah angkatan kerja yang bekerja meningkat 0,41% dan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja meningkat 16,98%.

TABEL 1.2 – PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Keterangan	Feb 2006	Agust 2006	%
Angkatan Kerja	574.935	587.474	2,18
- Bekerja	513.457	515.560	0,41
- Pengangguran	61.478	71.914	16,98
Bukan Angkatan Kerja	333.467	327.549	-1,77
- Sekolah	76.213	61.375	-19,47
- Mengurus Rmh Tangga	216.216	220.851	2,14
- Lainnya	41.038	45.323	10,44
Total Penduduk 15+	908.402	915.023	0,73
Tingkat Pengangguran Terbuka	10,69%	12,24%	1,55
TPAK	63,29%	64,20%	0,91

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan berdasarkan data pada bulan Agustus 2006 adalah sektor industri sebanyak 127.511 orang atau sebesar 24,73%.

TABEL 1.3 – JUMLAH ANGKATAN KERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Lapangan Pekerjaan	Feb 2006	% distribusi	Agust 2006	% distribusi	% perkembangan
Pertanian	101.484	19,76	100.866	19,56	-0,61
Industri	148.635	28,95	127.511	24,73	-14,21
Bangunan	36.507	7,11	31.990	6,20	-12,37
Perdagangan	88.446	17,23	117.821	22,85	33,21
Angkutan	47.734	9,30	45.241	8,77	-5,22
Keuangan	5.898	1,15	12.661	2,46	114,67
Jasa	77.748	15,14	73.965	14,35	-4,87
Lainnya	7.005	1,36	5.530	1,07	-21,06
TOTAL	513.457	100	515.585	100	0,41

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada tabel 1.3 terlihat bahwa terdapat peningkatan penduduk usia angkatan kerja, sebaliknya penduduk yang bukan angkatan kerja terjadi penurunan. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang meningkat 1,55% yaitu dari 10,69% (Feb 2006) menjadi 12,24% (Agust 2006).

Sementara itu, disamping sektor industri, jumlah angkatan kerja terbesar juga terdapat di sektor perdagangan sebanyak 117.821 orang (22,85%), dan sektor pertanian sebanyak 100.866 orang (19,56%). Meskipun demikian, perkembangan jumlah angkatan kerja berdasarkan sektor usaha sebagian besar mengalami penurunan dibandingkan Februari 2006. Adapun pertumbuhan angkatan kerja terbesar terdapat pada sektor perdagangan yaitu sebesar 33,21%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor usaha yang memberikan tingkat distribusi cukup besar terhadap perekonomian daerah serta mampu menyerap tenaga kerja di sektor tersebut. Kota Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Malaysia, serta terdiri dari

kepulauan turut mempengaruhi sektor usaha yang berkembang di wilayah ini. Disamping itu, rencana pengembangan wilayah serta kebijakan pemerintah yang mengarah pada perkembangan industri menyebabkan sisi perdagangan dan jasa menjadi sektor yang memberikan andil cukup besar terhadap perekonomian daerah.

1.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang menunjukkan persentase pencapaian kualitas dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan pada 3 (tiga) faktor yang paling esensial dalam kehidupan manusia, yaitu: kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi kelangsungan hidup dan sehat adalah angka harapan hidup, untuk mengukur dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau, tingkat IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2005 mencapai 72,2 dan menempati urutan ke-7 dari 33 Provinsi di Indonesia. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, Kota Batam menempati urutan IPM ke-8 dari 440 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan nilai 76,5 dan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2005.

TABEL 1.4 – IPM KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2004

Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (tahun)	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita disesuaikan (000Rp)	IPM	Peringkat
Provinsi Kepri	68,8	94,7	8,0	613,0	70,8	8
Karimun	69,2	95,0	7,8	614,1	71,0	102
Bintan	69,0	92,3	7,1	613,9	69,7	152
Natuna	67,0	95,3	6,7	596,3	67,7	235
Lingga	68,9	90,3	7,0	605,0	67,7	236
Kota Batam	70,1	98,4	10,4	634,2	75,8	11
Kota Tj. Pinang	68,8	96,7	9,1	614,7	72,2	77

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau – diambil dari Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006

TABEL 1.5 - IPM KAB/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 UNTUK DAU 2006

Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (tahun)	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita disesuaikan (000Rp)	IPM	Peringkat
Provinsi Kepri	69,5	96,0	8,1	621,9	72,2	7
Karimun	69,5	95,0	7,8	620,8	71,7	101
Bintan	69,3	92,9	7,3	623,0	70,9	137
Natuna	67,5	95,3	6,7	602,0	68,4	239
Lingga	69,2	90,9	7,1	611,6	69,4	193
Kota Batam	70,5	98,8	10,7	638,3	76,5	8
Kota Tj. Pinang	69,1	97,3	9,2	616,5	72,7	79

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau – diambil dari Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006

Nilai IPM tahun 2006 lebih baik dibandingkan tahun 2005 menyebabkan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai nilai IPM dengan peringkat yang baik disebabkan oleh

angka harapan hidup yang masing-masing sebesar 70,5 tahun dan 69,5 tahun. Disamping itu peran angka harapan hidup tersebut juga ditunjang oleh komponen angka melek huruf dimana nilai untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 96,0% dan Kota Batam sebesar 98,8%. Secara parsial per Kab/Kota angka harapan hidup tertinggi terdapat di Kota Batam (70,5 tahun) sedangkan harapan hidup terendah terdapat di Kabupaten Natuna (67,5 tahun). Untuk Kab/Kota lainnya seperti Karimun, Bintan, Lingga dan Tanjung Pinang masing-masing sebesar 69,5 tahun, 69,3 tahun, 69,2 tahun, dan 69,1 tahun. Untuk indikator angka melek huruf, angka tertinggi terdapat di Kota Batam (98,8%) sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Lingga (90,9%).

Sementara itu, indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2006 naik 2 (dua) peringkat menjadi 108 dibandingkan tahun 2005. Sementara laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,3% per tahunnya.³ Hal ini diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi sambutan dalam Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia 2006 bertema *Membangun Manusia Indonesia yang Sehat, Berilmu, Sejahtera, dan Berbudi Pekerti Luhur* di Jakarta pada tanggal 10 November 2006. Berdasarkan laporan bertajuk *Human Development Report 2006 Beyond Scarcity: Power, Poverty, and The Global Water Crisis*, IPM Indonesia pada tahun 2006 naik 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari urutan 110 atau angka indeks 0,697 (skala 1-0) menjadi peringkat ke 108 (0,711) dari 177 negara. Berdasarkan laporan tersebut, sepanjang periode 1990-2004, jumlah penduduk miskin di Indonesia yang hidup dengan pendapatan US\$1 per harinya mencapai 7,5%. Sementara yang berpendapatan US\$2 per harinya mencapai 52,4%, dan berdasarkan kriteria garis kemiskinan nasional (2.100 kalori per hari per orang) sebesar 27,1%.

Sebagai perbandingan, Thailand, pada periode yang sama mencatat jumlah orang miskin yang hidup dengan US\$1 per hari sebesar 2%, hidup di bawah US\$2 per hari sebesar 25,2%, dan berdasarkan garis kemiskinan nasional 13,1%.

TABEL 1.6 – PERINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2006

Negara	2003		2004		2005		2006	
	Peringkat **	IPM *	Peringkat ***	IPM *	Peringkat ***	IPM *	Peringkat	IPM
Singapura	28	0,884	25	0,902	25	0,907	25	0,916
Brunei	31	0,872	33	0,867	33	0,866	34	0,871
Thailand	74	0,768	76	0,768	73	0,778	74	0,784
Filipina	85	0,751	83	0,753	84	0,758	84	0,763
Vietnam	109	0,688	112	0,691	108	0,704	109	0,709
Indonesia	112	0,682	111	0,692	110	0,697	108	0,711
Myanmar	131	0,549	132	0,551	129	0,578	130	0,581
Kamboja	130	0,556	130	0,568	130	0,571	129	0,583

Ket: *Skala 0-1, **dari 175 negara yang diperingkat, ***dari 177 negara yang diperingkat
Sumber: HDR 2006

³ Sebagaimana dikutip dari harian Bisnis Indonesia tanggal 11 November 2006

BOKS - II

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) PELAYANAN JASA PERBANKAN ANTARA OTORITA BATAM DENGAN PT. BNI Tbk

Salah satu upaya pengembangan pelayanan pelabuhan di Batam adalah dengan penerapan sistem *online* berbasis *electronic data capture* (EDC) untuk pelaksanaan sistem pembayaran jasa pelabuhan (Simopel). Untuk itu, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bekerjasama dengan Otorita Batam (OB) dengan pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) pelayanan jasa perbankan antara OB dengan PT. BNI Tbk yang berlangsung di Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) Batam Centre pada hari Selasa/30 Januari 2007.

Simopel merupakan kerjasama BNI yang pertama dalam menangani pembayaran jasa pelabuhan untuk seluruh Indonesia dan Simopel Batam akan dijadikan *pilot project* untuk mengembangkan sistem ini. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, maka seluruh aktivitas keuangan OB dapat dilaksanakan dengan menggunakan jasa layanan BNI, diantaranya: *cash management, transaction services, on line system* dan layanan perbankan lainnya yang didalamnya juga termasuk layanan Simopel.

Bentuk kerjasama sistem pembayaran jasa pelabuhan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pelayanan jasa perbankan antara Gatot M. Suwondo – Wakil Direktur Utama BNI dengan Mustofa Widjaja – Ketua Otorita Batam dan disaksikan oleh Manan Sasmita – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam serta A. Baiquni – Direktur Korporasi BNI.

Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan jasa pelabuhan dimana melalui pembayaran *on line* tersebut sangat cocok untuk meningkatkan pelayanan nasional *single windows* (NSW). Disamping itu juga dapat mengurangi biaya, waktu dan interaksi pegawai publik serta pelayanan *one stop service* (pelayanan satu atap) di gedung SPC.

1.4 TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pengentasan tingkat kemiskinan merupakan salah satu tujuan dasar dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2006 sebanyak 73.679 orang yang merupakan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

TABEL 1.7 – PREDIKSI ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU – MEI 2006

No.	Kab/Kota	Rumah Tangga Penerima BLT					Koreksi RT-BLT Miskin	Prediksi Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan 2004
		Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin	RT-BLT Miskin	Jml			
1.	Kab. Karimun	312	5.194	2.211	7.405	7.717	3.969	13.232	11.526
2.	Kab. Bintan	6.335	2.569	1.307	3.876	10.211	4.697	14.706	13.304
3.	Kab. Natuna	1.334	5.492	1.994	7.486	8.820	2.375	6.565	4.510
4.	Kab. Lingga	3.670	1.640	1.837	3.477	7.147	4.288	12.659	11.252
5.	Kota Batam	19.051	8.025	6.332	14.357	33.408	10.587	32.160	28.064
6.	Kota Tj. Pinang	1.242	4.582	552	5.134	6.376	5.203	18.746	17.039
TOTAL		31.944	27.502	14.233	41.735	73.679	31.119	98.068	85.695

Sumber : Badan Pusat Statistik

1.5 PERKEMBANGAN TENAGA KERJA

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, sampai dengan bulan September 2006 jumlah tenaga kerja sektor formal sebanyak 236.793 orang dan meningkat sebesar 0,03% (72 orang) dibandingkan Desember 2005.

Dari 236.793 orang pekerja tersebut sebagian besar (76,53%) atau sebanyak 181.210 orang bekerja pada sektor industri, sedangkan sektor lain yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel & restoran dengan jumlah pekerja masing-masing sebanyak 19.820 orang (8,37%) dan 17.659 orang (7,46%). Sementara itu, menurut jenis kelamin, sebesar 56,90% pekerja di Kota Batam adalah perempuan sedangkan pekerja laki-laki sebesar 43,10%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, terjadi kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1,55% selama periode Februari – Agustus 2006. Angka pengangguran pada bulan Februari 2006 sebesar 61.478 orang, dan pada bulan Agustus 2006 meningkat menjadi 71.914 orang atau naik 10.436 orang (1,55%). Angka tersebut diperoleh dari hasil survei angkatan kerja nasional di 6 (enam) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006.

Meskipun terjadi peningkatan angka pengangguran, namun angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan 0,41%, dimana angka angkatan kerja yang bekerja pada bulan Februari 2006 mencapai 513.457 orang, dan Agustus 2006 sebanyak 515.569 orang, naik 2.112 orang (0,41%). Dari jumlah tersebut, tenaga kerja terbesar di dominasi pada sektor industri yaitu sebanyak 148.635 orang (bulan Februari 2006) dan menurun menjadi 127.511 orang (bulan Agustus 2006). Selanjutnya sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang menyerap jumlah tenaga kerja cukup besar yang mencapai 101.484 orang (bulan Februari 2006) dan 100.866 orang (bulan Agustus 2006).

1.6 PERKEMBANGAN PARIWISATA

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam pada tahun 2006 berjumlah 1.011.852 orang, menurun 3,03% dibandingkan tahun 2005.

TABEL 1.8 – PERKEMBANGAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA KE KOTA BATAM TAHUN 2004 - 2006

Periode	2004	2005	2006
1. Januari	126.168	124.169	82.584
2. Februari	123.263	83.677	69.254
3. Maret	134.119	83.811	83.725
4. April	90.409	79.967	86.676
5. Mei	122.141	90.924	86.834
6. Juni	142.557	90.828	93.857
7. Juli	134.233	87.022	86.219
8. Agustus	142.490	77.993	83.772
9. September	129.622	76.547	79.716
10. Oktober	126.868	69.793	70.914
11. November	106.377	68.539	84.949
12. Desember	148.844	90.148	103.352
Jumlah	1.527.131	1.043.418	1.011.852

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang tercatat pada Kantor Imigrasi Batam terlihat terus mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2004, rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Batam setiap bulannya adalah 127.260 orang, tahun 2005 rata-rata sebanyak 86.952 orang/bulan, dan tahun 2006 rata-rata sebanyak 84.321 orang/bulan. Penurunan kunjungan wisman diperkirakan sebagai pengaruh dari kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan sektor pariwisata di daerah, disamping itu secara tidak langsung disebabkan penerapan PP No.63 tahun 2003 tentang peningkatan harga kebutuhan hidup termasuk elektronika, termasuk pelarangan impor beras dan penetapan distributor tunggal untuk gula pasir telah berdampak pada peningkatan biaya tarif dan jasa bagi para wisman.

Untuk itu diperlukan upaya oleh pihak-pihak terkait untuk memanfaatkan potensi yang ada, serta menciptakan *event-event* yang dapat menjadi daya tarik bagi wisman untuk berkunjung ke Batam.

Penurunan kunjungan wisman ini diperkirakan bersifat kondisional mengingat peningkatan kunjungan wisatawan berkaitan dengan masa liburan yang terjadi pada bulan Juni dan Desember. Namun pada tahun 2006, meskipun terjadi peningkatan kunjungan, namun jumlahnya masih jauh lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2004 dan 2005. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya upaya oleh pihak-pihak terkait untuk menciptakan *event-event* yang diperkirakan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Batam. Antara lain dengan menyusun program-program kegiatan yang akan mendukung sektor pariwisata, misalnya: pertandingan *Sea Eagle Boat*, Festival Laut Melayu, pertandingan *Dragon Boat Race* (DBR) yang berlangsung tanggal 23-26 November 2006. Disamping itu, Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Provinsi Kepri, salah satunya adalah pembangunan jalan lintas barat sepanjang 47 km yang menghubungkan Desa Busung Kecamatan Bintan Utara dengan Kecamatan Gunung Kijang. Rencananya di jalur lintas selebar 50m tersebut akan dibangun 5 jembatan.

Sementara itu, selama tw.IV-2006 jumlah wisman mancanegara yang berkunjung ke Batam masih didominasi oleh warga negara Singapura dengan kontribusi sebesar 65,02%.

TABEL 1.9 – PERKEMBANGAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA MENURUT KEBANGSAAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA BATAM

Kebangsaan	2005			2006			
	Tw.I	Tw.II	Sem.I	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
1. Singapura	218.876	185.053	403.929	150.052	182.453	163.157	168.552
2. Malaysia	33.721	31.402	65.123	30.419	32.168	33.321	35.024
3. Korsel	11.429	17.060	28.489	22.476	18.440	17.515	19.612
4. Jepang	5.688	6.564	12.252	6.500	6.177	6.235	5.728
5. Inggris	2.630	2.358	4.988	2.490	2.449	2.425	2.478
6. Amerika	1.891	2.031	3.922	1.937	1.800	1.976	1.972
7. Taiwan	1.400	1.792	3.192	1.263	1.561	3.370	1.484
8. Australia	1.752	1.701	3.453	1.604	1.688	1.543	1.599
9. Jerman	1.027	570	1.597	634	627	616	621
10. Belanda	374	381	755	423	406	591	614
11. Lainnya	12.869	12.807	25.676	17.765	19.598	18.958	21.531
Jumlah	291.657	261.719	553.376	235.563	267.367	249.707	259.215

Sumber : Badan Pusat Statistik

Satu hal yang menarik adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Visa Internasional untuk wilayah Indonesia, dimana Batam menduduki peringkat ke-3 dari total belanja yang dikeluarkan wisman yang datang ke Indonesia, dan mencapai USD.12 juta (2,2%). Sedangkan untuk peringkat pertama belanja terbesar wisman adalah Bali dengan total belanja mencapai USD 261 juta (47%), disusul Jakarta dengan pengeluaran USD.186 juta (33%). Meskipun jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia tahun 2005 turun 6% dibanding 2004 yang tercatat sebesar 5,3 juta orang, namun jumlah transaksi pembelanjaan yang dilakukan wisman justru mengalami peningkatan sebesar 20% dibanding tahun sebelumnya. Data tersebut berdasarkan pembelanjaan wisman yang datang ke Indonesia, dimana nantinya akan bermanfaat bagi pelaku pariwisata di Indonesia sehingga diketahui tren pembelanjaan wisman dengan adanya isu-isu nasional. Transaksi terbanyak dilakukan di hotel yang tercatat 852.000 transaksi dengan nilai mencapai USD.198 juta (26%), kemudian pembelanjaan di restoran sebesar USD.36 juta (6%), pembelanjaan Departemen Store yang mencapai USD.90 juta (16%).

Sementara itu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Karimun mengajak para pengusaha hotel untuk meningkatkan sektor pariwisata, antara lain dengan menyusun kalender kegiatan atau program setiap bulannya sehingga mendukung program wisata di Karimun.

BOKS - III

KESIAPAN BATAM MENJADI KOTA M.I.C.E (Meeting, Incentive, Convention, & Exhibition) *

Banyak pihak yang beranggapan bahwa gemerlap sektor pariwisata Batam mulai memudar, dimana terjadi penurunan kunjungan wisatawan yang berdampak pada sepiunya tingkat hunian hotel dan restoran, serta tempat hiburan yang mulai tutup. Perbandingan ini disampaikan oleh Direktur Konvensi, Insentif dan Pameran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata - Surya Dharma saat berdialog dengan pelaku bisnis pariwisata Batam yang digagas Indonesia Congress & Convention Association (INCCA) Batam, pada hari Jum'at/2 Februari 2007.

Berdasarkan pertemuan tersebut disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sektor pariwisata di Batam, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata Batam yang kurang memadai, dimana Batam belum memiliki *Master of Ceremony* (MC) berkelas internasional. Disamping itu, pelayanan dan keramahan juga masih kurang. Di sisi lain, Batam juga dikenal sebagai surga belanja barang elektronik. Bawang putih dulu sempat menjadi oleh-oleh dalam daftar belanjaan wisatawan domestik. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Singapura yang hanya sepertiga dari sekarang, barang-barang impor bisa didapat dengan mudah. Bisnis perhotelan tumbuh dengan cepat. Resort dan padang golf berkembang, supir taksi, ojek dan pedagang kaki lima juga dapat bertahan hidup. Demikian pula ketika krisis moneter terjadi, Batam tidak terkena dampak yang besar. Warga Singapura masih banyak yang datang berbelanja di Batam karena rupiah melemah terhadap dolar Singapura, justru bisnis penukaran uang meningkat hampir 2 kali lipat, dari 42 *money changer* menjadi 86.

Saat ini, Batam ditetapkan sebagai salah satu kota MICE utama di Indonesia, selain Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan Bandung. Untuk mempersiapkan diri sebagai kota MICE tersebut, salah satu hal yang dilakukan Batam adalah mendirikan *Indonesia Congress and Convention*

Association (INCCA) atau Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (AKKINDO) dimana ditunjuk Jadi Rajagukguk sebagai ketua. Adapun anggota yang tergabung dalam INCCA antara lain mencakup perusahaan jasa konvensi, *venue* pameran, perhotelan dan resort, biro perjalanan wisata, transportasi, kehumasan, media massa hingga penterjemah dan asuransi.

Penunjukan Batam sebagai kota MICE akan memberikan pengaruh bagi perkembangan perekonomian. Disamping itu, industri MICE bertujuan untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai tujuan pariwisata yang aman, kerja sama antar daerah dan negara, memacu investasi, serta membuka lapangan kerja dan peningkatan PAD. Menurut ketua INCCA Indonesia – Iqbal Alan Abdullah disebutkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia selama ini hanya berada pada kisaran 5 juta wisatawan. Padahal berbagai negarai di dunia seperti China, Hawaii, Singapura, dan Thailand bahkan Vietnam dan Afrika Selatan menjadikan MICE sebagai lokomotif industri pariwisatanya.

Adapun keunggulan industri MICE antara lain adalah mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar, lama tinggal (*length of stay*) lebih lama, dampak promosi yang luar, jumlah uang yang dibelanjakan, peningkatan infrastruktur, serta memberikan kebanggaan dan memperkuat diplomasi bangsa.

Trend perkembangan wisata MICE di Asia Pasifik, negara Malaysia, Singapura dan Thailand merupakan destinasi potensial dalam wisata insentif. Sedangkan China, Australia, India dan Hongkong menjadi destinasi paling favorit. Selain keamanan, infrastruktur, kualitas pelayanan internasional, kekayaan budaya dan sejarah, China juga menyediakan atraksi untuk wisatawan. Di lokasi pameran internasional, China telah mencantumkan agenda pameran untuk setahun ke depan.

Terkait uraian diatas, perkembangan industri MICE di Indonesia merupakan satu instrumen peningkatan sektor pariwisata yang penting karena akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian. Hendaknya Pemerintah menyusun program-program pariwisata secara rutin setiap tahun serta meningkatkan sarana infrastruktur yang ada.

* Sumber : Batam Pos – Selasa 6 Februari 2007

1.7 PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Batam dari sisi jumlah perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 59 perusahaan pada periode Januari-Desember 2005 menjadi 95 perusahaan pada periode yang sama tahun 2006. Sementara itu, nilai investasi yang direncanakan (termasuk perluasan usaha) mengalami peningkatan, dari US\$ 242,39 juta menjadi US\$ 376,79 juta atau naik sebesar 55,45%.

Negara asal investasi pada periode Januari-Desember 2006 adalah Singapura, Korea Selatan, RRC, Jepang, Malaysia, Australia, Belanda dan Inggris dengan bidang usahanya berupa industri perkapalan, industri rokok, industri kemasan, perdagangan ekspor impor, industri pakaian jadi, jasa akomodasi dan jasa lainnya.

TABEL 1.10 – PERKEMBANGAN RENCANA INVESTASI ASING DI KOTA BATAM

Periode	2005		2006	
	Jml Perusahaan Baru	Nilai *) (US\$)	Jml Perusahaan Baru	Nilai *) (US\$)
Semester I	29	82.996.927	44	168.138.111
Semester II	30	159.396.684	51	208.658.662
Total	59	242.393.611	95	376.796.773

Sumber : Subdit BKPM Otorita Batam

Keterangan : *) termasuk perluasan usaha

Berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM – Darmawan Djajusman disebutkan bahwa target realisasi investasi pada tahun 2006 untuk PMDN sebesar Rp.35,32 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp.13,54 triliun atau 38,34%. Sedangkan target investasi PMA Rp.97,50 triliun dan terealisasi Rp.43,46 triliun atau 44,57%. Sementara itu, untuk tahun 2007 diperkirakan jumlah investasi tumbuh sebesar 12,5% dengan alasan semakin membaiknya iklim investasi di Indonesia diantaranya berupa pemberian insentif fiskal.

Saat ini Thailand memberikan *tax holiday* 3-8 tahun dengan pembebasan bea masuk impor barang modal dan bahan baku. Vietnam memberikan *tax holiday* 2-4 tahun dengan pemotongan pajak 10%-20%. Singapura memberikan *tax holiday* 5-10 tahun dengan pemotongan pajak 10%-20%. Sedangkan China memberikan pemotongan pajak 33% dengan pembebasan bea masuk maksimal 5%. Sementara itu, Indonesia memberikan keringanan bea masuk maksimal 5% dengan *investment allowance* sebesar 30% selama 6 tahun yang diatur dalam PP 148/2000 yang hingga saat ini belum dapat dioperasionalkan.

1.8 PERKEMBANGAN PEDAGANG VALUTA ASING (PVA)

Pedagang Valuta Asing (PVA) atau dikenal dengan *money changer* memiliki peranan yang cukup besar dalam sektor keuangan di Indonesia. Oleh karena itu Bank Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan ini, antara lain dengan mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur keberadaan PVA antara lain : Peraturan Bank Indonesia / PBI No.6/1/PBI/2004 tanggal 4 Januari 2004 tentang PVA, serta Surat Edaran / SE No.6/13/DPM tanggal 11 Maret 2004 tentang tata cara perizinan, penerapan prinsip mengenal nasabah, pengawasan, pelaporan dan pengenaan sanksi bagi PVA bukan bank.⁴

Pada umumnya, terdapat beberapa hal yang mendukung peranan PVA di Indonesia, antara lain :

- i. sebagai upaya untuk memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, PVA merupakan lembaga penunjang sektor keuangan yang memiliki peranan yang cukup strategis khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing domestik.
- ii. Dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan devisa nasional melalui pengembangan pariwisata maka pelayanan dan kemampuan PVA perlu ditingkatkan.
- iii. Upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan, PVA perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian termasuk *Know Your Customer* (KYC).
- iv. Turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang, PVA mempunyai peranan yang cukup strategis dalam membantu instansi yang berwenang.

Sampai dengan tw.I-2007, jumlah PVA yang melakukan kegiatan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam berjumlah 99 PVA dimana terdapat peningkatan sebanyak 3 PVA

⁴ Peraturan Bank Indonesia dapat dilihat melalui <http://www.bi.go.id>

dibandingkan tw.IV-2006 yang tercatat sebanyak 96 PVA yang melakukan kegiatan usaha di wilker KBI Batam. Rincian jumlah PVA pada masing-masing Dati-II di Provinsi Kepulauan Riau adalah: 69 PVA di Kota Batam, 13 PVA di Kota Tanjung Pinang, 10 PVA di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, 3 PVA di Tanjung Uban, dan 4 PVA di Bintan.

TABEL 1.11 – PERKEMBANGAN JUMLAH PVA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2006

No	Kab/Kota	2006			2007
		Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
1.	Batam	59	66	67	69
2.	Tanjung Pinang	13	13	13	13
3.	Tanjung Balai Karimun	9	9	9	10
4.	Tanjung Batu	3	3	3	3
5.	Bintan	3	3	4	4
TOTAL		87	94	96	99

Sumber: Bank Indonesia

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata jumlah PVA yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja KBI Batam terus meningkat setiap triwulan. Adapun peningkatan yang besar terjadi pada Tw.III-2006 yaitu sebanyak 7 PVA baru yang beroperasi di Batam. Hal tersebut disebabkan oleh pembukaan PVA baru akibat dari pendirian *mall* baru di Batam.

Berdasarkan data yang ada, jumlah PVA yang melakukan usaha di wilker KBI Batam menempati urutan ke-3 (tiga) di Indonesia setelah Jakarta dan Denpasar. Banyaknya PVA bukan bank tersebut diperkirakan karena tingginya permintaan akan transaksi Uang Kertas Asing (UKA) terkait dengan letak geografis yang dekat dengan negara-negara tetangga.

Sementara itu, rekapitulasi volume usaha PVA selama tw.IV-2006, secara rata-rata terdapat penurunan transaksi pembelian maupun penjualan mata uang valuta asing.

TABEL 1.12 – REKAPITULASI VOLUME USAHA PEDAGANG VALUTA ASING DI WILKER KBI BATAM

Pembelian/ Penjualan	Tw.III-06		Tw.IV-06		Tw.I-07	
	Pembelian	Pembelian	Pembelian	Penjualan	Pembelian	Penjualan
USD	2.159.426,00	2.212.455,94	2.117.920,00	1.650.981,60	3.646.472,10	3.571.450,03
SGD	58.708.416,30	57.746.290,64	63.152.384,99	57.618.069,81	85.991.644,85	85.624.432,10
MYR	14.597.303,46	16.195.794,18	13.305.204,89	13.890.160,23	29.573.302,09	30.933.173,10

Sumber: Bank Indonesia

1.9 PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. PDRB per-kepita dan pendapatan per-kepita mencerminkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh proses produksi suatu daerah setelah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu, besar dan kecilnya jumlah

penduduk di suatu daerah berpengaruh terhadap nilai PDRB per-kapita maupun pendapatan per-kapita.

TABEL 1.13 – PENDAPATAN PER-KAPITA PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE TRIWULAN I-2007

Rincian	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
1. PDRB Provinsi tw.I-2007	Rp. 12.398.331.600.000	Rp. 8.407.073.160.000
2. Jumlah Penduduk tw.I-2007	1.394.177 jiwa	
3. Pendapatan Per-Kapita	Rp. 8.892.939,42	Rp. 6.030.133,30

Sumber : Badan Pusat Statistik, data Diolah

Berdasarkan tabel 1.8, terlihat bahwa pendapatan per-kapita penduduk tw.I-2007 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 8.892.939,42 sedangkan jika dilihat secara riil (atas dasar harga konstan 2000) pendapatan per-kapita Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.6.030.133,30.

Tingkat Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam tahun 2006 ditetapkan sebesar Rp.815.000,00 dan UMK untuk tahun 2007 sebesar Rp.815.000,00. Adapun Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp.805.600,00.

1.10 SEKTOR EKONOMI DOMINAN

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tw.I-2007 secara triwulanan (qtq) diperkirakan sebesar 1,99% meningkat dibandingkan pertumbuhan pada tw.IV-2006 yang tercatat sebesar 0,42%. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar berdasarkan lapangan usaha adalah komponen jasa (2,83%) diikuti komponen keuangan (2,25%) dan komponen perdagangan (2,22%).

Keberadaan ekonomi suatu Kabupaten/Kota salah satunya dapat dilihat dari peranannya terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan dalam suatu provinsi. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kota Batam merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan yang terlihat dari nilai kontribusinya yang mencapai 77% baik berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Sementara itu penyumbang nomor kedua adalah Kota Tanjung Pinang dengan nilai kontribusinya diatas 6%.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2002 terjadi pergeseran pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang semula pada Kabupaten Bintan menjadi Kabupaten Karimun, dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir kontribusi Kabupaten Bintan terus mengalami penurunan dari 5,90% (tahun 2000) menjadi 5,18% (tahun 2004). sedangkan kontribusi Kabupaten Karimun naik dari 5,57% (tahun 2000) menjadi 6,12% (tahun 2004).

TABEL 1.14 – KONTRIBUSI PDRB KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBENTUKAN PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2000 – 2004 (%)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
A. Atas dasar harga berlaku					
1. Karimun	5,57	5,66	5,91	5,78	6,12
2. Kepulauan Riau / Bintan	5,90	5,87	5,65	5,35	5,18
3. Natuna	2,12	2,25	2,40	2,63	2,86
4. Lingga	1,59	1,62	1,59	1,58	1,56
5. Batam	78,50	78,25	77,99	78,48	77,65
6. Tanjung Pinang	6,32	6,36	6,48	6,17	6,64
Provinsi Kepulauan Riau	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B. Atas dasar harga konstan 2000					
1. Karimun	5,57	5,63	5,54	5,49	5,37
2. Kepulauan Riau / Bintan	5,90	5,84	5,69	5,54	5,36
3. Natuna	2,12	2,14	2,11	2,10	2,06
4. Lingga	1,59	1,60	1,59	1,58	1,54
5. Batam	78,50	78,44	78,67	78,90	79,35
6. Tanjung Pinang	6,32	6,34	6,41	6,39	6,31
Provinsi Kepulauan Riau	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari nilai kontribusi Kabupaten/Kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi menurut lapangan pekerjaan, terlihat bahwa pada tahun 2004 Kota Batam merupakan penyumbang terbesar di hampir semua sektor lapangan usaha kecuali sektor pertanian dan pertambangan. Sumbangan Kota Batam pada sektor-sektor tersebut berkisar antara 43,81% sampai 91,71%. Pada sektor pertanian dan pertambangan peranan Kota Batam masih cukup signifikan karena nilai sumbangannya masih mencapai diatas 18%. Untuk sektor pertanian Kabupaten Natuna dan Karimun adalah penyumbang terbesar terhadap nilai PDRB Provinsi di sektor ini dimana sekitar 60% nya merupakan sumbangan dari kedua Kabupaten tersebut. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian, Kabupaten Kepri / Bintan dan Karimun menyumbang hampir 80% dari PDRB Provinsi.

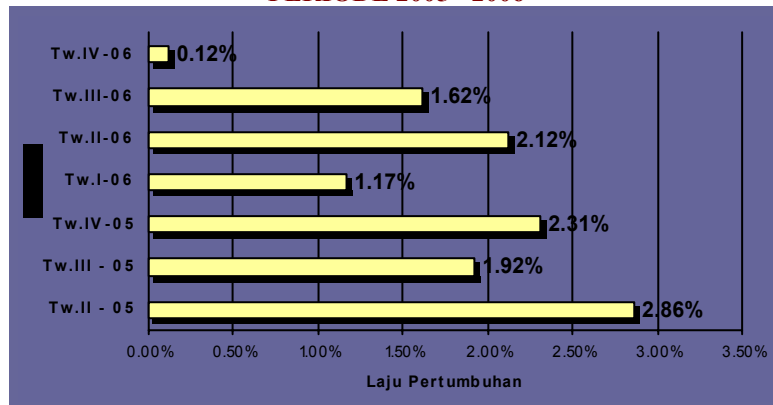
1.10.1 PDRB Sisi Penawaran / Produksi

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selama tw.I-2007 masih didominasi oleh sektor industri dengan kontribusi sebesar 60,47% diikuti oleh sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 10,45%, sedangkan sektor-sektor lain yang cukup berperan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor perdagangan hotel & restoran, sektor keuangan, dan sektor pertanian. Sektor industri berkembang di Kota Batam dan Kabupaten Bintan, sedangkan sektor pertambangan & penggalian bertumpu pada pertambangan migas di Kabupaten Natuna. Sementara itu sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, serta sektor pertanian menjadi sektor andalan Kabupaten Lingga.

1.10.1.1 Komponen Industri Pengolahan ⁵

Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau meliputi 6 Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Berdasarkan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau, komponen industri memiliki nilai terbesar atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000⁶, serta memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri merupakan komponen utama pendukung perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau.

GRAFIK 1.6 – PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2005 PERIODE 2005 - 2006



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sektor industri menjadi sektor andalan Kota Batam, serta Kabupaten Bintan (semula bernama Kabupaten Kepulauan Riau) dengan kawasan industri Lobam-nya. Mengingat cukup besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor industri terhadap perekonomian daerah, maka pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem *Special Economic Zone* (SEZ) di wilayah Batam-Bintan-Karimun (BBK). Untuk mendukung kegiatan perekonomian khususnya di Kota Batam, maka pemerintah memberikan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan, antara lain: fasilitas jalan raya dan jembatan, fasilitas pelabuhan laut dan udara, tenaga listrik dan telekomunikasi, persediaan air bersih, berbagai macam fasilitas umum (hotel, bank, perusahaan asuransi, ekspedisi, pusat perbelanjaan, sekolah, kesehatan, tempat peribadatan, fasilitas olahraga). Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan payung hukum yang mengatur penerapan SEZ di wilayah BBK, dan masih dalam pembahasan.

⁵ Berdasarkan klasifikasi dari BPS, kegiatan sektor industri pengolahan mencakup 3 sektor, yaitu: industri pengilangan minyak bumi, industri pengolahan non-migas, dan industri pengilangan gas alam cair

⁶ Perhitungan dan nilai tambah untuk sub sektor industri besar/średang digunakan pendekatan produksi, dan untuk output & nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 digunakan metode deflasi

Sebagaimana diuraikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan beberapa upaya peningkatan sarana infrastruktur di wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2007, diantaranya adalah: pembangunan jalan baru sepanjang 80 km², jembatan sepanjang 748 m² dan lokasinya menyebar di seluruh Kab/Kota. Disamping pembangunan jalan dan jembatan, juga telah dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 279 km² dan pada tahun 2007 akan ditambah sebanyak 332 km². Selain itu, untuk peningkatan jalan dari jalan tanah ke jalan aspal sampai dengan tahun 2006 telah dilakukan sepanjang 21 km² dan pada tahun 2007 akan ditambah sepanjang 20 km². Diharapkan melalui pembangunan jalan dan jembatan tersebut dapat meminimalisasi keterisolasian daerah terpencil dan meningkatkan pelayanan transportasi darat antara beberapa daerah seperti di Lingga dan Natuna.

Adapun rencana pengembangan perekonomian untuk Kab. Karimun pada tahun 2007 terkait dengan sektor industri adalah rencana reklamasi beberapa wilayah yang diperuntukan untuk kawasan industri shipyard, antara lain di Pulau Baran-Pulau Kera, Tg. Buluh Kasap-Tg. Tiram, Tg. Pengaru-Parit Rampak, dan Tg. Sebatok.

1.10.1.2 Komponen Pertambangan

Sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar kedua pada tw.IV-2006 yaitu sebesar 10,32% dimana kontribusi minyak dan gas bumi sebesar 9,03% sementara pertambangan tanpa migas 0,83% dan penggalian 0,46% memberikan kontribusi yang tidak terlalu signifikan. Adapun daerah yang memberikan kontribusi migas pada PDRB Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Natuna. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari Dana Perimbangan yang meningkat. Hal tersebut berkaitan dengan penetapan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah penghasil migas berdasarkan Kepmendagri Nomor 36 Tahun 2005 dan adanya peningkatan PAD akibat perbaikan pelayanan di bidang migas. Selain itu, kenaikan tersebut juga disebabkan oleh adanya perubahan formula perhitungan DAU yang saat ini telah memperhitungkan luas lautan dan panjang garis pantai yang tertuang dalam Deklarasi Bintang pada bulan September 2006. Sebagai gambaran, pada tahun 2005 pendapatan daerah tercatat sebesar Rp.371,72 miliar, sedangkan pada tahun 2006 tercatat sebesar Rp.911,15 miliar (meningkat 145,12%).

Sejalan dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka APBD Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2005 APBD Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai Rp.489 miliar, maka pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp.1,1 triliun dan pada tahun 2007 sebesar Rp.1,56 triliun. Saat ini, Provinsi Kepulauan Riau menduduki posisi ke-10 berdasarkan jumlah APBD Provinsi secara nasional, dimana posisi terbesar adalah DKI Jakarta

dengan jumlah APBD mencapai Rp.21,3 triliun dan yang terkecil adalah Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai Rp.362,9 miliar.

Namun demikian, dilihat dari persentase pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2005-2006 terjadi pertumbuhan meskipun *trend* pertumbuhannya cenderung menurun, hal ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan pertambangan migas mengalami penurunan dimana pada tw.II-2005 sebesar 0,21%, dan pada tw.III-2005 terjadi peningkatan laju pertumbuhan yaitu sebesar 3,04%, namun pada tw.IV-2005 terjadi perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar -1,31%. Kemudian pada tahun 2006 terdapat perbaikan laju pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 0,21% (tw.I-2006); 1,49% (tw.II-2006); 1,27% (tw.III-2006); dan 0,62% (tw.IV-2006).

Di samping Kabupaten Natuna, kontribusi sektor pertambangan juga disumbangkan oleh wilayah Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Terdapat 3 (tiga) bahan tambang/galian utama yang dihasilkan di daerah ini antara lain : pertambangan timah, pertambangan granit, dan penggalian pasir. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Karimun (data yang diperoleh s/d tahun 2002), produksi pertambangan granit yang tercatat pada tahun 2002 adalah sebanyak 5.103.690.000 m³ dengan jumlah iuran sebanyak Rp.15.774.603.731,- Untuk produksi timah, pada tahun 2002 tercatat sebanyak 6.237.300 ton. Sementara itu, penggalian pasir darat tercatat sebanyak 1.359.450.000 ton, sedangkan penggalian pasir laut belum ada data yang tersedia.

BOKS - IV

LARANGAN EKSPOR PASIR, TANAH DAN TOP SOIL

Terkait dengan perkembangan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan penambangan pasir, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) yang tidak terkendali sebagai akibat masih terjadinya ekspor pasir laut secara ilegal, maraknya ekspor jenis pasir lainnya, ekspor tanah dan ekspor top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) maka dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus) tanggal 22 Januari 2007.

Hal tersebut menimbulkan reaksi sejumlah pengusaha pertambangan pasir serta negara pengimpor pasir (termasuk Singapura) yang selama ini membeli pasir dalam jumlah yang besar dari Indonesia. Berpatok pada sejarah, sejak merdeka tahun 1965 luas lahan Singapura adalah 581,5 km². Kemudian pada tahun 1990 berkembang menjadi 633 km² dan ambisi Singapura pada tahun 2030 luas wilayahnya bertambah menjadi 774 km² (31%). Dalam jangka waktu 65 tahun dapat dihitung bahwa luas tanah Singapura bertambah sekitar 192,5 km² atau lebih rinci bertambah >2 km² per-tahun.

Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2003 pemerintah menghentikan kegiatan ekspor pasir laut ke Singapura yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut tanggal 28 Februari 2003. Namun dalam rentang waktu 4 tahun setelah keluarnya SK Mmenperindag tersebut tidak menyurutkan penjualan pasir laut. Berdasarkan hal tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor:02/M-DAG/PER/1/2007 yang tersebut diatas. Kebijakan tersebut juga didasari atas kerusakan lingkungan yang terjadi pada pulau-pulau di sekitar Provinsi Kepulauan Riau.

1.10.1.3 Komponen Perdagangan

Sebagai daerah yang menjadi salah satu kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore – *Growth Triangle*), Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai macam keunggulan, diantaranya adalah: letaknya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja yang berada dijalur pelayaran internasional serta memiliki potensi sumber daya alam. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya tersebut, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Oleh karena itu, sektor perdagangan menjadi salah satu sektor unggulan disamping sektor-sektor ekonomi lainnya. Daerah yang menjadikan sektor perdagangan menjadi kegiatan ekonomi unggulan diantaranya Kabupaten Tanjung Balai Karimun dan Kota Tanjung Pinang. Adapun sektor perdagangan terbagi dalam 3 sub-sektor, yaitu: sub-sektor perdagangan, sub-sektor hotel, dan sub-sektor restoran.

Dengan ditetapkannya Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, maka saat ini terdapat 3 (tiga) pemerintahan di Kota ini, yaitu: sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan. Kota ini memiliki beragam kultur budaya suku dari hampir seluruh Indonesia yang masuk ke kota ini dengan bahasa melayu sebagai bahasa daerah. Hal ini menjadi salah satu potensi untuk sektor ekonomi terutama sektor perdagangan yang sebelumnya telah menjadi sektor andalan di daerah ini. Disamping itu, sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan dan ini turut mempengaruhi sub-sektor perdagangan diantaranya sub-sektor hotel dan sub-sektor restoran.

Letak geografis yang strategis pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan menjadi salah satu potensi yang dimiliki Tanjung Pinang untuk turut berperan terhadap pertumbuhan perdagangan. Kegiatan perdagangan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Tanjung Pinang karena terbatasnya tanaman yang dapat tumbuh di daerah yang memiliki tekstur tanah pasir berlempung, seperti tanaman hortikultura, palawija, dan perkebunan. Pada tahun 2001, luas lahan tanam adalah 448 ha, namun pada tahun berikutnya turun 71 ha karena alih fungsi menjadi daerah permukiman. Untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan makanan maka sebagian besar kebutuhan pangan tersebut diperoleh dari perdagangan antarpulau. Sayur-sayuran dipasok dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau Pekanbaru. Kebutuhan beras diperoleh dari Padang selain Thailand dan Myanmar, dan barang kelontong dan bahan bangunan disuplai dari Jakarta.

1.10.1.4 Komponen Keuangan

Komponen keuangan memberikan distribusi sebesar 5,39% terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Riau triwulan IV-2006. Sub-sektor Bank⁷ memberikan sumbangan sebesar 3,66% dan sub-sektor sewa bangunan sebesar 1,51%. Perkembangan sub-sektor perbankan di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik dimana data-data indikator perbankan terus meningkat, antara lain pada: jumlah bank yang beroperasi (bank umum dan BPR), total asset, total Dana Pihak Ketiga (DPK), serta jumlah kredit yang disalurkan.

1.10.1.5 Komponen Pertanian

Sebagai daerah yang 96%-nya merupakan perairan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar pada sektor perikanan. Hal ini ditunjukkan dari besarnya kontribusi sub-sektor perikanan pada pembentukan PDRB daerah yaitu sebesar 3,45% pada triwulan I-2007. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala pengembangan potensi tersebut seperti masih maraknya praktek *illegal fishing* dan *illegal logging* serta rusaknya terumbu karang yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem sehingga menurunkan kualitas alam itu sendiri.⁸

Gubernur Provinsi Kepri – H. Ismeth Abdullah memiliki komitmen untuk memajukan taraf hidup dan perekonomian kalangan masyarakat pesisir dan nelayan di Provinsi Kepri. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri mengalokasikan dananya untuk penguatan modal kalangan nelayan, tambak, dan budi daya ikan. Adapun kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2007 antara lain:

- Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan budidaya,
- Penguatan modal nelayan dan pembudidaya ikan melalui bantuan dana bergulir,
- Pembangunan pabrik es,
- Revitalisasi pelabuhan perikanan,
- Revitalisasi TPI
- DED pelabuhan perikanan.

Salah satu daerah Dati-II di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi di bidang perikanan dan kelautan adalah Kabupaten Karimun, dimana disamping memiliki lahan yang subur, sebesar 87% atau seluas 6.460 km² wilayah tersebut dikelilingi oleh laut sehingga sangat potensial untuk pengembangan industri yang berbasis perikanan, antara lain: budidaya rumput laut, tambak udang, pengolahan tepung ikan, dan kerambah ikan. Sebagian hasil laut yang dihasilkan tersebut sangat mendukung untuk pengembangan peternakan guna

⁷ meliputi Bank Indonesia (BI) dan bank umum pemerintah & swasta serta BPR

⁸ Disampaikan pada laporan kegiatan di daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah – RI

kelangsungan pakan ternak itik di daerah tersebut. Berdasarkan PDRB Karimun pada tahun 2003, sumbangan sub-sektor perikanan terhadap perekonomian daerah mencapai 14,79% atau sebesar Rp.60,04 miliar. Untuk terus meningkatkan sektor perikanan di wilayah Karimun, maka Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki program dan kegiatan pembangunan, yang terdiri dari:

- a. penguatan modal untuk petani ikan/nelayan melalui pinjaman lunak swamitramina, dengan total anggaran Rp.3 miliar.
- b. Pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan, dengan total anggaran Rp.1 miliar.
- c. Pencetakan lahan tambak udang dan operasional 5 Ha, dengan total anggaran Rp.4 miliar.
- d. Bantuan pengadaan jaring udang dan jaring tenggiri bagi masyarakat pesisir, dengan total anggaran Rp.1 miliar.
- e. Dukungan peralatan untuk balai benih udang, dengan total anggaran Rp.500 juta.

Sementara itu, Kabupaten Bintan juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan peternakan. Untuk itu, pada tahun 2006 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kepri telah mengajukan beberapa program terkait sektor tersebut diatas. Antara lain adalah program penggemukan 1.000 ekor sapi unggulan dengan alokasi dana mencapai Rp.10 miliar, serta pengembangan budidaya sayuran kualitas ekspor. Sebagaimana diuraikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kepri – Drs. Said Ja'afar, disebutkan bahwa wilayah Bintan sangat potensial untuk pengembangan budidaya sayuran kualitas ekspor tersebut. Hal ini didukung oleh lokasi wilayah, serta tingkat kesuburan tanah.

Rencana Pemerintah Kota Batam untuk mengembangkan potensi perikanan di Pulau Batam, Rempang, dan Galang dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan pengembangan pelabuhan perikanan di Pulau Nipah antara PT. Mandra Guna Gema Sejati dengan Pemko Batam di Kantor Menteri Perikanan dan Kelautan – Jakarta, yang mencakup rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan, dan lingkungan untuk kawasan pelabuhan perikanan. Selain itu juga PT. Mandra Guna Gema Sejati akan menyiapkan dan memfasilitasi pembangunan sarana prasarana penunjang pelabuhan perikanan dan fasilitas komersil, fasilitas pembinaan nelayan, pembangunan fasilitas kantor pelayanan fungsi pemerintahan, membangun tempat pelelangan dan pembongkaran ikan sesuai kapasitas kebutuhan. Disamping itu juga membangun fasilitas mutu hasil perikanan, menyusun program pengembangan kawasan bahari di Barelang secara terpadu serta menyampaikan laporan perkembangan pembangunan dan operasional pelabuhan secara periodik kepada Pemko Batam.

1.10.2 PDRB Sisi Permintaan / Penggunaan

PDRB menurut penggunaan diperoleh dengan menghitung seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh berbagai golongan masyarakat, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi

lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan barang modal tetap bruto (PMTB), perubahan stok, dan ekspor neto.

Selama tw.III-2006 pertumbuhan terbesar terdapat pada komponen pembentukan barang modal tetap bruto (PMTB) sebesar 2,08% (qtq), diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 2,03%, dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 1,86%.

PMTB mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah yang digunakan untuk memproduksi di dalam negeri/wilayah.

1.11 Perkembangan Ekspor dan Impor di Wilayah Kerja Batam

Total ekspor non-migas dari wilayah Batam selama periode triwulan I-2007 (Januari s/d Februari 2007) sebesar US\$. 3.825.049.085 dengan volume ekspor berjumlah 1.129.823.484 kg. Komponen yang memiliki nilai ekspor terbesar adalah komponen *capital goods parts and accesories* (US\$.360.112.472), sedangkan komponen yang memiliki volume ekspor terbesar adalah komponen *Industrial Supplies Not Elsewhere Specified* (3.515.115.876 kg).

Sementara itu total impor non-migas ke wilayah Batam selama periode Januari s/d Februari 2007 sebesar US\$.1.158.035.235 dengan volume impor berjumlah 520.966.641 kg. Komponen yang memiliki nilai serta volume impor terbesar tersebut adalah komponen *Industrial Supplies Not Elsewhere Specified (Processed)*. Total impor yang tercatat di wilayah Batam bernilai tidak terlalu besar karena status Batam sebagai wilayah khusus (sebagai wilayah *Free Trade Zone – FTZ*, yang selanjutnya menjadi *Bonded Zone Plus – BZP*, dan saat ini sebagai *Special Economic Zone – SEZ*) menyebabkan proses masuknya barang ke dalam wilayah pabean RI melalui Batam tidak dicatat sebagai impor.

Secara nasional, nilai ekspor bulan Januari 2007 mencapai US\$.6,931 juta dimana nilai ekspor nasional pada bulan sebelumnya tercatat sebesar US\$.9,885 juta. Sedangkan selama bulan Januari 2007 nilai impor Indonesia mencapai US\$.5,321 juta dimana nilai impor Indonesia pada Desember 2006 tercatat sebesar US\$. 7,349 juta.

BOKS - V

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN *NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW)* ANTARA BANK MANDIRI DAN OTORITA BATAM

Kesepakatan antara Otorita Batam dan Bank Mandiri merupakan sebuah bentuk kerjasama yang bertujuan untuk mendukung penerapan sistem pembayaran online. Kesepakatan ini mencakup kerjasama di bidang layanan *cash management* seperti pengelolaan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dan jasa pengolahan lainnya, serta kerjasama di bidang Penerimaan Pembayaran Jasa Kepelabuhan.

Penerapan NSW di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi pelayanan ekspor-impor dan kepabeanan, dimana waktu untuk pengurusan barang yang masih memakan waktu cukup lama (5,5 hari) dibandingkan dengan Singapura yang hanya 1 hari dan Jepang 3,1 hari (berdasarkan penelitian JICA). Disamping itu, biaya ekonomi yang tinggi, penanganan pelayanan yang umumnya masih manual, masih banyak *point of service*, pelaksanaan yang kurang transparan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dan maraknya penyelundupan, *illegal transshipment, under invoice*.

Untuk menunjang program NSW yang diterapkan di Batam, maka Bank Mandiri akan membantu Otorita Batam dalam mengimplementasikan *electronic payment* untuk E-port yang tergabung dalam Sistem Management Operasional Pelabuhan (SIMOPEL).

Dalam rangka meningkatkan kegiatan perdagangan lintas batas, maka negara-negara di ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN Single Window (ASW), dimana Indonesia termasuk pencetus di samping 5 negara lain yaitu: Brunai Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura. Disamping itu, 4 negara lain di ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam sebagai pengikut. Karena itu masing-masing negara diberi batas waktu hingga 2012 untuk menerapkan Single Window yang di tingkat negara disebut *National Single Window*. Sementara negara-negara pencetus deadlinenya hingga tahun 2008.

Untuk itu, Indonesia menetapkan Pelabuhan Batu Ampar di Batam sebagai *pilot project* sistem *Single Window*, yang secara resmi sistem tersebut diberlakukan pada 29 Desember 200 yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Hatta Radjasa. Dalam sistem *Indonesia National System Window* (INSW) maka sistem kerja instansi-instansi yang terkait dalam proses ekspor dan impor seperti Ditjen Perdagangan, Ditjen Pajak, Karantina (Ditjen Imigrasi), dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan terintegrasi di jaringan elektronik yang dikembangkan Bea dan Cukai sebagai *Lead Agency*. Namun integrasi sistem tersebut membutuhkan kesepakatan-kesepakatan antar berbagai instansi terkait. Hal inilah yang masih dicari dalam tahapan pelaksanaan INSW di Batam.

Penerapan sistem jaringan internet di Pelabuhan Batu Ampar mulai diberlakukan sejak 1 Desember 2006 bersamaan dengan penerapan dokumen tunggal untuk proses kargo klirens. Dokumen tunggal yang disebut dengan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) itu menggantikan tiga dokumen yaitu pemberitahuan impor (BC 2.0), pemberitahuan ekspor (BC 3.0), dan dokumen ke kawasan berikat (BC 2.3).

Pemberlakuan sistem *national window* ini diperkirakan dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun bagi pengusaha dan pedagang, antara lain:

Keuntungan Bagi Pemerintah	Keuntungan Bagi Pedagang
<ul style="list-style-type: none"> - sumber daya lebih efektif dan efisien - tepat dan seringkali meningkatkan pemasukan) - meningkatkan kepatuhan pedagang - meningkatkan keamanan - meningkatkan integritas dan transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> - lebih hemat biaya akibat berkurangnya keterlambatan - proses klirens dan pelepasan yang lebih cepat - penjelasan dan penerapan peraturan yang lebih bisa diprediksi - pengerahan sumber daya yang lebih efektif dan efisien - lebih transparan.

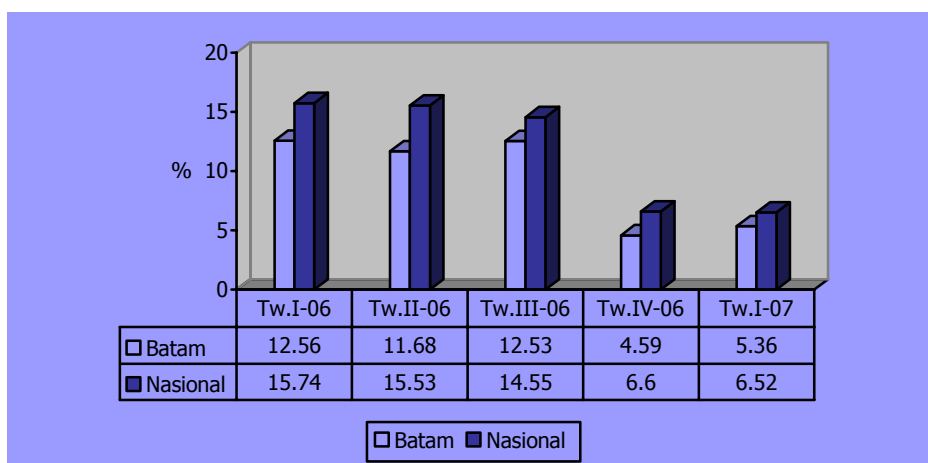
Bab 2 Perkembangan Inflasi¹⁴

2.1 KONDISI UMUM

Laju pergerakan harga barang dan jasa Provinsi Kepulauan Riau yang diukur Kota Batam secara kuartalan pada triwulan I-2007 mengalami inflasi sebesar 1,42% (qtq), dan sedikit menurun dibandingkan triwulan IV-2006 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,97%. Secara bulanan, inflasi terbesar terjadi pada bulan Januari sebesar 2,26%, sedangkan pada bulan Februari dan Maret terjadi deflasi masing-masing sebesar -0,34% dan -0,50%. Laju inflasi Batam secara tahunan pada triwulan I-2007 tercatat sebesar 5,36% (yoy) lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional triwulan I-2007 sebesar 6,52% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Riau relatif lebih stabil, dimana inflasi kumulatif selama tahun 2006 sampai dengan triwulan I-2007 dapat mencapai *single digit* setelah pada tahun 2005 mencapai *double digit*.

Cukup stabilnya laju inflasi tersebut tercermin pada rendahnya inflasi bulanan selama triwulan I-2007, bahkan pada bulan Februari dan Maret 2007 terjadi deflasi. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh pada kondisi perekonomian makro yang diharapkan akan memberikan perbaikan ke depannya. Grafik 2.1 menunjukkan perkembangan inflasi tahunan Batam dan nasional, dan Grafik 2.2 menunjukkan perkembangan inflasi bulanan dan tahunan Kota Batam.

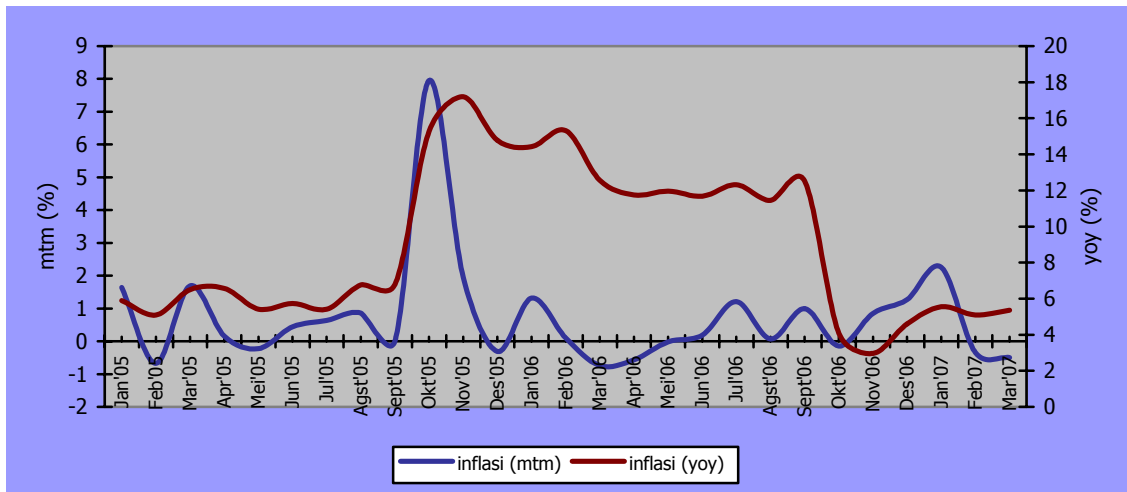
GRAFIK 2.1 – PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUNAN BATAM & NASIONAL



Sumber: Badan Pusat Statistik

¹⁴ Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus (dikutip dari Boediono, *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.5; Teori Moneter, BPFE-1982 Bab VIII*)

GRAFIK 2.2 – PERKEMBANGAN INFLASI & BULANAN KOTA BATAM



Sumber : Badam Pusat Statistik

Sesuai dengan UU No.3/2004 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mulai Juli 2005, BI mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru konsisten dengan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Pengimplementasian kerangka kerja tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan tata kelola (*governance*) kebijakan moneter dalam mencapai kestabilan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Laju inflasi Kota Batam diukur dengan menggunakan nilai variabel Indeks Harga Konsumen (IHK)¹⁵ yang berfungsi untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Nilai IHK secara nasional dilakukan atas dasar survei bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283 – 397 jenis barang/jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.

TABEL 2.1 - LAJU INFLASI BATAM TAHUN 2007

NO	KELOMPOK	BULANAN (MtM)			TAHUNAN (YoY)		
		JAN	FEB	MAR	JAN	FEB	MAR
	UMUM	2.26	-0.34	-0.50	5.56	5.10	5.36
1	Bahan Makanan	7.24	-1.54	-1.92	13.13	11.08	12.34
2	Mkn Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	1.08	0.24	-0.01	5.74	6.00	5.56
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bhn Bakar	0.07	0.07	0.07	0.74	0.78	0.83
4	Sandang	0.10	0.95	-0.24	2.12	2.85	2.94
5	Kesehatan	0.01	0.23	0.03	1.91	2.07	1.88
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	0.00	0.00	0.00	15.49	15.49	15.69
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0.21	0.00	0.26	0.68	0.68	0.86

Sumber: Badan Pusat Statistik

¹⁵ Uraian IHK selengkapnya dapat dilihat di Boks - VI

Secara tahunan, inflasi Batam terutama disebabkan oleh kelompok pendidikan dan kelompok bahan makanan. Hal ini terlihat dari sumbangan inflasi tahunan kelompok pendidikan yang tercatat sebesar 0.95% dan sumbangan inflasi tahunan kelompok bahan makanan sebesar 3.15%.

TABEL 2.2 - SUMBANGAN INFLASI TAHUNAN NASIONAL & BATAM MENURUT KELOMPOK BARANG & JASA (%)

NO	KELOMPOK	SUMBANGAN INFLASI NASIONAL 2007			SUMBANGAN INFLASI BATAM 2006			SUMBANGAN INFLASI BATAM 2007		
		JAN	FEB	MAR	JAN	FEB	MAR	JAN	FEB	MAR
1	Bahan Makanan	3.35	2.83	3.15	4.20	5.15	3.76	3.35	2.83	3.15
2	Makanan Jadi	1.03	1.07	0.99	1.66	1.59	1.61	1.03	1.07	0.10
3	Perumahan	0.19	0.20	0.21	1.69	1.68	1.62	0.19	0.20	0.21
4	Sandang	0.14	0.18	0.19	0.40	0.43	0.38	0.14	0.18	0.19
5	Kesehatan	0.08	0.09	0.08	0.20	0.20	0.20	0.08	0.09	0.08
6	Pendidikan	0.94	0.94	0.95	0.48	0.47	0.46	0.94	0.94	0.95
7	Transportasi	0.10	0.10	0.12	5.34	5.34	4.04	0.10	0.10	0.12
	UMUM	5.83	5.41	5.69	13.97	14.86	12.07	5.83	5.41	4.80

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

2.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI TAHUNAN (yoy) BATAM

Laju inflasi tahunan Kota Batam pada triwulan I-2007 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan IV-2006, yaitu dari 4.59% (yoy) menjadi 5.36%. Sedangkan bila dibandingkan dengan triwulan I-2006, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada laju pergerakan harga kelompok barang dan jasa di Kota Batam. Hal ini memberikan stimulus positif bagi perkembangan ekonomi daerah ke depan untuk dapat tumbuh lebih tinggi.

Tingkat inflasi yang tinggi pada triwulan I-2006 sebagai dampak dari kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005, dimana lambat laun pengaruh kebijakan pemerintah tersebut mulai hilang yang ditunjukkan pada inflasi kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang turun dari 28.28% (yoy) pada triwulan I-2006 menjadi 0.86% pada triwulan I-2007.

TABEL 2.3 - PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUNAN KOTA BATAM 2005 – 2006

KELOMPOK	2006								2007	
	Tw.I	Sumb	Tw.II	Sumb	Tw.III	Sumb	Tw.IV	Sumb	Tw.I	sumb
Bahan Makanan	14.73	3.76	12.19	3.11	14.87	3.79	10.23	2.61	12.34	3.15
Makanan Jadi	8.99	1.61	8.06	1.44	10.45	1.87	5.15	0.92	5.56	0.99
Perumahan	6.34	1.63	6.35	1.63	4.94	1.27	0.74	0.19	0.83	0.21
Sandang	5.88	0.38	5.07	0.32	2.11	0.14	2.35	0.15	2.94	0.19
Kesehatan	4.58	0.20	3.84	0.17	2.57	0.11	2.20	0.09	1.88	0.08
Pendidikan	7.61	0.46	7.86	0.48	15.63	0.95	15.41	0.93	15.69	0.95
Transportasi	28.28	4.04	28.40	4.06	28.69	4.09	0.49	0.07	0.86	0.12
UMUM	12.56		11.68		12.53		4.59		5.36	

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Inflasi Kota Batam pada triwulan I-2007 terutama disebabkan oleh kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga yang masing-masing memberikan sumbangan inflasi tahunan sebesar 3.14%, 0.99%, dan 0.97% (tabel 2.5).

TABEL 2.4 - PERKEMBANGAN INFLASI & SUMBANGANNYA

KELOMPOK/SUB KELOMPOK	TAHUN 2006		TAHUN 2007	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
I. BAHAN MAKANAN	10.23	2.61	12.34	3.14
Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	20.49	1.17	15.41	0.89
Daging dan Hasil-hasilnya	10.69	0.36	8.56	0.32
Ikan Segar	17.98	0.61	14.61	0.50
Ikan Diawetkan	5.70	0.04	2.61	0.03
Telur, Susu dan Hasil-hasilnya	5.14	0.12	2.96	0.07
Sayur-sayuran	8.55	0.18	18.74	0.42
Kacang-kacangan	8.19	0.10	2.54	0.03
Buah-buahan	0.77	0.02	11.51	0.26
Bumbu-bumbuan	2.09	0.04	13.64	0.30
Lemak dan Minyak	5.43	0.08	17.20	0.29
Bahan Makanan Lainnya	4.72	0.01	6.12	0.03
II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	5.15	0.92	5.56	0.99
Makanan Jadi	1.37	0.15	4.71	0.49
Minuman yang Tidak Beralkohol	7.49	0.24	3.97	0.13
Tembakau dan Minuman Beralkohol	9.28	0.42	7.43	0.33
III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	0.74	0.19	0.83	0.21
Biaya Tempat Tinggal	0.58	0.08	0.62	0.08
Bahan Bakar, Penerangan dan Air	0.01	0.00	0.21	0.01
Perlengkapan Rumah Tangga	2.21	0.05	3.50	0.07
Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.77	0.12	3.04	0.09
IV. SANDANG	2.35	0.15	2.94	0.18
Sandang Laki-laki	1.46	0.03	1.46	0.03
Sandang Wanita	2.15	0.05	2.16	0.04
Sandang Anak-anak	2.43	0.03	2.76	0.03
Barang Pribadi dan Sandang Lain	3.65	0.05	5.96	0.08
V. KESEHATAN	2.20	0.09	1.88	0.08
Jasa Kesehatan	3.73	0.04	3.74	0.04
Obat-obatan	0.69	0.00	0.01	0.00
Jasa Perawatan Jasmani	0.00	0.00	0.00	0.00
Perawatan Jasmani dan Kosmetika	2.31	0.05	1.91	0.04
VI. PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	15.41	0.93	15.69	0.97
Jasa Pendidikan	30.75	0.93	30.76	0.93
Kursus-kursus/Pelatihan	0.00	0.00	0.00	0.00
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	-0.08	0.00	-0.08	0.00
Rekreasi	1.34	0.02	2.11	0.04
Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	0.49	0.07	0.86	0.12
Transpor	0.38	0.04	1.05	0.09
Komunikasi dan Pengiriman	0.00	0.00	0.00	0.00
Sarana dan Penunjang Transpor	2.24	0.02	2.24	0.03
Jasa Keuangan	5.92	0.01	1.70	0.00
UMUM	4.59		5.36	

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 12.34% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan laju inflasi sub-kelompok sayur-sayuran yang tercatat 18.74% dan memberikan sumbangan sebesar 0.42%. Sementara itu, laju inflasi sub-kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya sebesar 15.41% dengan sumbangan sebesar 0.89%.

Kenaikan IHK kelompok bahan makanan secara tahunan disebabkan oleh beberapa komoditas yaitu sayur-sayuran (nangka muda, buncis, terong, kentang), lemak dan minyak (minyak goreng), padi-padian (beras), dan ikan segar. Kenaikan IHK kelompok pendidikan terutama disebabkan oleh jasa pendidikan (SD, SMP, SMA, dan kelompok bermain).

Apabila dilihat sumbangan inflasi menurut komoditasnya, bahan makanan adalah komoditas yang memberikan sumbangan terbesar pada inflasi Batam yaitu sebesar 3.14%

terutama berasal dari komoditas padi-padian, ikan segar, dan sayur-sayuran. Sementara itu, kelompok makanan jadi memberikan sumbangan inflasi sebesar 0.99% terutama berasal dari komoditas makanan jadi.

2.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI TRIWULANAN (qtq) BATAM

Secara triwulanan, **kelompok bahan makanan** mengalami laju inflasi dan memberikan sumbangan terbesar terhadap tingkat inflasi Batam. Peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok bahan makanan pada triwulan I-2007 sebesar 3.78% dan memberikan sumbangan mencapai 0.97% terhadap tingkat inflasi. Perubahan terbesar terdapat pada sub-kelompok padi-padian, umbi-umbian & hasil-hasilnya yang mencapai 10.17% dan sub-kelompok sayuran sebesar 7.66%.

TABEL 2.5 - PERKEMBANGAN INFLASI BATAM MENURUT KELOMPOK BARANG & JASA SECARA TRIWULANAN (QTQ)

NO	KELOMPOK	2005				2006				2007	
		Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Sumb
1	Bahan Makanan	3.78	0.05	2.21	10.30	1.76	-2.16	4.70	5.91	3.78	0.97
2	Makanan Jadi	1.52	1.12	0.69	5.98	0.93	0.25	2.88	0.98	1.31	0.24
3	Perumahan	0.70	0.24	1.46	4.38	0.14	0.24	0.13	0.25	0.21	0.06
4	Sandang	1.00	1.09	2.65	1.76	0.22	0.35	-0.22	2.00	0.81	0.06
5	Kesehatan	0.67	1.17	1.30	1.46	0.56	0.44	0.08	1.08	0.27	0.02
6	Pendidikan	0.07	0.14	6.98	0.63	-0.24	0.36	14.74	0.44	0.00	0.00
7	Transportasi	7.20	0.03	0.03	23.06	0.10	0.11	0.27	0.01	0.47	0.07
	UMUM	2.65	0.39	1.52	9.60	0.66	-0.39	2.28	1.97	1.42	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Apabila dibandingkan dengan triwulan IV-2006, maka terjadi perlambatan laju inflasi kuartalan di Batam, yaitu dari 1.97% (qtq) menjadi 1.42%. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan penurunan tingkat harga kelompok barang dan jasa terutama pada kelompok bahan makanan dan kelompok sandang.

Berdasarkan kelompok barang, inflasi IHK Batam pada triwulan I-2007 didorong oleh kenaikan harga kelompok bahan makanan yang dipengaruhi oleh terganggunya *supply* bahan makanan akibat pengaruh dari cuaca buruk.

2.4 SURVEI KEGIATAN DUNIA USAHA (SKDU)¹⁶

Pelaksanaan survei kegiatan dunia usaha bertujuan untuk mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil, dimana hasil survei merupakan salah satu pendekatan/proksi kegiatan usaha, disamping sebagai salah satu komponen/variabel pembentuk *leading economy indicator*. Adapun responden pada survei tersebut adalah perusahaan yang termasuk menengah ke atas berdasarkan nilai produksi/penjualan/penghasilan

¹⁶ pelaksanaan survey kegiatan dunia usaha (SKDU) dilakukan setiap triwulanan dan merupakan kerjasama BI dengan BPS Provinsi Kepri.

operasional/jumlah tenaga kerjanya. Pengambilan sampel untuk kegiatan ini dilakukan dengan metode *stratified purposive sampling*. Dimana stratifikasi berdasarkan sektor ekonomi, daerah/regional, nilai usaha yang diukur dari produksi/penjualan/penghasilan operasional/jumlah tenaga kerjanya.

Secara umum, kegiatan dunia usaha pada tw.IV-2006 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (diwakili oleh Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang) sedikit mengalami peningkatan setelah sebelumnya mengalami berbagai tantangan akibat kondisi perekonomian makro yang kurang kondusif. Saat ini perekonomian Indonesia umumnya, dan Kepulauan Riau khususnya berangsur-angsur mulai menunjukkan pemulihan kearah yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan pada jawaban responden dimana hampir semua sektor sudah mulai meningkatkan produksinya yang sebelumnya sebagian besar responden merasakan dampak yang cukup berat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada tw.IV-2005.

Berdasarkan hasil SKDU, para pengusaha di wilayah Batam dan Tanjung Pinang memperkirakan laju inflasi pada tw.IV-2006 secara rata-rata sebesar 6% (y-o-y), menurun dibandingkan prakiraan inflasi triwulan sebelumnya (9%).

Bab 3

Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran

3.1 KONDISI UMUM

Kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I-2007 menunjukkan peningkatan yang cukup stabil terhadap tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dari angka pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 secara triwulanan meningkat sebesar 1,99% (qtq) terhadap triwulan I-2007. Sementara itu, meskipun persentase peningkatan jumlah uang giral dan uang kuasi di wilayah kerja KBI Batam pada triwulan I-2007 lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya namun beberapa indikator-indikator perbankan, seperti: total aset, Dana Pihak Ketiga dan penyaluran kredit oleh perbankan terus mengalami pertumbuhan. Di bidang sistem pembayaran, transaksi tunai selama tw.IV-2006 di Provinsi Kepulauan Riau mengalami *net outflow* sebesar Rp.245,04 miliar, sedangkan transaksi non-tunai melalui kegiatan kliring di wilayah kerja KBI Batam mencapai Rp.2,30 triliun (104.603 lembar).

3.2 MONETER

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia serta prospek ekonomi moneter ke depan, pada tw.I-2007 Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI Rate dari 9,50% (4 Januari 2007) menjadi 9,25% (6 Februari 2007), dan 9,00% (6 Maret 2007). Langkah yang dilakukan oleh otoritas moneter ini masih dalam kerangka upaya pencapaian sasaran inflasi ke depan yaitu $6\pm 1\%$ untuk tahun 2007 dan $5\pm 1\%$ untuk tahun 2008. Penurunan BI Rate didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan konsistensi arah kebijakan moneter yang ditempuh BI. Secara nasional, beberapa indikator ekonomi menunjukkan akselerasi perekonomian yang terus berlanjut, dimana sumber pertumbuhan ekonomi terutama berasal dari ekspor dan perbaikan permintaan domestik, khususnya investasi yang mulai tumbuh. Disamping itu, kinerja ekspor masih tumbuh cukup tinggi yang didukung oleh sektor pertanian dan industri.

TABEL 3.1 – PERKEMBANGAN UANG GIRAL & KUASI
(dalam miliar rupiah)

Ket	2006				2007
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I
Uang Giral	3.429,73	4.435,88	4.988,06	5.086,04	5.057,69
Giro	3.429,73	4.435,88	4.988,06	5.086,04	5.057,69
Uang Kuasi	5.122,77	6.104,83	6.146,31	7.334,23	7.404,45
Tabungan	2.819,91	3.089,24	3.211,56	3.828,18	3.844,02
Deposito	2.302,86	2.725,13	2.934,75	3.506,05	3.560,43
Total	8.552,49	10.450,71	11.134,37	12.420,27	12.462,14

Dana masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang disimpan dalam bentuk giral dan kuasi menunjukkan peningkatan. Jumlah uang kuasi pada tw.I-2007

meningkat sebesar Rp.70,22 miliar (0,96%) dibandingkan tw.IV-2006. Peningkatan jumlah uang kuasi tersebut tidak diiringi oleh peningkatan uang giral dimana sampai dengan tw.I-2007 jumlah uang giral yang dihimpun perbankan di Provinsi Kepulauan Riau menurun sebesar Rp.28,35 miliar (-0,56%). Secara total jumlah uang giral dan uang kuasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar Rp.41,87 miliar (0,34%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

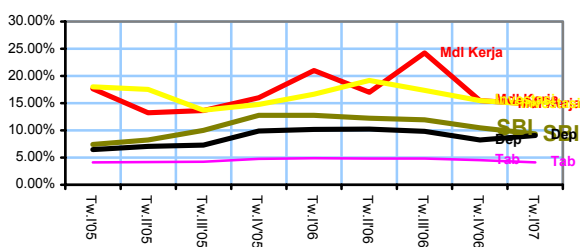
Suku bunga simpanan menunjukkan pergerakan yang cenderung menurun setelah sebelumnya tingkat suku bunga perbankan sempat meningkat menjelang awal tahun 2006. Pada tw.I-2007 rata-rata suku bunga simpanan berjangka 3 bulan mencapai 9,05% dan sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 8,25%, tingkat suku bunga tabungan sebesar 4,12%, dan tingkat suku bunga kredit modal kerja serta kredit investasi masing-masing sebesar 14,81% dan 14,78%. Perkembangan suku bunga perbankan di wilker KBI Batam dapat dilihat pada tabel 3.2.

TABEL 3.2 – PERKEMBANGAN SUKU BUNGA (%)

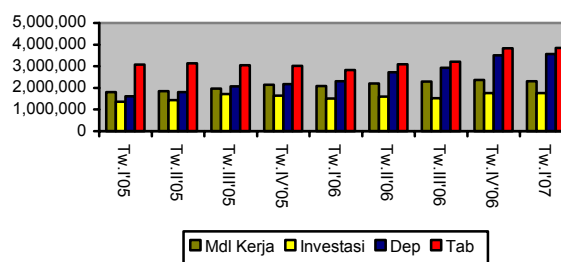
Keterangan	2006				2007
	Tw.I	Tw. II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
SBI 1 bulan	12,75	12,25	11,94	10,50	9,38
DPK *)					
Tabungan	4,86	4,85	4,81	4,55	4,12
Dep 3 bln	10,20	10,25	9,82	8,25	9,05
Kredit *)					
Mdl Krj	21,00	16,99	16,00	15,48	14,81
Investasi	16,64	19,20	17,34	15,46	14,78

Sumber : Bank Indonesia *) angka diperbaiki

Grafik 3.1a Perkembangan Tingkat Suku Bunga



Grafik 3.1b Perkembangan DPK dan Kredit



Berdasarkan grafik diatas, atas dasar nilai rata-rata, terjadi penurunan suku bunga simpanan dalam bentuk tabungan, namun sebaliknya, suku bunga kredit justru mengalami peningkatan khususnya pada kredit modal kerja. Hal ini sebagai respon dunia perbankan terhadap penurunan BI-Rate.

3.3 PERBANKAN

Indikator perbankan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tw.I-2007 menunjukkan peningkatan. Jumlah jaringan kantor Bank Umum sebanyak 40 kantor pada triwulan laporan, sedangkan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak 11 (sebelas) kantor. Selain itu, terdapat 3 BPR yang telah memperoleh ijin prinsip dan 1 BPR yang sedang dalam proses perijinan untuk pendiriannya saat ini. Masing-masing BPR yang telah memperoleh ijin prinsip tersebut adalah 2 BPR berlokasi di Kota Batam dan 1 BPR berlokasi di Kabupaten Bintan, sedangkan 1 BPR di Tanjung Pinang masih menunggu ijin prinsip.

Total *asset*, jumlah dana masyarakat yang dihimpun serta total kredit yang diberikan oleh perbankan menunjukkan *trend* peningkatan jika dibanding tw.IV-2006 meskipun dengan persentasi yang kurang signifikan. Sementara itu, kekhawatiran beberapa kalangan atas perubahan batas maksimal jumlah simpanan masyarakat yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar maksimal Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sejak tanggal 22 Maret 2007 pada kenyataannya tidak menunjukkan terjadinya pergeseran jumlah rekening simpanan pada perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan cukup tinggi.

TABEL 3.3 – PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN*(juta rupiah)*

Indikator	Periode				2007
	2006				
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
1. Jaringan BU	36	38	38	40	40
a. Batam	24	24	24	26	26
b. Tj. Pinang	9	11	11	11	11
c. Karimun	2	2	2	2	2
d. Natuna	1	1	1	1	1
2. Jaringan BPR	10	10	10	11	11
a. Batam	7	7	7	8	8
b. Tj. Pinang	2	2	2	2	2
c. Karimun	1	1	1	1	1
3. Total Asset	10.559.530	12.173.496	13.115.164	14.592.742	14.617.078
a. Batam	8.160.702	9.131.399	9.421.420	9.966.611	10.181.336
b. Tj. Pinang	1.907.064	2.240.879	2.650.857	3.511.073	3.320.778
c. Dati II lain	491.764	345.781	1.042.887 *)	1.115.058	1.114.964
4. Total DPK	8.552.495	455.437	11.134.372	12.420.268	12.462.137
a. Batam	6.178.643	10.250.252	7.606.786	7.979.175	8.159.309
b. Tj. Pinang	1.884.600	7.197.490	2.477.426	3.352.073	3.182.499
c. Dati II lain	489.252	3.052.762	1.050.160	1.089.020	443.931
5. Total Kredit	5.771.562	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064
a. Batam	5.029.911	5.302.606	5.266.622	5.588.850	5.622.513
b. Tj. Pinang	604.457	657.171	819.222	897.686	898.102
c. Dati II lain	137.194	158.485	172.336	179.819	192.449
6. LDR (%)	67,48	59,69	56,21	53,67	53,87
a. Batam	81,41	72,67	69,24	70,04	68,91
b. Tj. Pinang	32,07	29,43	33,07	26,78	28,22
c. Karimun	40,11	36,62	39,50	39,10	33,11
d. Natuna	12,01	7,08	5,07	5,04	6,72
7. NPLs (%)	4,27	5,43	4,83	4,34	4,46
a. Batam	3,14	2,01	3,62	4,43	4,19
b. Tj. Pinang	14,65	9,11	12,76	3,66	5,95
c. Karimun	0,19	4,18	4,87	5,98	6,86
d. Natuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Bank Indonesia

Ket: *) termasuk Natuna

Kinerja perbankan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2007 terhitung baik, dimana asset, DPK, kredit dan rasio LDR maupun NPL masih berada dalam batas toleransi. Meskipun demikian, pertumbuhan penghimpunan dana yang lebih besar daripada penyaluran kredit menunjukkan belum optimalnya fungsi intermediasi oleh perbankan. Hal tersebut juga berdampak pada pencapaian LDR perbankan yang menurun selama 4 triwulan terakhir, dimana tingkat LDR bank umum pada triwulan I-2007 sebesar 53,87%. Keengganan dunia perbankan menyalurkan kredit ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dunia usaha, terutama yang pendanaannya berasal dari perbankan.

Sementara itu, terdapat sedikit peningkatan pada tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di wilayah kerja KBI Batam, yaitu dari 4,34% pada tw.IV-2006 menjadi 4,46% pada triwulan laporan. Peningkatan kualitas kredit tersebut terutama disumbangkan dari tingkat NPLs perbankan di daerah Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun.

Peningkatan total nilai NPL di wilayah kerja KBI Batam ini dipengaruhi oleh performa dunia usaha yang masih belum optimal. UMKM sebagai salah satu target pemberian kredit perlu dikembangkan agar dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Oleh karena itu KBI Batam sebagai otoritas moneter melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BOKS - VI

PELATIHAN KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)

Satgasda KKMB Provinsi Kepulauan Riau melakukan pelatihan kepada calon Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) pada tanggal 13 April 2007 bertempat di Kantor Bank Indonesia Batam. Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses pembiayaan UMKM oleh bank di Provinsi Kepulauan Riau yang pada akhirnya dapat menjadi sektor pendukung perekonomian daerah.

Hingga saat ini terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pembentukan KKMB di Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya adalah:

- tanggal 22 Februari 2007 adalah pembentukan Unit Bantuan Teknis (UBT) yang berfungsi untuk menjalankan operasional kegiatan Satgasda KKMB Provinsi Kepulauan Riau,
- tanggal 27 – 28 Februari 2007 adalah pelaksanaan lokakarya pengembangan UMKM melalui program KKMB yang bekerjasama dengan P2UKM dan Kadin Bandung. Lokakarya tersebut merupakan realisasi dari nota kesepahaman antara KKMB Provinsi Kepulauan Riau dengan Kadin Bandung yang ditandatangani pada saat Rapim Kadin Kepulauan Riau tanggal 7 Februari 2007,
- tanggal 5 – 30 Maret 2007 adalah proses pendaftaran dan seleksi calon KKMB yang berasal dari BDS-P, Dosen, LSM serta konsultan UMKM binaan BUMN dan instansi terkait,
- tanggal 13 – 19 April 2007 adalah pelatihan kepada 65 calon KKMB yang berasal dari Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun dan Bintan.

Secara geografis, dana simpanan yang masuk ke dunia perbankan di wilayah kerja KBI Batam porsi terbesar berasal dari kota Batam sebesar Rp.8,16 triliun atau 65,47% dari seluruh dana masyarakat yang berhasil dihimpun di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian pula kredit yang disalurkan oleh perbankan sebagian besar mengalir ke kota Batam sebesar Rp.5,62 triliun atau 83,75% dari seluruh total kredit yang disalurkan ke masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

3.3.1 Perkembangan Total Asset Bank Umum

Kondisi industri perbankan menunjukkan pertumbuhan, seperti tercermin pada pertumbuhan total *asset* bank umum yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam yang didukung oleh pertumbuhan aktiva produktif, termasuk kredit. Sampai dengan *tw.I-2007*, total *asset* bank umum mencapai Rp.14,62 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 11,27% dibanding *tw.III-2006* yang tercatat sebesar Rp. 24,34 miliar, sedangkan secara tahunan (*y-o-y*) terdapat peningkatan sebesar 38,43%.

Komposisi total *asset* perbankan di wilayah kerja KBI Batam cukup seimbang antara kelompok Bank Swasta dan kelompok Bank Pemerintah. Kelompok Bank Swasta memiliki

total *asset* sebanyak Rp.7,55 triliun atau 51,63% dari seluruh *asset* perbankan di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu kelompok Bank Pemerintah mengumpulkan *asset* sebanyak Rp.7,07 triliun atau sama dengan 48,37% dari seluruh *asset* perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (termasuk BPD Riau).

Bila dilihat *trend* pertumbuhan total *asset* secara tahunan, kelompok Bank Swasta menunjukkan kinerja paling baik dimana total *asset* yang dimilikinya meningkat sebesar 40,70% terhadap triwulan I-2006 (Rp.5,36 triliun). Sedangkan total *asset* pada kelompok Bank Pemerintah meningkat sebesar 36,07%.

Berdasarkan Dati II, kegiatan perekonomian dan perbankan masih terkonsentrasi di Kota Batam, dimana jumlah total *asset* perbankan sebagian besar masih tetap terhimpun di Kota Batam. Total *asset* perbankan yang ada di Kota Batam pada tw.I-2007 sebesar Rp.10,18 triliun atau 69,65% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sedangkan total *asset* yang berhasil dihimpun oleh perbankan di Tanjung Pinang sebesar Rp.3,32 triliun atau 22,72% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sementara itu total *asset* perbankan di wilayah Kepulauan Riau (Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, dan Natuna) sebesar Rp.1,11 triliun (7,63%).

TABEL 3.4 – PERKEMBANGAN TOTAL ASSET PERBANKAN

(miliar rupiah)

Lokasi	2006				2007	Pertumb (%)	
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.I	q-t-q	y-o-y
Kota Batam	8.161	9.131	9.421	9.967	10.181	2,15	24,75
Wil.Tj.Pinang	1.907	2.241	2.651	3.511	3.321	-5,41	74,15
Kepln Riau*)	491	801	1.043	1.115	1.115	0,00	127,09
Total	10.559	12.174	13.115	14.593	14.617	0,16	38,43

Sumber : Bank Indonesia

*) wilayah Kepulauan Riau meliputi Tj.Uban, Kab. Tanjung Balai Karimun dan Kab. Natuna

Adapun peningkatan total *asset* terbesar triwulanan (q-t-q) terdapat di wilayah Batam (2,15%), sedangkan secara tahunan (y-o-y) peningkatan terbesar terdapat di Kepulauan Riau (127,09%) dan Tanjung Pinang (74,15%). Bila dibandingkan kondisi akhir tahun 2006, terlihat bahwa wilayah Tanjung Pinang mengalami penurunan *asset* yang cukup signifikan secara triwulanan sebesar -5,41% yang disebabkan adanya perubahan status perbankan di wilayah Tanjung Pinang. Pertumbuhan total *asset* di wilayah kerja KBI Batam juga diikuti dengan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan, yaitu mencapai 16,31% (y-o-y).

3.3.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum

Sampai dengan tahun 2007, jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank Umum masih terus mengalami pertumbuhan, dimana pada triwulan I-2006 jumlah dana

masyarakat mencapai Rp.12,46 triliun atau meningkat sebesar Rp.3,91 triliun (45,71%) terhadap tahun 2006. Peningkatan DPK tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (2005- 2006), yang tercatat sebesar Rp.746 miliar (9,56%).

Deposito berjangka merupakan jenis simpanan yang mengalami pertumbuhan terbesar yang mencapai 54,61% (Rp.1,26 triliun) dan diikuti oleh giro sebesar 47,47% (Rp.1,63 triliun). Hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi pergeseran minat masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau untuk menghimpun dana-nya pada jenis simpanan yang *unliquid* dimana pada periode sebelumnya simpanan masyarakat di wilayah kerja KBI Batam sebagian besar merupakan simpanan giro. Meskipun demikian, secara nominal simpanan giro masih memiliki jumlah terbesar yang mencapai Rp.5,06 triliun. Dominasi sektor industri dan sektor perdagangan pada perekonomian Kota Batam turut mempengaruhi jenis transaksi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau. Kebutuhan masyarakat akan dana likuid serta transaksi ekonomi yang membutuhkan waktu singkat menyebabkan simpanan berbentuk giro memiliki porsi terbesar terhadap total simpanan masyarakat di perbankan.

Trend perkembangan dana yang dapat dihimpun oleh bank umum yang berada di wilayah kerja KBI Batam dari tw.I-2005 sampai dengan tw.I-2007 dapat dilihat tabel 3.5.

TABEL 3.5 – PENGHIMPUNAN DANA BANK UMUM

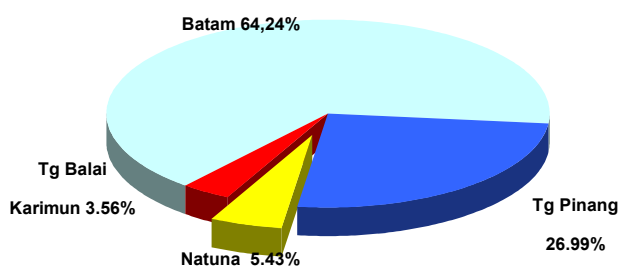
Keterangan	2005				2006				(Juta Rupiah)
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	2007
Jenis Simpanan:	7.806.495	8.120.960	8.373.778	8.707.149	8.552.495	10.250.252	11.134.372	12.420.268	12.462.137
- Giro	3.106.069	3.183.277	3.262.739	3.524.558	3.429.726	4.435.878	4.988.060	5.086.038	5.057.691
- Tabungan	3.084.279	3.132.152	3.040.044	3.013.300	2.819.911	3.089.243	3.211.560	3.828.176	3.844.020
- Deposito	1.616.147	1.805.531	2.070.995	2.169.291	2.302.858	2.725.131	2.934.752	3.506.054	3.560.426
Jenis Bank:									
Bank Pemerintah	2.908.186	3.039.967	3.032.576	3.217.522	3.191.790	3.595.272	3.464.724	3.897.504	3.893.517
- Giro	861.001	869.819	851.339	1.011.615	997.127	1.220.980	1.037.079	1.233.846	1.160.015
- Tabungan	1.478.146	1.536.402	1.487.591	1.494.184	1.423.278	1.540.704	1.560.522	1.770.691	1.836.480
- Deposito	569.039	633.746	693.646	711.723	771.385	833.588	867.123	892.967	897.022
BPD Riau	505.002	573.855	669.662	854.888	809.241	1.263.075	1.780.649	2.237.652	1.949.614
- Giro	346.156	414.541	511.997	627.222	572.038	986.016	1.445.086	1.325.392	1.077.597
- Tabungan	126.946	126.437	124.294	190.101	127.317	135.654	165.738	355.596	196.597
- Deposito	31.900	32.877	33.371	37.565	109.886	141.405	169.825	556.664	675.420
Bank Swasta	4.393.307	4.507.138	4.671.540	4.634.739	4.551.464	5.391.905	5.888.999	6.285.112	6.619.006
- Giro	1.898.912	1.898.917	1.899.403	1.885.721	1.860.561	2.228.882	2.505.895	2.526.800	2.820.079
- Tabungan	1.479.187	1.469.313	1.428.159	1.329.015	1.269.316	1.412.885	1.485.300	1.701.889	1.810.943
- Deposito	1.015.208	1.138.908	1.343.978	1.420.003	1.421.587	1.750.138	1.897.804	2.056.423	1.987.984

Sumber : Bank Indonesia Batam

Kelompok Bank Swasta masih mendominasi peta perbankan di wilayah kerja KBI Batam dalam hal penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Swasta sebesar Rp.6,29 triliun atau 53,11% dari total DPK di wilayah kerja KBI Batam. Sementara itu, pertumbuhan DPK terbesar terdapat pada kelompok Bank

Pemerintah dibandingkan kelompok Bank Swasta. Peningkatan penghimpunan dana masyarakat oleh kelompok Bank Swasta sebesar 45,43% (y-o-y), sedangkan kelompok Bank Pemerintah meningkat sebesar 46,04%. Sedangkan dari segi geografis kota Batam masih tetap sebagai kontributor terbesar dari penghimpunan DPK yaitu sebesar Rp.8,16 triliun (65,47%), diikuti oleh Tanjung Pinang sebesar Rp.3,18 triliun (25,54%), Natuna sebesar Rp.676 miliar (5,43%) dan Tanjung Balai Karimun sebesar Rp.444 miliar (3,56%).

GRAFIK 3.2 – PERBANDINGAN TOTAL DPK BANK UMUM TRIWULAN I-2007



Sumber : Bank Indonesia

3.3.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum

Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam pada triwulan I-2007 sebesar Rp.6,71 triliun atau tumbuh sebesar 16,31% dibandingkan tahun 2006 (yoy). Namun pertumbuhan tersebut lebih kecil dibandingkan persentase pertumbuhan kredit tahun 2005 – 2006 yang mencapai 21,22%. Pelemahan penyaluran kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh melemahnya kemampuan masyarakat untuk menyerap dana kredit yang dikucurkan perbankan serta tekanan suku bunga kredit yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2006.

Meskipun demikian, seiring dengan penurunan BI Rate yang mencapai 9,00% (per 6 Maret 2007) yang diikuti oleh penurunan suku bunga penjaminan dan suku bunga simpanan, juga mempengaruhi penetapan suku bunga kredit meskipun masih sangat terbatas.

Jika dibandingkan dengan tw.IV-2006, kredit yang disalurkan oleh Bank Umum meningkat sebesar Rp.46,71 miliar (0,70%), dimana pertumbuhan terbesar terdapat pada kelompok Bank Pemerintah (1,56%) sedangkan kelompok Bank Swasta menurun sebesar 0,18% terhadap triwulan sebelumnya (q-t-q). Meskipun jumlah penyaluran kredit oleh Bank Umum pada triwulan laporan meningkat terhadap triwulan sebelumnya, namun persentase pertumbuhan kredit masih sangat rendah, demikian juga dengan pertumbuhan dana pihak

ketiga (DPK). Hal tersebut berdampak pada penurunan tingkat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Bank Umum yaitu dari 53,67% (tw.IV-2006) menjadi 53,87% (tw.I-2007) .

TABEL 3.6 – PERKEMBANGAN OUTSTANDING KREDIT BANK UMUM
(dalam miliar rupiah)

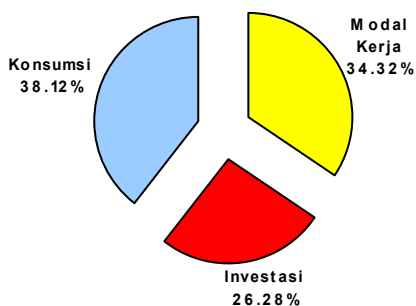
Keterangan	2006				Tw. I - 2007	Prtmnb (y-o-y)
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4		
TOTAL	5.771.562	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064	16,31%
- Bank Pemerintah*)	3.139.689	3.216.364	3.256.116	3.357.758	3.410.296	8,62%
- Bank Swasta	2.631.873	2.901.898	3.002.064	3.308.597	3.302.768	25,49%

Sumber : Bank Indonesia
*) termasuk BPD Riau

Tingkat penyaluran kredit yang relatif lebih kecil dari peningkatan DPK tersebut perlu didorong peningkatan penyaluran kredit yang lebih agresif agar bank umum dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan di wilayah kerja KBI Batam sebagian besar digunakan untuk kredit konsumsi sebesar Rp.2,65 triliun atau 39,40% dari total kredit yang diberikan. Sedangkan kredit untuk modal kerja dan investasi masing-masing sebesar Rp.2,30 triliun (34,32%) dan Rp.1,76 triliun (26,28%). Untuk komposisi penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dapat dilihat pada grafik 3.3.

GRAFIK 3.3
KOMPOSISI PENYALURAN KREDIT DI WILKER
KBI BATAM TRIWULAN I-2007



Kelompok kredit konsumsi memiliki porsi terbesar pada penyaluran kredit Bank Umum pada tw.I-2007. Sementara itu, porsi terkecil dimiliki oleh kelompok kredit investasi yaitu sebesar 26,28% dimana besaran ini mengalami penurunan terhadap triwulan sebelumnya. Dari segi pertumbuhan, peningkatan jumlah kredit terbesar pada tw.I-2007 terdapat pada kredit untuk jenis konsumsi yang meningkat sebesar Rp.103,71 miliar atau 4,08% terhadap tw.IV-2006.

Sementara itu kredit investasi meningkat sebesar Rp.6,02 miliar (0,34%). Sedangkan kredit modal kerja menurun sebesar Rp.63,03 miliar (-2,66%). Rendahnya pembiayaan kredit modal kerja oleh bank umum menunjukkan bahwa masih terdapat prospek dan potensi bagi dunia perbankan untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha.

TABEL 3.7 – PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BANK UMUM TRIWULAN I-2007

(miliar rupiah)

No	KETERANGAN	2006				Tw.I-2007
		Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	
1	Kredit atas Jenis:	5.771.562	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064
	- Modal kerja	2.081.520	2.199.868	2.299.214	2.366.633	2.303.606
	- Investasi	1.511.012	1.596.120	1.528.315	1.758.377	1.764.400
	- Konsumsi	2.179.030	2.322.274	2.430.651	2.541.345	2.645.058
2	Kredit atas Sektor Ek:	5.771.562	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064
	- Pertanian	150.171	151.213	168.031	181.319	183.050
	- Pertambangan	46.681	53.657	29.922	24.901	19.656
	- Industri	909.123	893.615	844.595	775.082	728.129
	- Listrik, gas dan air	4.067	4.422	5.002	4.867	14.096
	- Konstruksi	548.264	589.123	585.052	586.819	549.724
	- Perdagangan	1.304.544	1.384.811	1.468.010	1.575.983	1.600.170
	- Pengangkutan	94.345	134.863	133.480	141.006	139.259
	- Jasa dunia usaha	473.365	517.172	525.683	762.979	759.419
	- Jasa sosial	58.011	63.490	63.520	64.733	67.472
	- Lainnya	2.182.991	2.325.896	2.434.885	2.548.666	2.652.089

Sumber : Bank Indonesia

Penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar digunakan untuk konsumsi, demikian pula dilihat dari segi tingkat pertumbuhan. Data ini dapat mencerminkan bahwa kegiatan dunia usaha yang dibiayai oleh perbankan masih belum optimal. Sebagian besar DPK yang masuk ke dunia perbankan disalurkan kembali ke masyarakat untuk keperluan konsumsi. Salah satu sebab besarnya jumlah kredit untuk konsumsi ini adalah karena perbankan menilai penyaluran kredit untuk konsumsi relatif lebih aman dan *feasible* untuk dibiayai. Pada tw.I-2007, suku bunga kredit konsumsi (17,56%), sedangkan kredit modal kerja (14,81%) dan kredit investasi (14,78%), sedangkan pada tw.IV-2006, suku bunga kredit konsumsi (17,8%), kredit modal kerja (15,4%) dan kredit investasi (15,4%).

Kredit yang disalurkan di luar konsumsi sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan, dimana kredit tersebut mendapatkan porsi terbesar dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain pada setiap triwulan. Pada tw.I-2007, sektor perdagangan mendapatkan dana dari perbankan dalam bentuk kredit sebesar Rp.1,6 triliun atau 23,84% dari seluruh total kredit. Besarnya porsi kredit untuk sektor perdagangan ini dapat mencerminkan bahwa sektor perdagangan adalah sektor yang lebih berkembang dibanding dengan sektor yang lain.

TABEL 3.8 – PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS KREDIT BANK UMUM

KETERANGAN	2006				Tw. I - 2007
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	
Total	5.771.562	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064
- Lancar	4.650.364	4.957.027	4.978.457	5.658.971	5.658.159
- Dalam Perhatian Khusus	789.573	801.847	878.791	718.327	755.618
- Kurang Lancar	22.604	43.229	113.297	51.033	43.591
- Diragukan	52.004	40.739	30.406	28.018	38.974
- Macet	257.017	275.420	257.229	210.006	216.722
>> NPL (Nominal)	331.625	359.388	400.932	289.057	299.287
>> NPL (%)	5,75	5,87	6,41	4,34	4,46

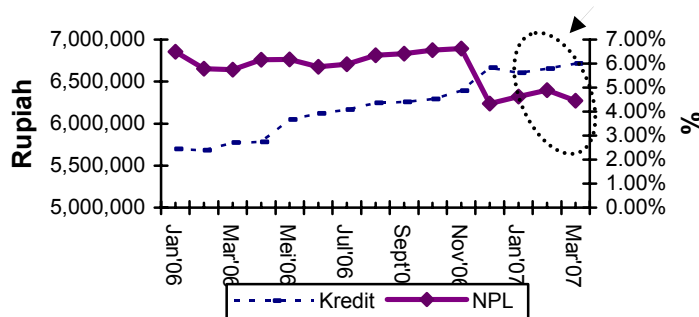
Sumber : Bank Indonesia

Adanya industri dan perusahaan-perusahaan asing yang melakukan produksi di Provinsi Kepulauan Riau menyerap tenaga kerja yang berasal dari luar daerah, dimana mobilisasi tenaga kerja dari luar daerah tersebut menciptakan pangsa pasar baru di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, adanya pangsa pasar baru tersebut menjadikan sektor perdagangan sebagai salah satu sektor yang paling berkembang di Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu, sektor-sektor lain yang juga mendapatkan pembiayaan cukup besar dari perbankan adalah sektor jasa dunia usaha sebesar Rp.759 miliar (11,31%) dan sektor industri sebesar Rp.728 miliar (10,85%).

NPL bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada tw.I-2007 sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika pada tw.IV-2006 NPL bank umum sebesar 4,34%, maka pada triwulan laporan NPL bank umum meningkat menjadi 4,46% setelah sebelumnya pada triwulan III-2006 NPL perbankan cukup tinggi mencapai 6,41%. Secara nominal NPL bank umum sedikit meningkat yaitu sebesar Rp.299 miliar dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan NPL tersebut umumnya disebabkan oleh perubahan kualitas kredit pada kelompok Bank Swasta.

Dunia Usaha yang belum kondusif serta belum membaiknya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan NPL di bank umum. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau maka perlu adanya penciptaan kerjasama dan koordinasi yang baik antara sektor perbankan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KBI Batam untuk mendorong kinerja dunia usaha adalah dengan memberikan Bantuan Teknis (Bantek) kepada dunia usaha khususnya UMKM yang berada di wilayah kerja KBI Batam. Disamping itu, KBI Batam juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan KKMB.

Grafik 3.4
Perkembangan NPL dan Kredit Bank Umum



3.4 Perkembangan Bank Syariah

Penerapan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) yaitu suatu sistem dimana bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1992. Pada tahun yang sama berdiri pula bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Secara nasional, perkembangan industri perbankan syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang pesat dan diiringi dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah dalam waktu lima tahun secara rata-rata mencapai 60% per tahun.

Selama tahun 2006 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, pada akhir tahun 2006 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 20 UUS dan 105 BPRS.

TABEL 3.9 – INDIKATOR PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Keterangan	2006				Tw. I 2007
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	
Bank Umum Syariah	3	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah	19	19	19	20	21
Jumlah Kantor	565	576	617	636	657
- BUS & UUS	471	480	512	531	552
- BPRS	94	96	105	105	105
Total Aset (Rp triliun)	20,55	22,70	24,31	26,72	28,45
Total DPK	14,96	16,43	17,98	20,67	21,88
Total Pembiayaan	16,00	18,16	19,66	20,44	20,82

Sumber : Bank Indonesia

3.4.1 Perkembangan Total Asset

Pada triwulan I-2007, industri perkembangan syariah di Indonesia masih memperlihatkan peningkatan laju pertumbuhan aset dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah secara triwulanan pada triwulan laporan tercatat sebesar 6,46% dari triwulan sebelumnya atau mencapai 38,46% (yoy) dimana aset bank syariah mencapai Rp.28,45 triliun. Pertumbuhan volume usaha ini didukung oleh penambahan sebanyak 21 kantor sehingga pada triwulan laporan jaringan kantor perbankan syariah telah mencapai 552 kantor yang dioperasikan oleh 3 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah.

TABEL 3.10 – INDIKATOR PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Keterangan	2006				Tw. I 2007
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	
Kantor Bank Umum Syariah	4	4	4	5	5
Total Aset (Rp. miliar)	99,77	140,16	163,84	190,33	212,60
Total DPK (Rp miliar)	69,07	89,71	99,01	136,24	148,49
Total Pembiayaan (Rp miliar)	113,94	174,08	198,41	225,34	249,73

Sumber : Bank Indonesia

Secara regional, perkembangan industri perbankan syariah di wilayah kerja KBI Batam pada tahun 2006 mengalami peningkatan yang signifikan, dimana terdapat penambahan jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 3 kantor sehingga pada akhir tahun 2006 jaringan perbankan syariah telah mencapai 5 Bank Umum Syariah. Pada triwulan I-2007 tidak terdapat perubahan pada jumlah bank umum syariah yang beroperasi di wilker KBI Batam, dan belum terdapat BPR yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Adapun jumlah aset yang dimiliki perbankan syariah di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I-2007 mencapai Rp.212,60 miliar atau meningkat 113,10% terhadap periode laporan tahun sebelumnya (yoy). Bila dibandingkan terhadap total aset industri perbankan secara keseluruhan di wilker KBI Batam, perbankan syariah memiliki pangsa mencapai 1,45%.

3.4.2 Perkembangan Penghimpunan Dana

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah di Indonesia sampai dengan triwulan I-2007 mencapai Rp.21,88 triliun atau secara triwulanan (qtq) tumbuh sebesar 5,86% dan 46,32% secara tahunan (yoy). Dilihat dari komposisi Dana Pihak Ketiga, simpanan dalam bentuk Deposito Mudharabah memiliki porsi terbesar yang mencapai 52,68% atau sebesar Rp.11,53 triliun, diikuti oleh Tabungan Mudharabah sebesar Rp.6,74 triliun atau 30,80% dan simpanan berbentuk Giro Wadiah yang mencapai Rp.3,62 triliun atau 16,52%.

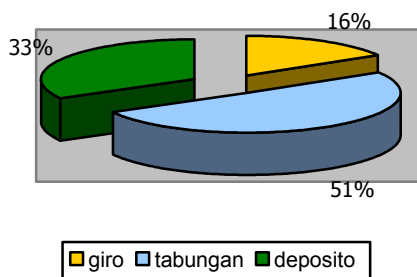
TABEL 3.11 – INDIKATOR PERKEMBANGAN DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Keterangan	2005				Tw.I 2007
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	
Giro Wadiah					
Nilai (miliar rupiah)	2.257	2.658	2.748	3.416	3.615
Pangsa (%)	15,09	16,17	15,29	16,52	16,52
Tabungan Mudharabah					
Nilai (miliar rupiah)	4.501	4.972	5.605	6.430	6.740
Pangsa (%)	30,10	30,26	31,18	31,11	30,80
Deposito Mudharabah					
Nilai (miliar rupiah)	8.197	8.803	9.623	10.826	11.527
Pangsa (%)	54,81	53,57	53,53	52,37	52,68
Total	14.956	16.433	17.976	20.672	21.883

Sumber : Bank Indonesia

Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga oleh industri perbankan syariah pada triwulan laporan mencapai Rp.148,49 miliar dengan pangsa sebesar 1,19% terhadap total DPK perbankan di wilayah kerja KBI Batam. Komposisi DPK terbesar terdapat pada simpanan jenis tabungan mudharabah yang mencapai Rp.74,88 miliar.

Grafik 3.5 Komposisi Dana Pihak Ketiga



Komposisi jenis simpanan yang diminati masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau cenderung pada jenis tabungan mudharabah. Hal ini agak berbeda dengan kondisi secara nasional dimana jenis deposito mudharabah memiliki porsi terbesar yaitu 52,68%.

Kondisi ini juga terjadi pada komposisi simpanan pada industri perbankan konvensional, dimana nasabah industri perbankan konvensional yang tersebar di wilayah kerja KBI Batam cenderung memilih simpanan berbentuk giro dan tabungan yang masing-masing memiliki pangsa mencapai 40,58% dan 30,85%.

3.4.3 Perkembangan Penyaluran Kredit

Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah di Indonesia sampai dengan triwulan I-2007 mencapai Rp.20,82 triliun atau memiliki pangsa sebesar 2,57% dari total penyaluran kredit perbankan. Meskipun pangsa yang dimiliki perbankan syariah masih tergolong kecil, namun pertumbuhan indikator syariah secara tahunan (yoy) mencatat angka yang cukup baik yaitu mencapai 30,15%, dimana pertumbuhan kredit oleh bank umum hanya mencapai 14,34%.

TABEL 3.12 – INDIKATOR PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Keterangan	2005				Tw.I 2006
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	
Pembiayaan Musyarakah Nilai (miliar rupiah) Pangsa (%)	2.006 12,54	2.099 11,56	2.336 11,88	2.335 11,42	2.368 11,37
Pembiayaan Mudharabah Nilai (miliar rupiah) Pangsa (%)	3.209 20,06	3.561 19,61	3.843 19,54	4.062 19,87	4.133 19,85
Piutang Murabahah Nilai (miliar rupiah) Pangsa (%)	9.981 62,39	11.778 64,85	12.449 63,31	12.624 61,75	12.770 61,33
Piutang Salam Nilai (miliar rupiah) Pangsa (%)	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
Piutang Istishna' Nilai (miliar rupiah) Pangsa (%)	289 1,81	293 1,62	303 1,54	337 1,65	343 1,65
Lainnya Nilai (miliar rupiah) Pangsa (%)	512 3,20	430 2,37	731 3,72	1.087 5,32	1.207 5,80
TOTAL	15.997	18.162	19.662	20.445	20.820

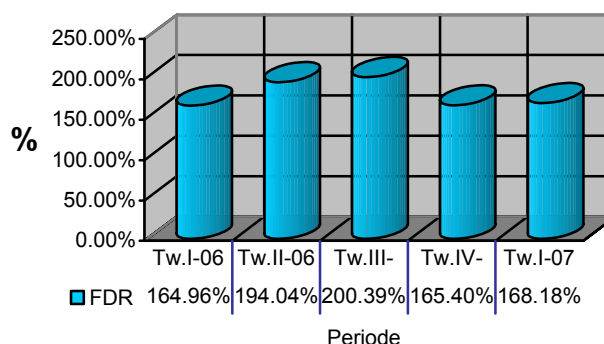
Sumber : Bank Indonesia

Sektor ekonomi yang memperoleh pembiayaan terbesar oleh industri perbankan syariah di Indonesia pada triwulan I-2007 adalah sektor jasa dunia usaha sebesar

Rp.5,39 triliun dengan pangsa sebesar 25,91% dan diikuti sektor perdagangan, restoran & hotel sebesar Rp.3,92 miliar dengan pangsa sebesar 18,81%. Adapun besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah pada triwulan laporan sebesar 95,14% cenderung menurun dibandingkan triwulan IV-2006 yang tercatat sebesar 198,90%.

Pembiayaan oleh industri perbankan syariah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I-2007 mencapai Rp.249,73 miliar dengan pangsa 3,72% terhadap total pembiayaan oleh bank umum di wilker KBI Batam. Jumlah pembiayaan perbankan syariah tersebut membentuk nilai FDR sebesar 168,18% dimana terjadi peningkatan dibandingkan akhir tahun 2006 yang tercatat sebesar 165,40%. Kondisi regional ini lebih baik dibandingkan nasional dimana tingkat FDR nasional mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2006.

Grafik 3.6 Pergerakan tingkat FDR Perbankan Syariah



BOKS - VII

PENERBITAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.9/7/PBI/2007 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERANAN PERBANKAN SYARIAH

Untuk meningkatkan peranan Bank Umum konvensional yang memberikan layanan syariah serta untuk memperluas jaringan transaksi perbankan syariah, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

Penyesuaian kebijakan tersebut mencakup perluasan jaringan pelayanan transaksi syariah dengan lebih mengoptimalkan keberadaan layanan syariah melalui perluasan fungsi layanan syariah dan fleksibilitas dalam hal persyaratan lokasi pembukaan layanan syariah. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air.

Pengembangan perbankan syariah merupakan salah satu arah kebijakan perbankan tahun 2007

sebagaimana yang diuraikan oleh Gubernur Bank Indonesia – Burhanuddin Abdullah pada saat pertemuan tahunan perbankan pada tanggal 12 Januari 2007. Melihat pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah, maka Bank Indonesia memandang perlu untuk mempercepat pertumbuhan syariah agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Total asset perbankan diperkirakan akan dapat meningkat menjadi 5% pada akhir tahun 2008 dimana total asset saat ini mencapai 1,5%.

Program akselerasi pengembangan perbankan syariah Indonesia akan dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu: **Pertama**, melalui program sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat secara lebih intensif, **Kedua**, mendorong pengayaan produk dan jasa keuangan syariah serta perluasan outlet pelayanan sehingga dapat lebih menjangkau kebutuhan masyarakat, dan **Ketiga**, Bank Indonesia lebih berperan serta secara aktif dalam mendukung masuknya dana investasi luar negeri melalui instrumen-instrumen keuangan syariah.

3.5 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Total *asset* BPR yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mengalami peningkatan. Sampai dengan tw.I-2007, total *asset* BPR mencapai Rp.458,78 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp.31,14 miliar (7,28%) dibanding tw.IV-2006 yang tercatat sebesar Rp. 427,64 miliar.

TABEL 3.13 – PERKEMBANGAN KINERJA BPR

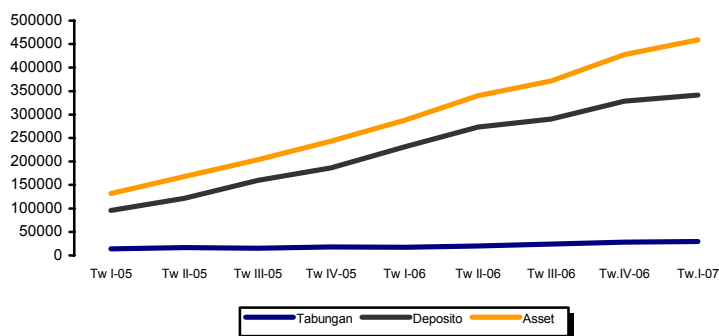
(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006				Tw.I 2006
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1. TOTAL ASSET	287.447	340.141	371.274	427.636	458.780
2. TOTAL DANA	248.163	293.085	314.030	356.977	371.215
a. Tabungan	17.391	20.018	23.803	28.168	29.471
b. Deposito	230.772	273.067	290.227	328.809	341.744

Sumber: Bank Indonesia

Total dana yang berhasil dihimpun oleh BPR pada triwulan laporan meningkat dibandingkan akhir tahun 2006, dimana pada triwulan IV-2006 tercatat sebesar Rp.356,98 miliar, maka pada triwulan I-2007 meningkat menjadi Rp.371,22 miliar, atau naik sebesar Rp.14,24 miliar (3,99%) dan secara tahunan (yoy) meningkat Rp.123,05 miliar (49,59%). Sebagian besar dana masyarakat yang dihimpun oleh BPR disimpan dalam bentuk deposito yaitu sebesar Rp.341,74 miliar atau 92,06% dari seluruh total DPK BPR. Sedangkan 7,94% sisanya disimpan dalam bentuk tabungan sebesar Rp.29,47 miliar. Hal ini merupakan kebalikan dari kondisi jenis simpanan masyarakat di Bank Umum. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito BPR yang tinggi menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat lebih suka menyimpan dananya dalam bentuk deposito di BPR dibandingkan Bank Umum. Disamping itu, untuk kondisi di BPR, selisih suku bunga deposito dan suku bunga tabungan yang relatif cukup besar menyebabkan jumlah simpanan masyarakat dalam bentuk deposito daripada tabungan. Bunga deposito berjangka BPR rata-rata sebesar 6,5%, sementara suku bunga tabungan rata-rata 4%.

GRAFIK 3.7 – PERKEMBANGAN ASSET DAN DANA PIHAK KETIGA BPR



Tidak seperti halnya yang terjadi di bank umum, pertumbuhan jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk kredit lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang dihimpun BPR di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR kepada masyarakat meningkat jika dibandingkan dengan triwulan IV-2006. Jumlah kredit yang diberikan pada tw.I-2007 sebesar Rp.266,33 miliar atau meningkat Rp.34,33 miliar (14,80%) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.231,99 miliar. Peningkatan penyaluran kredit oleh BPR juga dibarengi dengan perbaikan NPL dimana jika pada triwulan IV-2006 NPL BPR di Provinsi Kepulauan Riau adalah 1,12% maka pada triwulan I-2007 menurun menjadi 0,75%.

TABEL 3.14 – PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS KREDIT BPR
(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006				Tw.I 2007
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
Total Kredit	141.064	165.561	196.539	231.998	266.329
a. Lancar	139.800	163.620	193.584	229.390	264.319
b. Kurang Lancar	1.149	1.157	1.977	1.600	1.024
c. Di ragukan	45	385	624	765	771
d. Macet	70	399	354	243	215

Sumber: Bank Indonesia

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan konsumsi. Kredit untuk konsumsi yang disalurkan BPR di wilayah kerja KBI Batam pada tw.I-2007 sebesar Rp.179,84 miliar atau 67,53% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sementara kredit untuk modal kerja yang diberikan BPR di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.66,14 miliar atau 24,83% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sedangkan untuk kredit investasi sebesar Rp.20,36 miliar (7,64%). Besarnya kredit BPR untuk keperluan konsumsi mencerminkan intermediasi yang dilakukan BPR terhadap dunia usaha masih belum optimal. Seperti halnya bank umum, BPR masih lebih merasa aman memberikan kredit di sektor konsumsi.

TABEL 3.15 – PERKEMBANGAN KREDIT BPR MENURUT JENIS PENGGUNAANNYA*(dalam jutaan rupiah)*

KETERANGAN	2006				Tw.I 2007
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
Total Kredit	141.064	165.561	196.539	231.998	266.329
a. Investasi	17.830	20.073	20.541	20.059	20.355
b. Modal Kerja	41.294	50.126	56.473	62.076	66.135
c. Konsumsi	81.940	95.362	119.524	149.863	179.839

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data pada tabel 3.15, penyaluran kredit untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan kredit untuk KPR ini menunjukkan adanya pergeseran pembiayaan yang dilakukan oleh BPR, dimana banyaknya proyek dan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam menyebabkan permintaan kredit untuk KPR meningkat.

Pada tw.I-2007, kredit yang diberikan untuk sektor ekonomi di luar kepentingan konsumsi masih didominasi kredit untuk sektor perdagangan yaitu sebesar Rp.40,35 miliar atau 15,15% dari total kredit untuk sektor ekonomi di luar konsumsi. Kemudian kredit untuk sektor jasa-jasa tercatat sebesar Rp.24,58 miliar atau 9,23% dari seluruh kredit yang diberikan untuk sektor ekonomi di luar konsumsi. Sedangkan sektor pertanian dan perindustrian masing-masing sejumlah Rp.852 juta (0,32%) dan Rp.393 juta (0,15%). Besarnya porsi kredit untuk sektor perdagangan menunjukkan industri ini masih merupakan sektor yang cukup berkembang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam.

TABEL 3.16 – PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI YANG MEMPEROLEH PEMBIAYAAN DARI BPR*(dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	2006				Tw.I 2007
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	
SEKTOR EKONOMI	141.064	165.561	196.515	231.998	266.329
a. Pertanian	252	252	410	298	852
b. Perindustrian	633	584	938	712	393
c. Perdagangan	35.067	35.577	32.739	36.796	40.347
d. Jasa-Jasa	7.108	14.823	21.885	27.156	24.577
e. Lainnya	98.004	114.325	140.544	167.036	200.160

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan tabel 3.16, kredit yang diberikan kepada sektor ekonomi secara rata-rata mengalami peningkatan kecuali sektor perindustrian dan jasa-jasa. Peningkatan paling tinggi pada tw.I-2007 dialami oleh kredit untuk sektor ekonomi pertanian yang meningkat 185,91% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan penyaluran kredit juga terjadi di sektor perdagangan dan sektor lainnya masing-masing sebesar 9,65% dan 19,83% dari triwulan sebelumnya. Sebaliknya sektor perindustrian dan sektor jasa-jasa justru mengalami penurunan kredit sebesar 44,80% dan 9,50%.

3.5.1 Perkembangan Kredit UMKM

Upaya aktif Bank Indonesia untuk mendorong upaya pengembangan UMKM antara lain melalui pembentukan satgas KKMB. Selain itu, dalam upaya pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia Batam menyelenggarakan beberapa kegiatan, seperti Bantuan Teknis UMKM dan Rapat Koordinasi UMKM. Disamping itu, Bank Indonesia Batam juga turut serta dalam upaya untuk mendukung kegiatan Bazaar Intermediasi UMKM.

Secara nasional, Bank Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan sektor UMKM, diantaranya adalah pendirian lembaga riset perbankan daerah (LRPD) dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan KKMB di bidang kelautan dan perikanan antara BI dengan Departemen Kelautan & Perikanan.

Untuk wilayah kerja KBI Batam, dilihat dari sisi pendanaan, penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada tw.I-2007 tercatat sebesar Rp.3,45 triliun, dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

3.6 Perkembangan Sistem Pembayaran

3.6.1 Pengedaran Uang Kartal

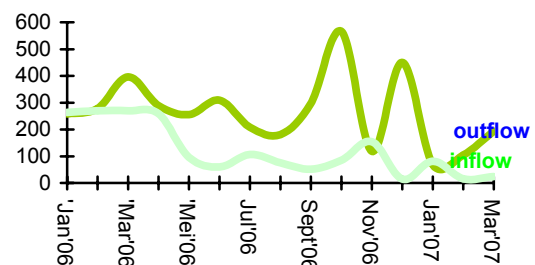
Perkembangan aliran uang yang masuk (*inflow*) dan keluar (*outflow*) di wilayah kerja Bank Indonesia Batam secara nominal menunjukkan *outflow* yang lebih besar daripada *inflow*. Pada tw.I-2007, *outflow* mencapai Rp.365,75 miliar, sementara *inflow* mencapai Rp.120,71 miliar, sehingga terjadi *net outflow* sebesar Rp.245,04 miliar. Secara bulanan rata-rata *outflow* Rp.121,92 miliar, sedangkan rata-rata *inflow* Rp.40,24 miliar.

Pada triwulan laporan tercatat jumlah uang kertas yang keluar dari KBI Batam sebanyak Rp.365,01 miliar dan uang logam sebanyak Rp.740,12 juta. Dibandingkan triwulan sebelumnya, baik uang kertas maupun uang logam yang keluar mengalami penurunan, masing-masing sebesar 67,70% dan 13,11%.

3.6.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan uang bersih (*clean money policy*) yaitu Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang rupiah dalam kondisi yang layak

Grafik 3.8 Perkembangan Inflow/Outflow di KBI Batam (Rp. miliar)

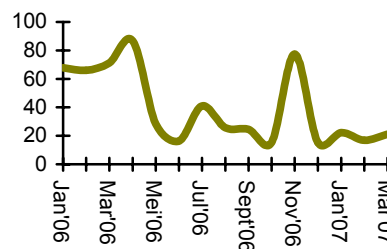


Sumber : Bank Indonesia

kepada masyarakat. Kegiatan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dilakukan dengan cara memusnahkan uang yang tidak layak edar dan menggantinya dengan uang yang layak edar. Disamping itu, Bank Indonesia juga memberikan pelayanan kepada perbankan dan masyarakat untuk kegiatan setoran, penarikan dan penukaran untuk pecahan besar ke pecahan kecil serta untuk uang rupiah lusuh.

Pada tw.I-2007, jumlah PTTB pada uang yang tidak layak edar sebesar Rp.60,06 miliar, menurun sebesar 44,49% terhadap triwulan sebelumnya. Penurunan PTTB ini sejalan dengan penurunan jumlah *inflow* ke BI Batam. Hal ini diperkirakan karena pada awal tahun, kegiatan ekonomi para pelaku usaha masih belum terlalu aktif.

Grafik 3.9 Perkembangan PTTB (Rp miliar)



Sumber: Bank Indonesia

3.7 Lalu Lintas Pembayaran Giral

3.7.1 Kliring Lokal

Untuk wilayah kerja KBI Batam, terdapat 3 (tiga) wilayah kliring lokal, yaitu: di KBI Batam untuk wilayah Kota Batam, PT. Bank Mandiri untuk wilayah Tanjung Pinang, dan PT. BNI untuk wilayah Tanjung Balai Karimun.

Nilai transaksi melalui sistem kliring lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tw.IV-2006 mencapai Rp.2,58 miliar atau rata-rata mencapai Rp.646,15 miliar/bulan. Nilai total kliring tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya baik total warkat kliring maupun secara nominal, begitu pula secara rata-rata.

TABEL 3.17 – PERKEMBANGAN KLIRING LOKAL

(miliar rupiah)

Keterangan	2006			Tw.I 2007
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	
Perputaran Kliring				
- Lembar	154.662	134.863	103.808	104.613
- Nominal (miliar Rp)	2.734.433	2.584.609	2.437.397	2.297.292
Rata-rata Harian Perputaran Kliring				
- Lembar	2.535	2.247	1.759	1.687
- Nominal (miliar Rp)	44.827	43.077	41.312	37.053
Penolakan Cek/BG Kosong				
- Lembar	1.012	856	1.623	1.449
- Nominal (miliar Rp)	19.924	14.506	33.611	33.885

Sumber : Bank Indonesia

Volume transaksi kliring di wilker BI Batam pada tw.I-2007 rata-rata mencapai 1.687 per-hari, menurun 4,09% dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1.759 warkat.

Sementara untuk nominal transaksi kliring, terdapat penurunan sebesar 10,31% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan kliring, maka Bank Indonesia menargetkan pengimplementasian Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2007. Hal ini dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai yang cepat, aman, handal, dan efisien. Aplikasi SKNBI pertama kali diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli 2005, dimana sampai akhir tahun 2005 seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah diimplementasikan SKNBI.

3.7.2 Transaksi BI-RTGS

Transaksi masyarakat melalui sarana Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Kantor Bank Indonesia Batam pada tw.I-2007 mengalami peningkatan pada transaksi masuk sedangkan untuk transaksi keluar terdapat peningkatan jika dibandingkan triwulan sebelumnya baik nominal maupun volume transaksi. Nominal transaksi RTGS untuk transaksi masuk sebesar Rp.4,246 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 6.135 transaksi, sementara untuk transaksi keluar sebesar Rp.4,187 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 6.866 transaksi.

TABEL 3.18 – PERKEMBANGAN BI-RTGS

Keterangan	2006				2007	q-t-q	
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Nominal	%
Transaksi Masuk							
Nominal (miliar Rp)	3.362	4.025	4.246	5.202	3.724	(1.478)	28,41
Volume	4.903	6.053	6.135	6.427	6.865	438	6,81
Transaksi Keluar							
Nominal (miliar Rp)	3.845	5.515	4.187	4.056	3.183	(873)	21,52
Volume	5.773	7.385	6.866	5.995	5.753	(242)	4,04

Sumber : Bank Indonesia

Penerapan sistem BI-RTGS di Indonesia dimulai sejak tanggal 17 November 2000, dimana sistem BI-RTGS dinilai sangat penting mengingat transaksi pembayaran bernilai besar (*High Value Payment System – HPVS*) yang memiliki potensi terjadinya resiko sistemik sebelum adanya sistem BI-RTGS menempati bagian mayoritas (hampir 2/3) dari seluruh transaksi pembayaran. Adapun implementasi sistem BI-RTGS di KBI Batam mulai dilaksanakan sejak 23 November 2001 bersamaan dengan KBI Pekanbaru.

3.7.3 Uang Palsu

Jumlah uang rupiah palsu yang dilaporkan ke Bank Indonesia Batam pada tw.I-2007 berjumlah Rp.140.000,00 dan mencapai 4 lembar. Apabila dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya, terdapat penurunan nominal sebesar Rp.220.000,00 dengan jumlah lembar menurun sebanyak 4 lembar.

Berdasarkan jenis pecahan, uang kertas Rp.50.000,00 dan Rp.20.000,00 merupakan jenis pecahan mata uang rupiah yang dipalsukan dan masing-masing sebanyak 2 lembar. Terkait dengan uang palsu yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia Batam terus melakukan berbagai upaya untuk menekan peredarannya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada berbagai kalangan (perbankan, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum), dimana pada triwulan I-2007 pelaksanaan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

Bab 4

Keuangan Daerah Periode Tahun 2007

4.1 KONDISI UMUM

Salah satu faktor pendukung utama bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah adalah jumlah anggaran yang ditetapkan oleh suatu Pemerintah Daerah, demikian pula dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 (enam) Kota/Kabupaten, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas :

- a. Anggaran pendapatan, terdiri atas :
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - Bagian dana perimbangan, yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dana alokasi khusus, serta bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.
- b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 terdapat peningkatan target penerimaan sebesar 22,42% yang disebabkan peningkatan target penerimaan pada beberapa pos, antara lain: pos pendapatan asli daerah, dan pos dana perimbangan. Sementara itu untuk pos bagi hasil pajak/bukan pajak terjadi penurunan target penerimaan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1

**TABEL 4.1 – PERBANDINGAN RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 DAN 2007**

				<i>(dalam Rupiah)</i>
NO	URAIAN	RENCANA PENERIMAAN 2006	RENCANA PENERIMAAN 2007	PERUBAHAN
				2007 Thd 2006 (%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	252.077.768.000	281.526.518.675	11,68
	Pajak Daerah	242.730.768.000	267.908.164.000	10,37
	Retribusi Daerah	420.000.000	485.000.000.000	15,48
	Lain-lain PAD yg sah	8.927.000.000	13.133.354.675	47,12
2	DANA PERIMBANGAN	659.075.000.000	803.867.150.859	21,97
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	481.075.000.000	470.537.150.859	(2,19)
	Dana Alokasi Umum	178.000.000.000	333.330.000.000	87,26
	Dana Alokasi Khusus	0	0	0
3	LAIN2 PENDAPATAN YG SAH	0	30.000.000.000	-
	Dana Penyeimbang	0	30.000.000.000	0
	JML PENDAPATAN DAERAH	911.152.768.000	1.115.393.669.534	22,42

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, jumlah penerimaan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Februari 2007 sebesar Rp.272,66 atau sebesar 30,95% dari jumlah yang ditargetkan.

TABEL 4.2 – REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

							<i>(dalam juta rupiah)</i>
No	Jenis Penerimaan	2006			2007		
		Tw.I	Sem. I	Sem. II	Jan	Feb	
I	PEMBIAYAAN	91.770,24	92.218,77	234.960,64	214.017,80	214.226,27	
II	PENDAPATAN						
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.808,15	42.671,06	235.536,00	9.270,95	17.014,23	
1	Pajak Daerah	12.827,94	28.163,18	229.116,00	6.611,40	11.827,78	
2	Retribusi Daerah	4.639,40	9.887,18	420,00	1.423,75	2.955,77	
3	Lain-lain PAD yang sah	1.340,81	4.620,71	0,00	1.235,80	2.230,69	
4	Laba Perusahaan yang Sah	-	-	6.000,00	-	-	
B	DANA PERIMBANGAN	45.719,23	161.401,89	400.075,00	19.683,57	41.417,66	
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	6.100,06	25.486,99	222.075,00	1.408,57	4.867,66	
2	Dana Alokasi Umum	2.028,55	61.023,52	178.000,00	18.275,00	36.550,00	
3	Dana Alokasi Khusus	37.300,75	74.601,50	0,00	0,00	0,00	
4	Bagi Hasil Pajak Provinsi	289,87	289,87	0,00	0,00	0,00	
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	156.297,62	296.291,72	0,00	0,00	0,00	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun berdasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Untuk tahun 2007, KUA Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,
2. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan,
3. Pembangunan infrastruktur perekonomian, pemerataan pertumbuhan antar daerah dan pengentasan kemiskinan,
4. Penguatan wilayah perbatasan,
5. Pengembangan keagamaan, kesenian dan pelestarian Budaya Melayu,
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan peningkatan pengawasan.

Adapun komponen pendanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 terdiri dari:

Pendapatan Daerah	Rp.1.115.393.669.534
Pembiayaan SILPA	Rp. 444.606.330.466
Jumlah APBD	Rp.1.560.000.000.000

4.2 APBD KOTA BATAM

Target APBD Kota Batam untuk sub pendapatan tahun 2007 terdiri dari pos pendapatan sebesar Rp.746,04 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp.135 miliar. Target APBD Kota Batam tahun 2007 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2006 pos pendapatan Kota Batam sebesar Rp.529,23 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp.93,83 miliar.

Realisasi penerimaan pendapatan Kota Batam sampai dengan Februari 2007 mencapai Rp.272,66 miliar atau mencapai 30,95% dari target pendapatan Kota Batam tahun 2006 yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.17,01 miliar dan Dana Perimbangan sebesar Rp.41,42 miliar, serta pembiayaan sebesar Rp.214,23 miliar.

Penerimaan daerah sampai dengan Februari 2007, jika dilihat menurut jenisnya sebagian besar (78,57%) dari sub pembiayaan yang terdiri dari sisa anggaran tahun lalu (99,95%) dan pengembalian pokok pinjaman dana bergulir (0,05%). Sedangkan penerimaan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi sebesar 6,24% atau sebesar Rp.17,01 miliar.

Berdasarkan rincian APBD Kota Batam untuk tahun 2007, program kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan memiliki persentase terbesar terhadap total APBD keseluruhan yang mencapai Rp.196,87 juta sedangkan persentase terkecil terdapat pada Biro Pemberdayaan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar Rp.1,36 juta.

TABEL 4.3 – ALOKASI DANA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI BATAM TAHUN 2007

NO.	KEBIJAKAN UMUM	TOTAL DANA (Juta Rupiah)
I.	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERTAMBANGAN	Rp. 196,870
	a. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan, jembatan/pelantar, pelabuhan.	Rp. 70,100
	b. Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan, pelantar dan jembatan.	Rp. 68,526
	c. Meningkatkan utilitas perkotaan dan mewujudkan citra kota yang nyaman.	Rp. 26,750
	d. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas infrastruktur di daerah hinterland.	Rp. 31,494
II.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 19,420
	a. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi.	Rp. 19,420
III.	DINAS KESEHATAN	Rp. 27,126
	a. meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan & KB bagi masy.	Rp. 27,126
IV.	DINAS PERINDAG DAN KOPERASI	Rp. 10,607
	a. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.	Rp. 7,657
	b. Pembinaan industri kecil dan menengah.	Rp. 2,500
	c. Pembinaan dan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan.	Rp. 450
V.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp. 9,775
	a. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.	Rp. 4,225
	b. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.	Rp. 4,950
	c. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.	Rp. 600

VI.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA a. Meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar. b. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.	Rp. 55,176 Rp. 38,586 Rp. 16,590
VII.	DINAS PARIWISATA a. Peningkatan kebudayaan dan kepariwisataan. b. Peningkatan kualitas pelayanan informasi.	Rp. 8,250 Rp. 7,900 Rp. 350
VIII.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Pengembangan pertanian dan perikanan.	Rp. 5,500 Rp. 5,500
IX.	DINAS PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN a. Pengelolaan kebersihan kota.	Rp. 9,739 Rp. 9,739
X.	BADAN PEMBERDAYAAN MASY DESA & KESEJAHTERAAN SOSIAL a. pemberdayaan UMKM dan koperasi. b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga.	Rp. 14,570 Rp. 9,950 Rp. 4,620
XI.	BIRO PEMBERDAYAAN a. pemberdayaan perempuan dan anak.	Rp. 1,360 Rp. 1,360
XII.	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN a. Meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar.	Rp. 5,500 Rp. 5,500
XIII.	BIRO PEMERINTAHAN SETDA a. Menyelenggarakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.	Rp. 2,970 Rp. 2,970

4.3 APBD KOTA TANJUNG PINANG

Jumlah alokasi APBD Kota Tanjung Pinang pada tahun 2007 mencapai Rp.150,26 juta dimana alokasi terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Rp.51,79 juta. Dengan jumlah angkatan kerja mencapai 76.547 orang, terdapat 7,8% penduduk yang merupakan pengangguran dengan nilai IPM mencapai 72,7 dan menduduki posisi 79 dari Kab/Kota.

TABEL 4.4 – KEGIATAN PEMPROV KEPRI 2007 BERLOKASI DI KOTA TANJUNG PINANG

NO	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)
1	DISDIKPORA	51.789.704.965
2	Dinas Kesehatan	13.404.510.680
3	Dinas Pekerjaan Umum	38.680.025.908
4	Dinas Perhubungan	37.888.534.350
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	217.612.500
6	BPMD dan Kesejahteraan Sosial	1.594.132.517
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.361.680.367
8	Dinas Pariwisata	3.327.725.000

4.4 APBD KABUPATEN KARIMUN

Jumlah APBD Kabupaten Karimun tahun 2007 mencapai Rp.535 miliar atau meningkat 30,49% terhadap tahun 2006. Daerah Karimun memiliki potensi besar untuk dikembangkan diantaranya sektor pariwisata, sektor perikanan dan kelautan, potensi pertanian, potensi perdagangan, serta potensi pertambangan.

TABEL 4.5 – KEGIATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2007

NO	DINAS/BADAN	JUMLAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Dinas Pekerjaan Umum	7	40	Rp. 189.653.104.180,-
2	Dinas Pendidikan	1	24	Rp. 20.797.400.000,-
3	Dinas Perhubungan	1	4	Rp. 18.704.000.000,-
4	Dinas Kesehatan	3	9	Rp. 3.041.500.000,-
5	Dinas Perikanan	1	14	Rp. 12.400.000.000,-
6	Dinas Pertanian	1	10	Rp. 12.379.000.000,-
7	Dinas Pariwisata	2	5	Rp. 7.727.607.550,-
8	Dinas Tenaga Kerja	1	7	Rp. 4.216.738.000,-
9	Dinas Pertambangan	1	7	Rp. 8.141.332.640,-
10	Badan Pemberdayaan Masy Desa	1	4	Rp. 7.936.504.000,-
11	Dinas Perindustrian & Perdag.	1	15	Rp. 2.210.000.000,-
	Jumlah	20	139	Rp. 287.207.186.380,-

4.5 APBD KABUPATEN BINTAN

Nilai APBD Kabupaten Bintan pada tahun 2007 sebesar Rp.439 miliar atau menurun - 6,71% terhadap tahun 2006, sedangkan proyeksi APBD tahun 2008 adalah Rp.404 miliar dengan proyeksi realisasi PAD mencapai Rp.88,6 miliar pada tahun 2008.

Besarnya alokasi pembiayaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2007 mencapai Rp.48,15 miliar yang terdiri dari:

a. Pembangunan Kantor Bupati Tahap I	Rp.19.500.000.000,-
b. Pembangunan Kantor DPRD Tahap I	Rp.19.500.000.000,-
c. Pembangunan Kantor Dinas PU (DAK)	Rp. 5.959.000.000,-
d. Pendamping Pembangunan Kantor Dinas PU	Rp. 595.500.000,-
e. <u>Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan</u>	<u>Rp. 2.593.176.660,-</u>
Total	Rp.48.147.676.660,-

TABEL 4.6 – PERKEMBANGAN APBD DAN REALISASI PAD KABUPATEN BINTAN

(miliar rupiah)

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Realisasi PAD	54	59	65,5	87,7	88,6
2	APBD	355	276	470,6	439	404

4.6 APBD KABUPATEN LINGGA

Pembentukan Kabupaten Lingga adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor:31 tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayah Kabupaten Lingga yang mencapai 211.772 km² terdiri dari 377 buah pulau, dimana 92 buah pulau yang sudah berpenghuni dan sisanya merupakan pulau yang belum berpenghuni. Jumlah penduduk Kabupaten Lingga adalah 84.254 jiwa dan memiliki PDRB sebesar Rp.257,69 miliar. Pendapatan perkapita penduduk di wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah timur mencapai Rp.7,4 juta/jiwa.

Untuk mengembangkan daerah tingkat II di Provinsi Kepulauan Riau, maka Pemerintah Provinsi telah menyusun beberapa program prioritas kegiatan Kabupaten Lingga yang terdapat pada APBD Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai Rp.309,81 miliar dan terdiri dari:

a. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Rp.105.000.000.000,-
b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	
- pendidikan	Rp. 25.108.206.250,-
- kesehatan	Rp. 7.485.000.000,-
c. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur	Rp.139.292.000.000,-
d. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Rp. 18.965.358.200,-
e. Peningkatan dan pembangunan sosial dan budaya	Rp. 10.472.817.550,-
f. Memperkecil kesenjangan pembangunan kecamatan	Rp. 2.489.659.000,-

4.7 APBD KABUPATEN NATUNA

Wilayah Kabupaten Natuna memiliki luas mencapai 264.788,51 km² dengan jumlah penduduk mencapai 93.644 jiwa. Daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rata-rata 28,95 jiwa/km² memiliki visi Menuju Natuna Makmur, Adil, Sejahtera Tahun 2020. Kabupaten yang dipimpin oleh Drs. H. Daeng Rusnadi dan Drs. H. R. Amirullah. Apt sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna memiliki lima pilar utama dalam membangun daerahnya, yaitu: Iman dan taqwa, kesehatan, pendidikan, ekonomi, penegakan dan taat hukum.

4.8 PENERIMAAN KANTOR PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kota Batam pada triwulan I-2007 meningkat dari Rp.26,95 miliar (tw.I-2006) menjadi Rp.50,43 miliar (tw.I-2007) atau meningkat sebesar 87,14%. Dari struktur penerimaan menurut jenisnya selama periode Januari – Maret 2007, sebesar 62,66% dalam bentuk PKB dan 37,34% dalam bentuk BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

TABEL 4.7 – PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PKB DAN BBN-KB DI KOTA BATAM (Juta Rupiah)

Periode	2006			2007		
	PKB	BBN-KB	Jml	PKB	BBN-KB	Jml
I. Triwulan I	18.962,54	7.983,65	26.946,19	31.597,80	18.830,42	50.428,32
II. Triwulan II	22.553,12	9.702,07	32.255,19			
III. Triwulan III	29.292,49	17.101,02	46.393,51			
IV. Triwulan IV	31.630,51	14.974,70	46.605,21			
Jan - Des	102.438,66	49.761,44	152.200,10	31.597,80	18.830,42	50.428,32

Sumber : Kantor Pendapatan Daerah Kota Batam

4.9 PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA BATAM

Pada tw.I-2006 (Januari-Maret), realisasi penerimaan pajak neto dalam bentuk PPh, PPN, dan PPn-BM serta pajak lainnya berjumlah Rp.210,75 miliar, sedangkan pada tw.II-2006 realisasi penerimaan sebesar Rp.180,79 miliar. Dengan demikian selama periode Januari-Juni 2006,

realisasi penerimaan pajak neto telah mencapai Rp.391,54 miliar, lebih rendah dibandingkan periode Semester I-2005 yang tercatat sebesar Rp.600,10 miliar atau turun sebesar 34,75%.

Apabila dilihat dari struktur penerimaan pajak menurut jenisnya selama periode Semester I-2006, sebesar 90,96% dalam bentuk PPh meskipun menunjukkan peningkatan andil jenis pajak ini dibanding pada periode Semester I-2005 yang mencapai 86,59%. Penerimaan pajak dalam bentuk PPN dan PPn-BM kontribusinya juga menurun dari 11,98% (Semester I-2005) menjadi 8,59% (Semester I-2006). Dengan demikian, perlu terus ditindaklanjuti langkah-langkah positif yang telah diterapkan dalam upaya mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak di Kota Batam, dengan lebih mengedepankan transparansi dari objek pajak maupun aparat perpajakan.

TABEL 4.8 – REALISASI PENERIMAAN PAJAK NETO MELALUI KPP BATAM
(Miliar Rp)

Periode	2005 *)				2006 *)			
	PPh	PPN & PPn-BM	Lain	Jml	PPh	PPN & PPn-BM	Lain	Jml
I. Triwulan I	264,91	38,13	4,08	307,12	199,24	11,00	0,51	210,75
a. Januari	63,14	14,00	1,14	78,28	49,80	5,47	0,10	55,37
b. Februari	54,65	11,58	,52	67,75	53,72	5,76	0,11	59,60
c. Maret	147,12	12,55	1,42	161,09	95,72	-0,24	0,30	95,78
II. Triwulan II	254,71	33,78	4,49	292,98	156,91	22,64	1,24	180,79
d. April	74,55	11,73	1,45	87,73	53,38	6,86	0,69	60,93
e. Mei	67,69	11,90	1,50	81,09	54,80	7,89	0,41	63,10
f. Juni	112,47	10,15	1,54	124,16	48,73	7,89	0,14	56,76
Semester I	519,62	71,91	8,57	600,10	356,15	33,64	1,75	391,54

Sumber : KPP Batam

Ket : *) Angka Perbaikan

Bab 5

Prospek Perekonomian Daerah

5.1 PROSPEK EKONOMI MAKRO

Kondisi perekonomian regional di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2006 s/d 2007 terus mengalami pertumbuhan dengan persentase pertumbuhan yang cukup stabil dengan persentase pertumbuhan perekonomian daerah mencapai 6,20% dimana sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar. Disamping itu, kestabilan harga barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Riau masih cukup stabil yang tercermin pada laju inflasi regional yang lebih kecil dibandingkan laju inflasi nasional dan Pekanbaru. Demikian pula dengan perkembangan indikator perbankan meskipun secara triwulanan persentase pertumbuhannya tidak terlalu signifikan.

Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang strategis dan berada di jalur perdagangan internasional mempengaruhi perkembangan sektor ekonomi di wilayah ini, diantaranya sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Potensi yang dimiliki oleh “Kota Gurindam” ini menjadi salah satu asset nasional yang mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan perekonomian Indonesia, apabila pemerintah mampu menciptakan kebijakan dan kondisi yang kondusif bagi Kepulauan Riau untuk berkembang. Untuk itu, kebijakan yang diterapkan pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau terus berkembang dan selalu berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing usaha khususnya pada sektor industri, dimana pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti: *Free Trade Zone (FTZ)*, *Bonded Zone Plus (BZP)*, dan *Special Economic Zone (SEZ)*. Saat ini wacana penerapan SEZ di wilayah Batam-Bintan-Karimun masih dalam proses pengembangan, dimana payung hukum pemberlakuan SEZ masih melalui proses penyusunan di Pemerintah Pusat. Terbitnya payung hukum tersebut merupakan satu hal yang diharapkan oleh seluruh pihak terutama pelaku usaha dan instansi di Kepulauan Riau. Langkah lain yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah untuk memajukan perekonomian daerahnya serta untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan promosi, sosialisasi dan kunjungan dari pihak investor dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu prioritas utama program kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan perkembangan sektor ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan I-2007, sektor industri masih menjadi sektor utama yang memberikan distribusi terbesar pada pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau, dan diikuti oleh sektor pertambangan dan sektor perdagangan. Dari sisi penggunaan sektor PMTB dan sektor pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk triwulan mendatang, diperkirakan pertumbuhan perekonomian wilayah Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkat dengan prasyarat sebagaimana diuraikan diatas. Disamping itu, kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia serta kemudahan birokrasi yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi modal dasar pengembangan kemajuan daerah.

5.2 PROSPEK INFLASI

Melihat perkembangan pergerakan harga barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kota Batam tercermin bahwa sampai dengan triwulan I-2007 laju inflasi/deflasi di Kota Batam cukup stabil. Peningkatan harga barang dan jasa dalam jangka waktu 2004 s/d 2007 secara rata-rata mencapai 1,2% per-triwulan dan berada di bawah laju inflasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan perubahan harga yang terjadi dapat terkendali dengan baik.

Kelompok bahan makanan merupakan kelompok barang yang memiliki pergerakan harga yang cukup berfluktuasi. Hal ini karena keterbatasan sektor pertanian Kota Batam sehingga Kota Batam sangat tergantung pada pasokan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan bagi masyarakat.

Untuk triwulan kedepan diperkirakan tekanan harga terhadap barang dan jasa di Kota Batam masih tetap terjaga dengan prasyarat kondisi ekonomi dan sektor riil tetap stabil. Disamping itu, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat *administered price* diharapkan tidak terjadi dalam triwulan kedepan. Kepastian hukum dan iklim berinvestasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi salah satu kondisi yang memerlukan pembenahan dari Pemerintah dan pihak terkait disamping ketersediaan infrastruktur yang akan mendukung perkembangan sektor ekonomi.

5.3 PROSPEK PERBANKAN

Sejalan dengan prospek perekonomian daerah yang meningkat, peran sektor keuangan khususnya perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan II-2007 diperkirakan juga akan mengalami peningkatan pada indikator-indikator perbankan, baik dari sisi

penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Hal ini dipengaruhi oleh prospek penurunan suku bunga yang didukung oleh pendapatan masyarakat yang meningkat. Kebijakan relaksasi perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia juga diharapkan mampu mendukung peningkatan peran dan fungsi perbankan kedepannya.

Kondisi perbankan di wilayah kerja KBI Batam menunjukkan bahwa secara rata-rata perbankan merupakan *funding unit* dimana pertumbuhan penghimpunan dana yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi cukup besar bagi perbankan terhadap sisi pembiayaan, dimana dana masyarakat yang terhimpun tersebut akan menjadi modal perbankan untuk penyaluran kredit. Meskipun demikian, pihak perbankan mesti tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dengan meningkatnya kegiatan dunia usaha serta rencana pemerintah untuk membangun beberapa proyek infrastruktur di wilayah Kepri diperkirakan juga akan mendorong peningkatan fungsi intermediasi dan transaksi ekonomi dengan menggunakan pelayanan jasa pada sistem perbankan. Kedepannya diharapkan dapat tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik antara sektor perbankan dengan sektor riil.

RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN
WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA BATAM

INDIKATOR	2006				2007	Pertumb
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	qtq
MAKRO						
Laju Inflasi (q-t-q)	0,66	-0.39	2,28	1,97	1,42	-0,55
IHK Bahan Makanan	1,76	-2.16	4.70	5,91	3,79	-2,12
IHK Makanan Jadi	0,93	0,25	2,88	0,98	1,32	0,34
IHK Perumahan	0,14	0,24	0,13	0,25	0,22	-0,03
IHK Sandang	0,22	0,35	-0.22	2,00	0,80	-1,20
IHK Kesehatan	0,56	0,44	0,08	1,08	0,27	-0,81
IHK Pendidikan	-0,24	0,36	14,74	0,44	0,00	-0,44
IHK Transport	0,10	0,11	0.27	0,01	0,47	0,46
Pertumbuhan PDRB (q-t-q)	1,42	1,98	1,86	0,42	1,99	1,57
Ekspor (Ribuan USD)	1.331.007	2.262.712	1.510.189	1.540.116	1.776.722	15,36%
Impor (Ribuan USD) *)	2.755.827	2.182.516	1.755.450	2.390.744	1.992.707	-16,65%
PERBANKAN						
Deposito (miliar Rp)	2.302,86	2.725,13	2.934,75	3.506,05	3.560,43	1,55%
Giro (miliar Rp)	3.429,73	4.435,88	4.988,06	5.086,04	5.057,69	-0,56%
Tabungan (miliar Rp)	2.819,91	3.089,24	3.211,56	3.828,18	3.844,02	0,41%
DPK (miliar Rp)	8.552,50	10.250,25	11.134,37	12.420,27	12.462,14	0,34%
Total Asset (miliar Rp)	10.559,53	12.513,64	13.115,16	14.592,74	14.617,08	0,17%
Kredit Umum (miliar Rp)	5.771,56	6.283,82	6.258,18	6.666,36	6.713,06	0,70%
KUK (miliar Rp)	733,61	745,69	660,37	721,82	736,52	2,04%
Suku Bunga Kredit (rata2 tertimbang)	15,58%	16,67%	17,34%	15,47%	24,85%	60,63%
Suku Bunga Dep 3 bln (rata2 tertimbang)	10,20%	10,09%	9,82%	8,25%	8,15%	-1,21%
LDR (%)	67,48%	59,69%	56,21%	53,67%	53,87%	0,20%
NIM (%)	1,21%	2,31%	3,32%	4,09%	0,95%	-3,14%
NPL (%)	6,17%	5,87%	6,41%	4,34%	4,46%	0,12%
SISTEM PEMBAYARAN						
Inflow (miliar Rp)	804,04	416,46	235,33	232,92	120,71	-48,18%
Outflow (miliar Rp)	933,75	854,39	686,06	1.134,52	365,75	-67,76%
PTTB (miliar Rp)	204,92	131,42	91,3	108,2	60,05	-44,50%
Nominal Uang Palsu	2.060.000	1.220.000	490.000	390.000	140.000	-64,10%
Jumlah uang palsu (lembar)	25	28	11	8	4	-50,00%
Volume Kliring (lembar)	146.241	154.662	134.863	103.808	104.613	0,78%
Nominal Kliring (miliar Rp)	2.168,74	2.734,43	2.584,61	2.437,40	2.297,29	-5,75%
KEUANGAN DAERAH KOTA BATAM						
Pendapatan Asli Daerah (miliar Rp)	18,81	42,67	67,90	94,68	17,01	-82,03%
Dana Alokasi Umum (miliar Rp)	2.028,55	58.994,97	124.236,99	150,97	36,55	-75,79%
Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)	37.300,75	37.300,75	722.713,15	10,33	-	

Data Ekspor & Impor, sumber PDIE Jakarta

Ket: *) Data impor sejak tahun 2005 termasuk Kawasan Berikat

**TABEL 1. PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA 2005 - 2007 (JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2006				2007
	Trw.I	Trw.II	Trw.III	Trw.IV	Trw.I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	578.142,99	591.645,21	609.684,23	590.533,65	602.883,19
a. Tanaman Pangan & Hortikultura	34.619,11	34.619,11	32.028,31	22.171,48	33.734,79
b. Perkebunan	35.073,77	36.567,16	42.954,22	38.774,01	39.165,77
c. Peternakan	90.136,94	92.924,82	91.991,50	93.973,65	94.265,04
d. Kehutanan	7.648,92	7.898,51	7.538,28	7.364,37	7.648,92
e. Perikanan	410.664,25	419.635,61	435.171,92	428.250,14	428.068,66
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1.181.518,99	1.212.007,33	1.232.552,32	1.239.948,54	1.295.395,06
a. Pertambangan	1.040.394,35	1.061.483,96	1.079.399,73	1.084.285,08	1.134.387,78
b. Pertambangan non migas	89.073,33	96.271,45	98.183,71	99.989,21	103.874,56
c. Penggalian	52.051,30	54.251,92	54.968,88	55.674,25	57.132,72
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	6.438.488,32	6.656.379,13	6.878.155,81	7.287.063,55	7.497.587,87
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Non migas	6.438.488,32	6.656.379,13	6.878.155,81	7.287.063,55	7.497.587,87
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	33.890,98	34.943,56	35.516,39	36.059,84	37.214,70
a. Listrik	26.406,54	27.356,37	27.897,13	28.373,87	29.437,74
b. Air Bersih	7.484,44	7.587,19	7.619,26	7.685,97	7.776,96
5. BANGUNAN	453.158,26	900.828,39	479.470,23	495.597,69	519.831,94
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	893.056,24	900.828,39	918.265,57	945.375,55	972.980,49
a. Perdagangan Besar dan Eceran	770.322,28	773.619,70	787.717,24	809.838,12	831.876,09
b. Hotel	77.132,90	79.995,21	82.556,91	85.689,87	89.031,86
c. Restoran	45.601,06	47.213,48	47.991,42	49.847,56	52.072,54
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	435.870,58	453.107,63	466.956,80	485.640,70	506.146,45
a. Angkutan	388.749,35	405.986,39	414.857,28	428.349,60	446.381,97
b. Komunikasi	47.121,24	47.121,24	52.099,52	57.291,09	59.764,49
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRS	611.498,39	624.643,71	634.994,37	647.803,45	669.906,77
a. Bank	420.145,49	427.284,95	433.591,11	439.825,54	452.764,11
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & JPK	19.876,67	20.169,31	20.720,54	21.442,33	22.104,69
c. Jasa Penunjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Sewa Bangunan	166.953,80	172.478,14	175.887,07	181.637,23	189.908,05
e. Jasa Perusahaan	4.522,43	4.711,31	4.795,65	4.898,35	5.129,92
9. JASA - JASA	254.733,83	264.204,79	273.644,74	283.472,72	296.385,12
P D R B	10.880.358,58	11.209.941,06	11.529.240,46	12.011.495,68	12.398.331,60

Sumber : BPS Batam

**TABEL 2. PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
MENURUT LAPANGAN USAHA 2005 - 2007 (JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2006				2007
	Trw.I	Trw.II	Trw.III	Trw.IV	Trw.I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	378.314,54	385.684,79	396.979,93	381.385,23	384.956,85
a. Tanaman Pangan & Hortikultura	23.019,89	22.915,49	21.515,25	14.856,74	21.564,54
b. Perkebunan	19.358,26	20.167,66	23.652,37	21.211,56	21.943,32
c. Peternakan	58.064,17	59.552,94	59.068,33	60.259,21	60.729,55
d. Kehutanan	5.716,29	5.781,47	5.389,84	5.221,43	5.045,68
e. Perikanan	272.155,92	277.267,23	287.354,14	279.836,29	275.673,76
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	524.705,03	532.542,17	539.292,08	542.617,78	552.920,54
a. Pertambangan	447.788,08	451.516,83	457.317,25	459.125,13	467.215,76
b. Pertambangan non migas	44.104,33	47.324,21	48.019,56	49.225,23	50.776,65
c. Penggalian	32.812,62	33.701,13	33.955,27	34.267,42	34.928,13
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5.342.551,90	5.455.945,06	5.544.603,95	5.551.424,67	5.661.814,98
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Non migas	5.342.551,90	5.455.945,06	5.544.603,95	5.551.424,67	5.661.814,98
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	18.288,26	18.778,90	18.842,41	19.059,62	19.257,20
a. Listrik	15.202,61	15.651,13	15.702,46	15.913,75	16.091,87
b. Air Bersih	3.085,65	3.127,77	3.139,95	3.145,87	3.165,33
5. BANGUNAN	209.025,45	216.832,84	219.971,04	226.754,06	231.735,87
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	630.612,82	635.410,85	646.844,24	664.218,49	678.952,27
a. Perdagangan Besar dan Eceran	539.529,91	541.607,16	550.985,27	565.542,11	576.712,65
b. Hotel	60.082,47	62.172,60	63.834,85	65.543,60	67.987,64
c. Restoran	31.000,44	31.631,09	32.024,12	33.132,78	34.251,98
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	305.931,92	311.807,20	317.240,12	326.883,97	333.534,08
a. Angkutan	270.710,30	275.467,08	280.383,61	287.476,19	293.017,77
b. Komunikasi	35.221,62	36.340,12	36.856,51	39.407,78	40.516,31
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRS	351.905,08	358.225,02	363.784,40	370.113,28	378.450,50
a. Bank	237.159,82	240.681,13	243.971,54	246.778,98	251.898,33
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & JPK	12.422,04	12.963,23	13.303,12	13.705,32	13.909,54
c. Jasa Penunjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Sewa Bangunan	100.044,59	102.259,37	104.151,28	107.230,55	110.176,87
e. Jasa Perusahaan	2.278,63	2.321,29	2.358,46	2.398,43	2.465,76
9. JASA - JASA	150.675,71	153.661,46	157.044,13	160.891,07	165.450,87
P D R B	7.912.010,71	8.068.888,29	8.204.602,30	8.243.348,17	8.407.073,16

Sumber : BPS Batam

TABEL 3. PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jan'07 s/d Mar'07 (Tahun 2002=100)

Kelompok	Jan 07		Feb 07		Mar 07	
	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.
UMUM	135,54	2,26	135,08	-0,34	134,40	-0,50
I. BAHAN MAKANAN	146,56	7,24	144,31	-1,54	141,54	-1,92
a. Padi-padian, umbi-umbian & hasil hasilnya	166,26	1,16	169,65	2,04	181,48	6,97
b. Daging dan hasil-hasilnya	116,85	0,78	113,91	-2,52	115,53	1,42
c. Ikan segar	151,45	8,43	159,69	5,44	147,62	-7,56
d. Ikan diawetkan	130,35	0,38	132,21	1,43	132,73	0,39
e. Telur, susu dan hasil-hasilnya	113,56	-0,06	112,86	-0,62	113,36	0,44
f. Sayuran	241,68	45,20	187,42	-22,45	159,13	-15,09
g. Kacang-kacangan	120,50	-1,67	120,08	-0,35	120,08	0,00
h. Buah-buahan	126,69	2,43	129,16	1,95	129,16	0,00
i. Bumbu-bumbuan	139,47	-2,22	148,89	6,75	146,59	-1,54
j. Lemak dan minyak	129,18	4,38	132,15	2,30	133,80	1,25
k. Bahan makanan lainnya	130,60	0,00	131,44	0,64	132,47	0,78
II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	135,31	1,08	135,64	0,24	135,62	-0,01
a. Makanan jadi	133,52	2,21	134,17	0,49	135,19	0,76
b. Minuman yang tidak beralkohol	134,63	0,24	134,72	0,07	131,64	-2,29
c. Rokok, tembakau dan minuman beralkohol	138,02	0,01	138,03	0,01	138,04	0,01
III. PERUMAHAN	120,75	0,07	120,83	0,07	120,91	0,07
a. Biaya tempat tinggal	111,99	0,00	111,99	0,00	112,05	0,05
b. Bahan bakar, penerangan dan air	149,08	0,19	149,08	0,00	149,08	0,00
c. Perlengkapan rumah tangga	110,16	0,00	110,87	0,64	111,54	0,60
d. Penyelenggara rumah tangga	111,17	0,16	111,60	0,39	111,77	0,15
IV. SANDANG	114,34	0,10	115,43	0,95	115,15	-0,24
a. Sandang laki-laki dewasa	104,46	0,00	104,46	0,00	104,46	0,00
b. Sandang wanita dewasa	102,84	0,00	102,84	0,00	102,84	0,00
c. Sandang anak-anak	105,43	0,01	105,43	0,00	106,03	0,57
d. Sandang pribadi dan sandang lainnya	174,16	0,40	181,65	4,30	178,74	-1,60
V. KESEHATAN	109,49	0,01	109,74	0,23	109,77	0,03
a. Jasa kesehatan	115,18	0,00	115,18	0,00	115,18	0,00
b. Obat-obatan	112,95	0,00	112,95	0,00	112,95	0,00
c. Jasa Perawatan Jasmani	111,97	0,00	111,97	0,00	111,97	0,00
d. Perawatan Jasmani dan Kosmetika	106,45	0,02	106,87	0,39	106,91	0,04
VI. PENDIDIKAN, REKREASI & OLAH RAGA	139,63	0,00	139,63	0,00	139,63	0,00
a. Jasa Pendidikan	179,42	0,00	179,42	0,00	179,42	0,00
b. Kursus-kursus/Pelatihan	104,97	0,00	104,97	0,00	104,97	0,00
c. Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
d. Rekreasi	112,47	0,00	112,47	0,00	112,47	0,00
e. Olahraga	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VII. TRANSPOR & KOMUNIKASI	155,53	0,21	155,53	0,00	155,93	0,26
a. Transpor	178,33	0,29	178,33	0,00	178,97	0,36
b. Komunikasi dan pengiriman	115,92	0,00	115,92	0,00	115,92	0,00
c. Sarana dan penunjang transpor	105,33	0,00	105,33	0,00	105,33	0,00
d. Jasa Keuangan	173,68	0,00	173,68	0,00	173,68	0,00

Sumber : BPS Batam

TABEL 4. PERKEMBANGAN INFLASI KOTA BATAM, PEKANBARU DAN NASIONAL

Kota	JAN/04	Q II/04	Q III/04	Q IV/04	Q I/05	Q II/05	Q III/05	Q IV/05	Q I/06	Q II/06	Q III/06	Q IV/06	Q I/07
1. Batam	0,03	1,10	0,70	1,89	2,65	0,39	1,52	14,79	0,66	-0,39	1,34	1,97	1,42
2. Pekanbaru	0,89	3,45	1,30	2,71	2,75	0,14	2,91	17,1	0,73	0,90	1,98	3,35	3,64
3. Nasional	0,57	2,35	0,49	2,46	3,19	1,05	2,03	17,11	1,98	0,89	1,16	2,41	1,90

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

TABEL 5. DATA BANK UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dlm.Juta Rp.

KETERANGAN	Periode				
	Mar-06	Jun-06	Sep-06	Des-06	Mar-07
TOTAL ASSET	10.559.530	12.173.496	13.115.164	14.592.742	14.617.078
DANA PIHAK III	8.552.495	10.250.252	11.134.372	12.420.268	12.462.137
a. Giro	3.429.726	4.435.878	4.988.060	5.086.038	5.057.691
b. Deposito	2.302.858	3.089.243	2.934.752	3.506.054	3.560.426
c. Tabungan	2.819.911	2.725.131	3.211.560	3.828.176	3.844.020
KREDIT					
a. Jenis Penggunaan	5.771.562	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064
- Modal Kerja	2.081.520	2.199.868	2.299.214	2.366.633	2.303.606
- Investasi	1.511.012	1.596.120	1.528.315	1.758.377	1.764.400
- Konsumsi	2.179.030	2.322.274	2.430.651	2.541.345	2.645.058
b. Golongan Kredit	5.771.562	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064
- KUK	733.613	745.690	660.367	721.815	736.524
- Non KUK	5.037.949	5.372.572	5.597.813	5.944.540	5.976.540
b. Jenis Kredit	5.771.562	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064
- UMKM	3.157.413	3.311.625	3.447.910	3.732.440	3.824.333
- Non UMKM	2.614.149	2.806.637	2.810.270	2.933.915	2.888.731
c. Kolektibilitas	5.771.562	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064
- Lancar	4.650.364	4.957.027	4.978.457	5.658.971	5.658.159
- D.P.Khusus	789.573	801.847	878.791	718.327	755.618
- Kurang Lancar	22.604	43.229	113.297	51.033	43.591
- Diragukan	52.004	40.739	30.406	28.018	38.974
- Macet	257.017	275.420	257.229	210.006	2.216.722
RATIO					
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	67,48%	59,69%	56,21%	53,67%	53,87%
b. Non Performing Loans (NPL)	5,75%	5,87%	6,41%	4,34%	34,25%
c. Penyaluran KUK	12,71%	12,19%	10,55%	10,83%	10,97%
b. Penyaluran UMKM	54,71%	54,13%	55,09%	55,99%	56,97%

Sumber : Bank Indonesia Batam

**TABEL 6. DATA BANK UMUM
WILAYAH KEPULAUAN RIAU *)**

Dim. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode							
	Jun-05	Sep-05	Des-05	Mar-06	Jun-06	Sept-06	Des-06	Mar-07
TOTAL ASSET	1.714.569	1.714.569	1.692.934	2.025.803	2.505.748	2.752.076	3.148.553	4.411.406
DANA PIHAK III	1.756.648	1.756.648	1.896.659	2.437.201	2.373.852	3.527.586	4.441.093	4.302.828
a. Giro	637.206	637.206	690.472	935.856	925.238	1.799.219	1.750.407	1.593.936
b. Deposito	184.974	184.974	146.402	459.923	544.678	649.991	1.258.970	1.409.571
c. Tabungan	934.468	934.468	1.059.785	1.041.422	903.936	1.078.376	1.431.716	1.299.321
KREDIT								
a. Jenis Penggunaan	1.606.428	296.024	116.251	739.121	741.651	991.558	1.077.505	1.090.551
- Modal Kerja	240.065	240.065	186.747	325.025	306.969	342.744	398.016	371.052
- Investasi	1.355.768	45.364	(131.041)	149.391	155.244	181.457	188.952	195.943
- Konsumsi	10.595	10.595	60.545	264.705	279.438	467.357	490.537	523.556
b. Golongan Kredit	296.024	296.024	116.251	739.121	741.651	991.558	1.077.505	1.090.551
- KUK	172.276	172.276	190.331	165.491	156.478	219.646	235.960	226.598
- Non KUK	123.748	123.748	(74.080)	573.630	585.173	771.912	841.545	863.953
b. Jenis Kredit	296.024	296.024	116.251	739.121	741.651	991.558	1.077.505	1.090.551
- UMKM	235.385	235.385	289.039	514.989	508.797	2.183.879	774.145	801.835
- Non UMKM	60.639	60.639	(172.788)	224.132	232.854	(1.192.321)	303.360	288.716
c. Kolektibilitas	602.941	296.024	116.251	739.121	741.651	991.558	1.077.505	3.090.551
- Lancar	527.618	527.618	258.471	613.762	595.463	801.294	888.732	882.570
- D.P Khusus	(163.260)	(163.260)	(136.854)	37.822	53.146	72.340	147.365	144.434
- Kurang Lancar	19.663	(23.605)	(4.731)	413	2.941	86.919	14.740	21.240
- Diragukan	41.865	22.184	8.694	11.768	10.139	3.883	6.798	11.138
- Macet	177.055	(66.913)	(9.329)	75.356	79.962	27.122	19.870	2.031.169
RATIO								
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	91,45%	16,85%	6,13%	30,33%	31,24%	28,11%	24,26%	25,34%
b. Non Performing Loan (NPLs)	39,57%	-23,08%	-4,62%	11,84%	12,55%	11,89%	3,84%	66,77%
c. Penyaluran KUK	58,20%	58,20%	163,72%	22,39%	21,10%	22,15%	21,90%	20,78%
d. Penyaluran UMKM	79,52%	79,52%	248,63%	69,68%	68,60%	220,25%	71,85%	73,53%

Sumber : Bank Indonesia Batam

*) meliputi Tj. Pinang, Tj. Balai Karimun, Natuna

TABEL 7. DATA BANK UMUM
KOTA BATAM

dlm.juta Rp

KETERANGAN	Periode							
	Jun.2005	Sep.2005	Des-05	Mar.2006	Jun 2006	Sep-06	Des-06	Mar-07
TOTAL ASSET	7.601.663	8.022.161	8.188.109	#####	9.131.399	9.421.420	9.966.611	10.181.336
DANA PIHAK III	6.049.847	6.224.301	6.269.948	#####	7.197.490	7.606.786	7.979.175	8.159.309
a. Giro	2.468.863	2.492.805	2.588.702	2.504.488	2.991.265	3.188.841	3.335.631	3.463.755
b. Deposito	1.431.173	1.659.129	1.709.368	1.758.180	2.099.628	2.284.761	2.247.084	2.150.855
c. Tabungan	2.149.811	2.072.367	1.971.878	1.915.975	2.106.597	2.133.184	2.396.460	2.544.699
KREDIT								
a. Jenis Penggunaan	4.465.106	4.988.122	5.138.278	#####	5.302.606	5.266.622	5.588.850	5.622.513
- Modal Kerja	1.563.527	1.662.105	1.812.894	1.774.551	1.876.439	1.956.470	1.968.617	1.932.554
- Investasi	1.314.150	1.564.101	1.488.503	1.355.768	1.428.990	1.346.858	1.569.425	1.568.457
- Konsumsi	1.587.429	1.761.916	1.836.881	1.899.592	1.997.177	1.963.294	2.050.808	2.121.502
b. Golongan Kredit	4.465.106	4.988.122	5.138.278	#####	5.302.606	5.266.622	5.588.850	5.622.513
- KUK	622.023	597.065	560.147	577.135	581.187	440.721	485.855	509.926
- Non KUK	3.843.083	4.391.057	4.578.131	4.452.776	4.721.419	4.825.901	5.102.995	5.112.587
b. Jenis Kredit	4.465.106	4.988.122	5.138.278	#####	5.302.606	5.266.622	5.588.850	5.622.513
- UMKM	2.387.664	2.539.087	2.592.954	2.648.616	2.768.363	1.264.031	2.958.295	3.022.498
- Non UMKM	2.077.442	2.449.035	2.545.324	2.381.295	2.534.243	4.002.591	2.630.555	2.600.015
c. Kolektibilitas	4.465.106	4.988.122	5.138.278	#####	5.302.606	5.266.622	5.588.850	5.622.513
- Lancar	3.739.772	4.029.741	4.230.611	4.054.901	4.281.312	4.177.163	4.770.239	4.775.589
- D.P. Khusus	527.718	742.746	642.231	736.427	775.283	806.451	570.962	611.184
- Kurang Lancar	44.873	51.316	86.261	19.663	29.270	26.378	36.293	22.351
- Diragukan	32.228	24.868	11.953	41.865	26.275	26.523	21.220	27.836
- Macet	120.515	139.451	167.222	177.055	190.466	230.107	190.136	185.553
RATIO								
a. Loan to Dept Ratio (LDR)	73,81%	80,14%	81,95%	81,41%	73,67%	69,24%	70,04%	68,91%
b. Non Performing Loan (NPL)	4,43%	4,32%	5,17%	4,74%	4,64%	5,37%	4,43%	4,19%
c. Penyaluran KUK	13,93%	11,97%	10,90%	11,47%	10,96%	8,37%	8,69%	9,07%
d. Penyaluran UMKM	53,47%	50,90%	50,46%	52,66%	52,21%	24,00%	52,93%	53,76%

Sumber : Bank Indonesia Batam
Kepri (Tj.Pinang, Tj.Uban, Karimun dan Natuna)

**TABEL 8. DATA PENGALIRAN KAS MASUK / KELUAR
DAN KEGIATAN PEMBERIAN TANDA TIDAK BERHARGA (PTTB)
KANTOR BANK INDONESIA BATAM**

No	Nama Bulan	Pengaliran Masuk (Jutaan Rp)	Pengaliran Keluar (Jutaan Rp)	Pemberian Tanda Tidak Berharga (Jutaan Rp)
1	Tahun 2000	462.953,66	2.635.234,81	398.055,62
2	Tahun 2001	629.831,60	2.987.016,25	239.678,80
3	Tahun 2002	1.033.638,93	2.549.992,51	452.865,93
4	Tahun 2003	1.495.116,25	2.484.657,11	788.860,84
5	Trw. I 2004	482.275,13	581.277,17	260.294,19
6	Trw. II 2004	411.464,39	891.148,36	312.121,60
	Trw. IV 2004	539.764,19	1.339.736,86	308.784,92
7	Tahun 2004	1.916.806,75	3.649.307,28	1.294.656,53
	Trw. I 2005	640.230,81	926.990,06	409.223,23
	Trw. II 2005	544.737,73	999.525,99	252.284,87
	Trw. III 2005	499.380,25	1.013.848,73	133.242,75
8	Januari 2006	264.207,72	257.567,63	67.711,87
	Februari 2006	269.475,86	278.910,89	65.945,72
	Maret 2006	270.355,37	397.274,49	71.261,43
	Trw. I 2006	804.038,95	933.753,01	204.919,02
9	April 2006	259.239,21	289.319,31	86.798,58
	Mei 2006	96.796,99	255.199,80	28.321,03
	Juni 2006	60.424,38	309.874,21	16.302,79
	Trw. II 2006	416.460,58	854.393,15	131.422,41
10	Juli 2006	107.594,32	208.750,69	41.043,63
	Agustus 2006	75.633,01	180.680,87	25.709,93
	September 2006	52.102,99	296.627,42	24.550,11
	Trw.III 2006	235.330,32	686.058,98	91.303,67
11	Oktober 2006	85.386,48	566.756,20	15.326,60
	November 2006	153.597,90	117.756,21	77.549,63
	Desember 2006	13.933,54	450.008,64	15.326,60
	Trw.IV 2006	252.917,92	1.134.521,05	108.202,83
12	Januari 2007	80.529,98	68.103,18	22.192,11
	Februari 2007	16.412,91	103.517,88	16.804,76
	Maret 2007	23.766,94	194.126,92	21.058,78
	Trw.I 2007	120.709,83	365.747,98	60.055,65

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 9. PERPUTARAN KLIRING BATAM, TANJUNG PINANG DAN TANJUNG BALAI KARIMUN

JENIS	Trw.II/2005		Trw.III/2005		Trw.I/2006		Trw.II/2006		Trw.III/2006		Trw.IV/2006		Trw.I/2007	
	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari
A. WARKAT KLIRING														
1. WARKAT (Lbr)	154.879	2.539	157.535	2.583	146.241	2.359	154.662	2.535	134.863	2.141	103.808	1.759	104.613	1.687
2. NOMINAL (Jt.Rp)	2.208.473	36.204	2.371.965	38.885	2.168.735	34.980	2.734.433	44.827	2.584.609	41.026	2.437.397	41.312	2.297.292	37.053
B. TOLAKAN KLIRING														
1. CEK KOSONG														
- Lembar	369	6	321	5	323	5	327	5	339	5	399	7	297	5
- Nominal (Jt.Rp)	8.456	139	7.845	129	18.482	298	6.654	109	7.384	117	13.912	236	7.683	124
2. BG. KOSONG														
- Lembar	618	10	660	11	537	9	685	11	517	8	486	8	393	6
- Nominal (Jt.Rp)	13.932	228	13.204	216	10.936	176	13.270	218	7.122	113	9.664	164	10.800	174
3. ALASAN LAIN														
- Lembar	637	10	653	11	528	9	491	8	568	9	738	13	759	12
- Nominal (Jt.Rp)	11.148	183	11.196	184	9.567	154	7.802	128	6.889	109	10.035	170	15.402	248
4. TOTAL TOLAKAN														
- Lembar	1.624	27	1.634	27	1.388	22	1.503	25	1.424	23	1.623	28	1.449	23
- Nominal (Jt.Rp)	33.536	550	32.245	529	38.985	629	27.725	455	21.826	346	33.611	570	33.885	547

Sumber : Bank Indonesia Batam